



Laporan Kinerja SETDITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) Tahun 2020 selesai disusun. Penyusunan LKj merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PPKL ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama tahun 2020.

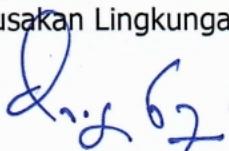
Tahun 2020 merupakan awal periode RPJMN 2020-2024. Telah banyak capaian peningkatan manajemen kinerja untuk mewujudkan reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP lingkup Ditjen PPKL telah mencapai 78,02 poin dan penyelenggaraan maturitas SPIP sudah memasuki level 3 (3,358, terdefinisi). Hasil evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi memperoleh hasil sebesar 31,01. Pagu anggaran Ditjen PPKL juga selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan peningkatan sebesar 2,16%. Perbaikan untuk pemantauan capaian kinerja juga telah dilakukan dengan menerapkan pemantauan kinerja semua pejabat setiap triwulan dan pemantauan bulanan untuk semua unit kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja. Selain itu Ditjen PPKL juga merupakan pembina dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Jafung Pedal), kriteria penilaian Jafung Pedal juga semakin ditingkatkan dan terus dilakukan upaya pembinaan terhadap Jafung Pedal yang ada di berbagai daerah. Pengaturan tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan telah diperbarui dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 30 Tahun 2019.

Ditjen PPKL juga telah meningkatkan pelayanannya kepada kepentingan masyarakat. Jumlah Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut & Injeksi yang diterbitkan selama tahun 2014-2020 sebanyak 346 izin. Pelayanan terhadap pelaporan kinerja perusahaan melalui aplikasi SIMPEL sebanyak 9.653. Selama tahun 2020, telah tercapai 72 (tujuh puluh dua) rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan perundang-undangan di bidang PPKL, pelayanan, dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Saran dan kritik membangun diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PPKL Tahun 2020 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2021

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan


Ir. Dida Migfar Ridha, MSi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen PPKL.

Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen PPKL adalah terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Indikator kinerjanya adalah SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai 79 poin.

Sekretariat Ditjen PPKL terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: (a) Bagian Program dan Evaluasi; (b) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; (c) Bagian Keuangan dan Umum; dan (d) Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik. Sasaran unit kegiatan masing-masing bagian adalah:

1. Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Ditjen PPKL;
2. Efektifitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
3. Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
4. Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Alokasi awal anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2020 sebesar Rp. 65.903.558.000,- (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), lalu terdapat perubahan anggaran menjadi Rp. 62.322.124.000,- (enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Capaian penyerapan anggaran sebesar 97,27%. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 102,98%, namun penilaian SAKIP belum dilaksanakan, sedangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 sebesar 78,02.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Ditjen PPKL

Alokasi anggaran awal untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 8.003.502.000,- dan dilakukan revisi anggaran dengan Pagu Anggaran menjadi Rp. 8.449.071.000,-. Selama tahun 2020, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.358.256.237. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 110,32% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,9%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,13, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana

Alokasi anggaran awal untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 4.061.873.000,- dan dilakukan revisi anggaran dengan Pagu Anggaran menjadi Rp. 948.777.000,-. Selama tahun 2020, realisasi anggaran sebesar Rp. 926.208.185,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 100,00% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,6%, sehingga efisiensi kegiatan mencapai 1,02, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Pelayanan Umum dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Alokasi anggaran awal untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 50.424.868.000,- dan dilakukan revisi anggaran dengan Pagu Anggaran menjadi Rp. 51.541.088.000,-. Selama Tahun 2020, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.051.056.899,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,1%, sehingga efisiensi kegiatan mencapai 1,01, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Pembinaan Hukum dan Koordinasi Administrasi Kerja Sama Teknik Dalam Negeri dan Luar Negeri

Alokasi anggaran awal untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 3.413.315.000,- dan dilakukan revisi anggaran dengan Pagu Anggaran menjadi Rp. 1.383.188.000,-. Selama Tahun 2020, realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.282.335.519,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 118% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 92,7%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,24, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	3
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Sumber Daya Manusia.....	5
1.5. Keuangan.....	5
Bab 2 Perencanaan Kinerja.....	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	7
2.2. Rencana Kerja Tahun 2020.....	8
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	9
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	13
3.1. Metode Pengukuran.....	13
3.1.1. Pengukuran Kinerja.....	13
3.1.2. Pengukuran Penyerapan Anggaran.....	13
3.1.3. Efektifitas dan Efisiensi.....	13
3.2. Capaian Kinerja Setditjen PPKL.....	14
3.2.1. Bagian Program dan Evaluasi.....	16
3.2.2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.....	47
3.2.3. Bagian Keuangan dan Umum.....	56
3.2.4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.....	62
3.3. Realisasi Anggaran.....	88
3.4. Efisiensi.....	89
3.5. Efektifitas.....	91
Bab 4 Penutup.....	93
4.1. Kesimpulan.....	93
4.2. Saran.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL.....	5
Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2020.....	5
Tabel 3. Penjabaran Muatan Intensi Kementerian dalam Intensi Strategis Ditjen PPKL.....	7
Tabel 4. Sasaran Unit Kegiatan di Setditjen PPKL Tahun 2020.....	8
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2020.....	9
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Program dan Evaluasi Tahun 2020.....	9
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Keuangan dan Umum Tahun 2020.....	9
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2020.....	10
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2020.....	10
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kasubbag Program dan Anggaran Tahun 2020.....	10
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kasubbag Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi Tahun 2020	10
Tabel 12. Perjanjian Kinerja Kasubbag Administrasi Keuangan Tahun 2020.....	11
Tabel 13. Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha Tahun 2020.....	11
Tabel 14. Perjanjian Kinerja Kasubbag Perlengkapan Tahun 2020.....	11
Tabel 15. Perjanjian Kinerja Kasubbag Administrasi Kepegawaian Tahun 2020.....	11
Tabel 16. Perjanjian Kinerja Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2020.....	12
Tabel 17. Perjanjian Kinerja Kasubbag Hukum Tahun 2020.....	12
Tabel 18. Perjanjian Kinerja Kasubbag Kerja Sama Teknik Tahun 2020.....	12
Tabel 19. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020.....	14
Tabel 20. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 21. Capaian Kinerja Kabag Program & Evaluasi Tahun 2020.....	17
Tabel 22. Capaian Kinerja Kasubbag Program & Anggaran Tahun 2020.....	17
Tabel 23. Capaian Kinerja Kasubbag Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi Tahun 2020.	17
Tabel 24. Tahapan Penerbitan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2021.....	18
Tabel 25. Rekapitulasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran air di DAS Citarum Tahun 2020.....	24
Tabel 26. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2020.....	24



Tabel 27. <i>Advetoria/</i> Ditjen PPKL Tahun 2020.....	42
Tabel 28. Daftar Video Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2020.....	43
Tabel 29. Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020.....	45
Tabel 30. Rekapitulasi Resiko Signifikan Satker Setditjen PPKL Tahun 2020.....	46
Tabel 31. Capaian Kinerja Kabag Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana Tahun 2020.....	47
Tabel 32. Capaian Kinerja Kasubbag Administrasi Kepegawaian Tahun 2020.....	47
Tabel 33. Capaian Kinerja Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2020.....	48
Tabel 34. Kegiatan Layanan Kepegawaian Tahun 2020.....	48
Tabel 35. Sebaran JF Pedal dan Calon JF Pedal Berdasarkan Wilayah Ekoregion dan Jenjang Jabatan.....	50
Tabel 36. Draft Proses Bisnis Unit Lingkup Ditjen PPKL.....	53
Tabel 37. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL.....	55
Tabel 38. Capaian Kinerja Kabag Keuangan dan Umum Tahun 2020.....	56
Tabel 39. Capaian Kinerja Kasubbag Administrasi Keuangan Tahun 2020.....	56
Tabel 40. Capaian Kinerja Kasubbag Tata Usaha Tahun 2020.....	57
Tabel 41. Capaian Kinerja Kasubbag Perlengkapan Tahun 2020.....	57
Tabel 42. Laporan Penatausahaan BMN Tingkat Eselon I Tahun 2020.....	59
Tabel 43. Capaian Kinerja Kabag Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2020.....	63
Tabel 44. Capaian Kinerja Kasubbag Hukum Tahun 2020.....	63
Tabel 45. Capaian Kinerja Kasubbag Kerja Sama Teknik Tahun 2020.....	64
Tabel 46. Daftar Peraturan Menteri.....	65
Tabel 47. Daftar Rancangan Keputusan Menteri LHK.....	66
Tabel 48. Daftar Keputusan Menteri LHK sebagai Tindak Lanjut Delegasi.....	66
Tabel 49. Daftar Keputusan Menteri LHK sebagai Tindak Lanjut Delegasi.....	67
Tabel 50. Daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.....	68
Tabel 51. Daftar Jenis Industri Pengelolaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Injeksi Tahun 2014 – 2020.....	68
Tabel 52. Keputusan Menteri LHK tentang Perizinan yang telah diterbitkan.....	71
Tabel 53. Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan.....	73
Tabel 54. Nilai Rata-Rata Pelayanan (NRR) dan.....	73
Tabel 55. Surat Edaran Menteri LHK yang telah diterbitkan.....	74

Tabel 56. Rekapitulasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti selama Tahun 2020.....	75
Tabel 57. Rekapitulasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti selama Tahun 2016-2020.....	75
Tabel 58. Daftar Kerja Sama Dalam Negeri.....	75
Tabel 59. Daftar Monitoring Kerja Sama Terealisasi.....	80
Tabel 60. Kontribusi Perusahaan dalam Upaya Pencapaian SDGs.....	86
Tabel 61. Capaian Penyerapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2020.....	89
Tabel 62. Efisiensi Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2020.....	90
Tabel 63. Efektifitas Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2020.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai SAKIP.....	2
Gambar 2. Nilai Maturitas SPIP.....	2
Gambar 3. Struktur Organisasi Setditjen PPKL.....	4
Gambar 4. Pagu Anggaran & Realisasi Setditjen PPKL Tahun 2019-2020.....	6
Gambar 5. Tampilan EMONEV PPKL 2020.....	15
Gambar 6. Evaluasi SAKIP Tahun 2015-2019.....	15
Gambar 7. Rakernis Ditjen PPKL, 8-12 Maret 2020.....	20
Gambar 8. Halaman Utama Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan.....	22
Gambar 9. Capaian <i>Output</i> dan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2020.....	22
Gambar 10. Status Kelengkapan Data Bulanan pada Aplikasi E-Monev Bappenas.....	23
Gambar 11. Capaian Kinerja Eselon 1 dan Monitoring Nilai Kinerja Satker Ditjen PPKL pada Aplikasi E-Monev SMART DJA TA 2020.....	23
Gambar 12. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri LHK menyerahkan PROPER Emas kepada perusahaan.....	25
Gambar 13. Peresmian IPAL di Pondok Pesantren Darul Hijrah oleh Menteri LHK.....	25
Gambar 14. Kegiatan Bersih Sungai Ciliwung yang Dipimpin oleh Walikota Bogor dan Dirjen PPKL.....	26
Gambar 15. Kegiatan Bimbingan Teknis SPARING oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.....	26
Gambar 16. Peresmian Media Center PPKL oleh Menteri LHK dan Komisi IV DPR RI.....	27
Gambar 17. Kunjungan Ditjen PPKL dan awak media ke Ekoriparian Telukjambe, Karawang	27
Gambar 18. Kunjungan Ditjen PPKL dan awak media ke Taman Nasional Gunung Rinjani...	28
Gambar 19. Kegiatan pembagian sabun dan penyemprotan desinfektan.....	28
Gambar 20. Kegiatan pembagian sabun dan penyemprotan desinfektan.....	29
Gambar 21. Webinar dalam rangka Hari Bumi tahun 2020 oleh Ditjen PPKL.....	29
Gambar 22. Pemberian bantuan untuk pengendalian wabah Covid-19 kepada komunitas...	30
Gambar 23. Pertemuan virtual Ditjen PPKL dengan GAPKI mengenai strategi pencegahan karhutla di lahan gambut pada areal konsesi perkebunan.....	30
.Gambar 24. Poster-poster kegiatan HLH 2020 oleh Ditjen PPKL.....	31
Gambar 25. Suasana Webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020.....	31

Gambar 26. Diskusi Virtual Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional di eks PLG.....	32
Gambar 27. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Ditjen PPKL secara virtual.....	32
Gambar 28. <i>FGD Marine Litter Forum With Science</i>	33
Gambar 29. Grafik Perbandingan Data Konsentrasi PM 2,5 Jakarta 2019 – 2020.....	33
Gambar 30. Kegiatan Patroli Sungai KLHK.....	34
Gambar 31. NGOPI KLHK, Webinar dalam Rangka HUT ke-75 RI dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020.....	34
Gambar 32. Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus di Provinsi Bengkulu.....	35
Gambar 33. Aksi Bersih Pantai Ditjen PPKL di Pantai Panjang Bengkulu.....	35
Gambar 34. Bimbingan Teknis virtual mengenai Perizinan Pembuangan Air Limbah Sektor Industri bagi pemerintah kabupaten/kota.....	36
Gambar 35. Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria Hijau PROPER Tahun 2020.....	36
Gambar 36. Kunjungan dan Monitoring Ditjen PPKL ke Lahan Pemulihan di Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan.....	37
Gambar 37. Kunjungan Ditjen PPKL ke Kediri dan Malang.....	37
Gambar 38. Webinar Pengembangan Karir Melalui Jabatan Fungsional PEDAL.....	38
Gambar 39. Workshop mengenai Implementasi Pengelolaan Pesisir dan Laut.....	38
Gambar 40. Bimbingan Teknis SPARING bagi Dinas LHK Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia.....	39
Gambar 41. Peringatan ke-9 Hari Ciliwung.....	39
Gambar 42. Diskusi antara Ditjen PPKL.....	40
Gambar 43. Kunjungan tim Ditjen PPKL ke 8 Desa Mandiri Peduli Gambut.....	40
Gambar 44. Anugerah PROPER 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI.....	41
Gambar 45. Kunjungan Ditjen PPKL ke 10 Desa Mandiri Peduli Gambut tahap 2.....	41
Gambar 46. Contoh Kegiatan Publikasi <i>Advetorial</i> di Media Massa (Cetak) Tahun 2020.....	43
Gambar 47. Buku Statistik.....	44
Gambar 48. Website Ditjen PPKL KLHK.....	45
Gambar 49. Webinar Pengembangan Karir Melalui Jabatan Fungsional PEDAL.....	49
Gambar 50. Sebaran JF dan Calon JF PEDAL Berdasarkan Wilayah.....	51
Gambar 51. Pejabat Fungsional dan Calon Pejabat Fungsional PEDAL.....	51
Gambar 52. Presentasi Sekretaris Ditjen PPKL pada Pelaksanaan Evaluasi RB Lingkup Ditjen PPKL.....	56

Gambar 53. Rapat Penyusunan LK Triwulan III dan LK Tahun 2019.....	58
Gambar 54. Pemasangan alat penguapan desinfektan.....	60
Gambar 55. Pemasangan alat pengukur suhu badan.....	60
Gambar 56. Pembinaan Layanan Kantor lingkup Ditjen PPKL.....	60
Gambar 57. Pengadaan Alat Operasional Kantor Ditjen PPKL.....	61
Gambar 58. Kegiatan Ketatausahaan.....	62
Gambar 59. Diagram Jenis Kelamin Responden.....	72
Gambar 60. Diagram Latar Belakang Pendidikan Responden.....	72
Gambar 61. Diagram Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Responden.....	73
Gambar 62. Diagram Jenis Usaha dan/atau Kegiatan.....	73
Gambar 63. Jumlah Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020.....	80
Gambar 64. Status Jumlah Kerja Sama Lingkup Ditjen PPKL.....	80
Gambar 65. Tingkat Ketaatan PROPER 2020.....	82
Gambar 66. Tren Kenaikan PROPER.....	84
Gambar 67. Kinerja PROPER 2020.....	85
Gambar 68. Peringkat PROPER 2020.....	85
Gambar 69. Penghematan dari PROPER dan Dana Bergulir.....	86
Gambar 70. Jumlah Inovasi 2017-2020.....	86
Gambar 71. Tampilan Menu pada SIMPEL.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Setditjen PPKL Tahun 2020

Lampiran 2. Daftar Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Tahun 2020

Lampiran 3. Daftar Peraturan Tahun 2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2020-2024 diawali dengan penyesuaian rencana 5 (lima) tahun ke depan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN periode sebelumnya. Tahun 2020 merupakan tahun pertama yang menjadi penentu awal arah pembangunan agar diteruskan di tahun-tahun selanjutnya untuk keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan tahun 2020 adalah tematik, holistik, integratif dan spasial. Secara Nasional, pembangunan tahun 2020 memiliki tema **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional. Penjabaran tematik dari program pemerintah ke dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan secara komprehensif dalam suatu rangkaian kegiatan serta terpadu. Selain itu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu sama lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Tahun 2020 KLHK mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, yang bertujuan untuk mensinkronkan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya; yaitu: 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020, yaitu: 1) peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkulasi ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata Kelola dan pengembangan SDM); 2) mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup. KLHK memiliki sasaran utama untuk mempertahankan perannya berupa meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup 67,00-68,5, nilai produk domestic bruto sector hulu 5-7% dan laju deforestasi 300-400 ribu/tahun.

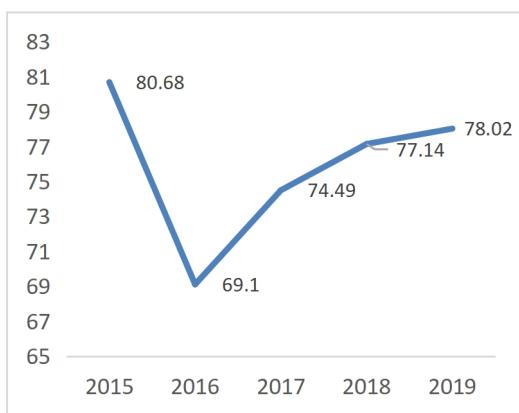
Pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan memerlukan strategi yang baru mengikuti protokol dalam masa Pandemi Covid 19. Pada tahun 2020 ini mulai dilakukan ujicoba penggunaan E-Monev Ditjen PPKL dalam melakukan pelaporan dan evaluasi kinerja individu. Oleh karena itu diperlukan rencana aksi yang detail sehingga masing-masing pegawai dapat terukur kinerjanya. Penerapan aplikasi ini sangat membantu dalam evaluasi kinerja terutama pada masa kerja di rumah (*Work From Home*).

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari SAKIP sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP di dalam peraturan tersebut mempunyai arti rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat

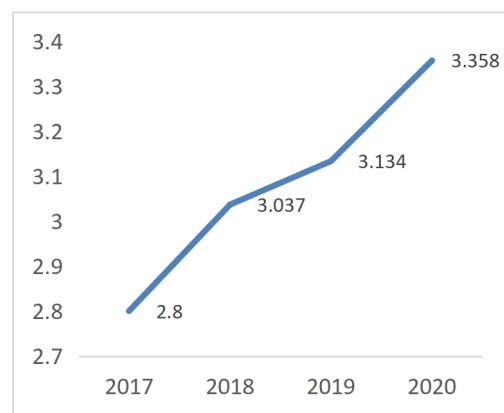
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja selain dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja, juga digunakan untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian SAKIP Tahun 2015-2019 dan Maturitas SPIP Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2, berikut ini.



Gambar 1. Nilai SAKIP
(Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020)



Gambar 2. Nilai Maturitas SPIP
(Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020)

Sekretariat Ditjen PPKL (Setditjen PPKL) mempunyai kewajiban untuk menyusun LKj berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020. Perjanjian Kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Setditjen PPKL tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Setditjen PPKL tahun 2020. Penyusunan PK Tahun 2020 dilaksanakan untuk semua Eselon II, III dan IV. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan LKj Setditjen PPKL Tahun 2020.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Setditjen PPKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Ditjen PPKL.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-nya, Setditjen PPKL mempunyai 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian Program dan Evaluasi

Tugas Bagian Program dan Evaluasi adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik, data, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan Ditjen PPKL.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan pengembangan karir pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- b. Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

3. Bagian Keuangan dan Umum

Tugas Bagian Keuangan dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi, yaitu:

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan; dan
- Pelaksanaan urusan admininstrasi keuangan.

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai fungsi yaitu:

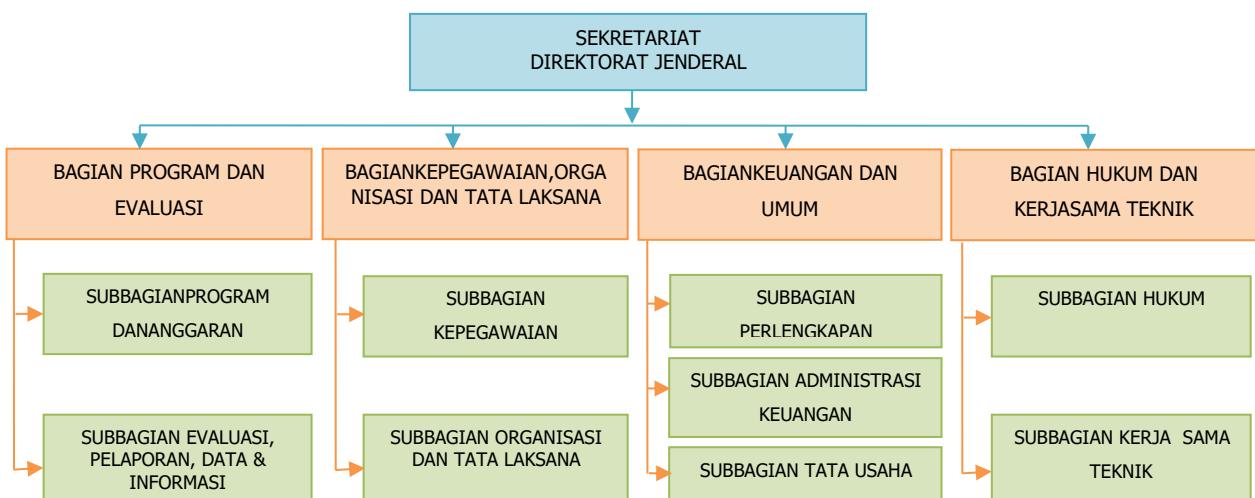
- Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

1.3. Struktur Organisasi

PermenLHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, menyebutkan bahwa Setditjen PPPL terdiri dari:

- Bagian Program dan Evaluasi;
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- Bagian Keuangan dan Umum; dan
- Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Secara lengkap, struktur organisasi Setditjen PPPL dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi Setditjen PPPL

(Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020)

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setditjen PPKL sebanyak 63 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci SDM Setditjen PPKL seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL

No	Bagian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Sekretariat Direktorat Jenderal		1						1
2	Bagian Program dan Evaluasi	1		1					2
	Sub Bagian Program dan Anggaran		1	3		1			5
	Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi		1	3					4
3	Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana			1					1
	Sub Bagian Kepegawaian			3	1	2			6
	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana			3					3
4	Bagian Keuangan dan Umum		1						1
	Sub Bagian Tata Usaha			3	1	3	1		8
	Sub Bagian Perlengkapan			4	1	5	1	3	14
	Sub Bagian Administrasi Keuangan			1	4	2	1		8
5	Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik		1						1
	Sub bagian Hukum			4		1			5
	Sub Bagian Kerja Sama Teknik			4					4
JUMLAH		1	5	30	7	14	3	3	63

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, 2020

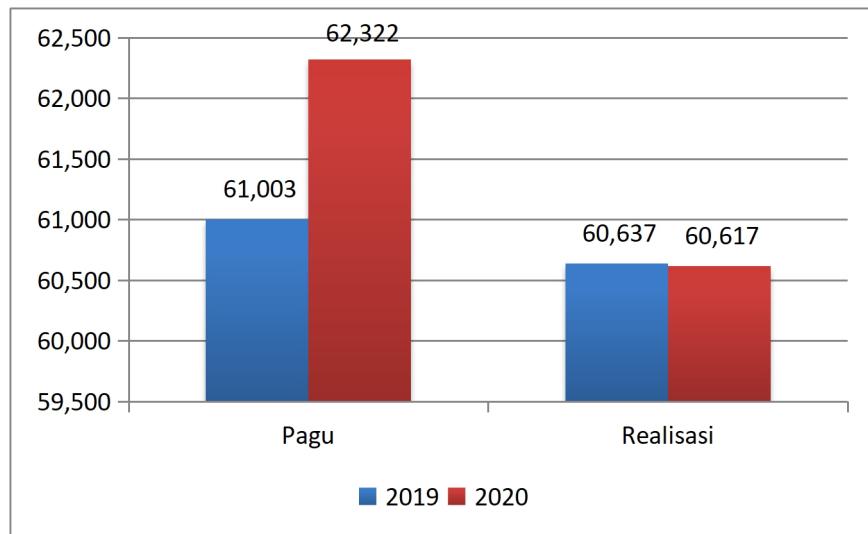
1.5. Keuangan

Anggaran awal Setditjen PPKL pada DIPA APBN Tahun 2020 sebesar Rp. 65.903.558.000,- (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan direvisi menjadi Rp. 62.322.124.000,- (enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Revisi anggaran dilakukan untuk *refocusing* anggaran mendukung penanganan pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia mulai awal Triwulan II. Rincian anggaran tiap bagian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2020

No.	Bagian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
1	Program dan Evaluasi	8.003.502.000	8.449.071.000
2	Keuangan dan Umum	50.424.868.000	51.541.088.000
3	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	4.061.873.000	948.777.000
4	Hukum dan Kerja Sama Teknik	3.413.315.000	1.383.188.000
Total		65.903.558.000	62.322.124.000

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020



Gambar 4. Pagu Anggaran & Realisasi Setditjen PPKL Tahun 2019-2020

(Nilai x Rp. 1.000.000.000,-)

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Renstra Setditjen PPKL tahun 2020-2024 menampilkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Renstra Setditjen PPKL tahun 2020-2024 disusun berdasarkan: 1) kewenangan Setditjen PPKL sebagai koordinator pelaksana tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL; 2) kepastian pembiayaan dari APBN; 3) tersedianya sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya SDM yang memadai; 4) peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan 5) semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Penjabaran kerangka pikir Renstra Setditjen PPKL tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penjabaran Muatan Intensi Kementerian dalam Intensi Strategis Ditjen PPKL

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 –2024	
1.	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2.	Membangun Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan untuk Pengambilan Keputusan dan Edukasi Masyarakat
3.	Sinergi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Sasaran Program	
1.	Meningkatnya indeks kualitas udara;
2.	Meningkatnya indeks kualitas air;
3.	Meningkatnya indeks kualitas air laut;
4.	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut;
5.	Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan;
6.	Meningkatnya Indeks ekosistem gambut
7.	Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL.
Sasaran Kegiatan	
1.	Tersedianya Data Kualitas Udara (AQMS dan Passive Sampler);
2.	Tersedianya Data Kualitas Air (Onlimo dan Pemantauan Manual);
3.	Terbangunnya Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah;
4.	Tersedianya Data Kualitas Air Laut;
5.	Terlaksananya Penanggulangan dan Pemulihian Ekosistem Laut;
6.	Tersedianya Data Kualitas Tutupan Lahan;
7.	Luasnya Pemulihan Lahan Akses Terbuka dan Ekosistem Gambut;
8.	Pemantauan Kinerja Industri;
9.	Meningkatnya Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen PPKL melalui nilai SAKIP, level Maturitas SPIP dan Laporan Keuangan.
Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen PPKL melalui nilai SAKIP, level Maturitas SPIP dan Laporan Keuangan	
Sasaran Unit Kegiatan	
1.	Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2.	Efektifitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
3.	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
4.	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri
5.	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dan penyipahan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sumber : Renstra Tahun 2020-2024 Ditjen PPKL

2.2. Rencana Kerja Tahun 2020

Setditjen PPKL memiliki sasaran mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 adalah nilai SAKIP 79 poin. Setditjen PPKL memiliki 5 (lima) sasaran unit kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator unit kegiatan yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Sasaran Unit Kegiatan di Setditjen PPKL Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Unit Kegiatan	Target
1	Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL) Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II) Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	4 dokumen 6 laporan 24 publikasi 100% level 3 1 dokumen
2	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, tingkat UAKPA, rekonsiliasi tingkat UAKPA) Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi keuangan dan umum Terselenggaranya layanan umum dan keruahmatanggaan Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/ketatausahaan Terlaksananya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	18 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 39 laporan
3	Efektivitas Layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL Terselenggaranya Diklat PEDAL Tersedianya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL Tersusunnya kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL Terselenggaranya Pelaksanaan Perbaikan Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Ailih Tugas JFU ke JFT	15 layanan 1 laporan 1 dokumen 1 laporan 2 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 dokumen
4	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundag-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi Analisis dan evaaluasi peraturan perundang-undangan Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	67 dokumen 60 dokumen 7 dokumen 23 dokumen 1 laporan
5	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Sekretariat PROPER	2045 industri

Sumber : Renja Setditjen PPKL Tahun 2020

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (lampiran 1). Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Setditjen PPPL mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen PK tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Setditjen PPPL Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPPL	SAKIP Ditjen PPPL dengan nilai minimal 79,00 (A) di tahun 2020	79
	Level Maturitas SPIP	Level 3
	Laporan Keuangan Ditjen PPPL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	4 kali pertemuan

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Untuk meningkatkan kinerja di lingkup Setditjen PPPL maka pada tahun 2020 Perjanjian Kinerja disusun sampai level eselon III dan IV. Hal ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja para pejabat setiap triwulan. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV dapat dilihat pada Tabel 6 – Tabel 18 berikut ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Program dan Evaluasi Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	Dokumen	4	
	2. Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II)	Laporan	6	
	3. Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	Publikasi	18	
	4. Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	
	5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3	
	6. Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	Dokumen	1	

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Keuangan dan Umum Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya laporan Keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi tingkat UAKPA)	Laporan	18	
	2. Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	Laporan	1	
	3. Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi keuangan dan umum	Laporan	1	
	4. Terselenggaranya layanan umum dan keruhtangan	Laporan	1	
	5. Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/Ketatausahaan	Laporan	1	
	6. Terlaksananya pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja	Dokumen	39	

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas Layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	1. Terselenggaranya Layanan Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL Administrasi	Layanan	15
		2. Terselenggaranya Diklat PEDAL	Laporan	1
		3. Tersedianya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Dokumen	1
		4. Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	Laporan	1
		5. Tersusunnya kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	Dokumen	2
		6. Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	Laporan	1
		7. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	Laporan	1
		8. Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	Laporan	1
		9. Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	Dokumen	1
		10. Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	Dokumen	1
		11. Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	Dokumen	1
		12. Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	Dokumen	2

Sumber : Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,2020

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	1. Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dokumen	67
		2. Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	Dokumen	60
		3. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	4
		4. Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	Dokumen	20
		5. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Laporan	1
2.	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	6. Terselenggaranya Sekretariat PROPER	Industri	2036

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kasubbag Program dan Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya dokumen rencana strategis	Renstra	1
		2. Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja)	Renja	1
		3. Tersedianya dokumen penetapan kinerja Eselon I, II, III dan IV	PK	1
		4. Tersedianya dokumen RKAKL	RKAKL	1
		5. Terlaksananya revisi anggaran, program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Laporan	4
		6. Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Laporan	4

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kasubbag Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas perencanaan evaluasi, data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya dokumen pelaporan Monev Triwulan Capaian Kinerja	Laporan	4
		2. Tersedianya dokumen pelaporan LKj Eselon I dan II	Laporan	2

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Tersedianya Desain Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Lingkup Setditjen PPKL	Dokumen	1
		4. Tersedianya dokumen pelaporan monev triwulan dan tahunan penyelenggaraan SPIP Lingkup Setditjen PPKL	Laporan	5
		5. Tersedianya bahan layanan kehumasan	Publikasi	18
		6. Tersedianya bahan layanan data dan informasi	Dokumen	1

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Tabel 12. Perjanjian Kinerja Kasubbag Administrasi Keuangan Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas pelayanan administrasi keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Laporan Keuangan semester I, Pseudo, Tahunan tingkat Eselon I dan UAKPA	Dokumen	6
		2. Tersedianya Rekonsiliasi UAKPA	Dokumen	12
		3. Terselenggaranya optimalisasi pengelolaan anggaran	Laporan	1
		4. Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	Laporan	1
		5. Terlaksananya pembayaran pengelola administrasi keuangan	Dokumen	12
		6. Terselenggaranya penyegaran bendahara	Laporan	1
		7. Tersedianya dokumen pencairan anggaran	Dokumen	100%
		8. Terlaksananya pembayaran gaji PPNPN	Dokumen	13
		9. Terlaksananya pembayaran gaji, kekurangan gaji dan uang makan	Dokumen	26
		10. Terlaksananya pembayaran tunjangan kinerja	Dokumen	13

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Tabel 13. Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas pelayanan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Terlaksananya kegiatan Eco Office	Laporan	1
		2. Terlaksananya Pembinaan Ketatausahaan	Kegiatan	1
		3. Terlaksananya layanan Persuratan dan Kearsipan	Laporan	1
		4. Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik	Laporan	1
		5. Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan	Laporan	1
		6. Tersedianya layanan penggunaan ruang rapat, jamauan konsumsi bersama fasilitas yang diperlukan	Laporan	1
		7. Terlaksananya kegiatan pimpinan	Laporan	1
		8. Terlaksananya kegiatan pencegahan Covid-19	Laporan	1

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Kasubbag Perlengkapan Tahun 2020

No	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas Pelayanan Perlengkapan	1. Tersedianya Laporan Penatausahaan BMN	Laporan	3
		2. Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Persediaan	Laporan	2
		3. Terlaksananya pembinaan BMN dan layanan umum berupa keamanan dan kebersihan	Laporan	1
		4. Tersedianya dukungan operasional berupa penyediaan dan perawatan kendaraan dinas, dan renovasi ruang	Laporan	4

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Tabel 15. Perjanjian Kinerja Kasubbag Administrasi Kepegawaian Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Efektifitas Layanan Kepegawaian	1. Terselesaikannya Layanan Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL	Layanan	15
		2. Terselenggaranya Diklat Pedal	Dokumen	1

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
				(1)
		3. Penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	PAK	10
		4. Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	Laporan	1
		5. Tersusunnya Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	Dokumen	2
		6. Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	Laporan	1
		7. Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	Laporan	1

Sumber : Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2020

Tabel 16. Perjanjian Kinerja Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
				(1)
1.	Efektifitas Layanan Penataan Organisasi Tata Laksana	1. Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	Dokumen	1
		2. Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	Dokumen	1
		3. Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	Dokumen	1
		4. Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	Dokumen	1
		5. Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	Dokumen	2

Sumber : Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2020

Tabel 17. Perjanjian Kinerja Kasubbag Hukum Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
				(1)
1.	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dokumen	67
		2. Fasilitasi Layanan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi	Dokumen	60
		3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Tabel 18. Perjanjian Kinerja Kasubbag Kerja Sama Teknik Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan
				(1)
1.	Efektifitas fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	1. Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	Dokumen	20
		2. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Laporan	1
2	Efektifitas Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	3. Terselenggaranya sekretariat PROPER	Industri	2036

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metode Pengukuran

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target kinerja untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

3.1.2. Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya.

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3.1.3. Efektifitas dan Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Ini} (\%)}{\text{Capaian Kinerja Tahun Lalu} (\%)}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja} (\%)}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran} (\%)}$$

3.2. Capaian Kinerja Setditjen PPKL

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL mempunyai sasaran terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Kegiatan ini memiliki indikator pencapaian nilai SAKIP sebesar 79-83 poin dari tahun 2020-2024. Capaian nilai SAKIP Ditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 6. Pada Tabel 19 dapat dilihat realisasi target indikator sasaran terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL tahun 2019 sebesar 78,02 dengan kategori BB (>70-80). Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 78 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,02% dan 94,00% bila dibandingkan dengan target tahun 2024. Secara lengkap capaian Ditjen PPKL Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 19.

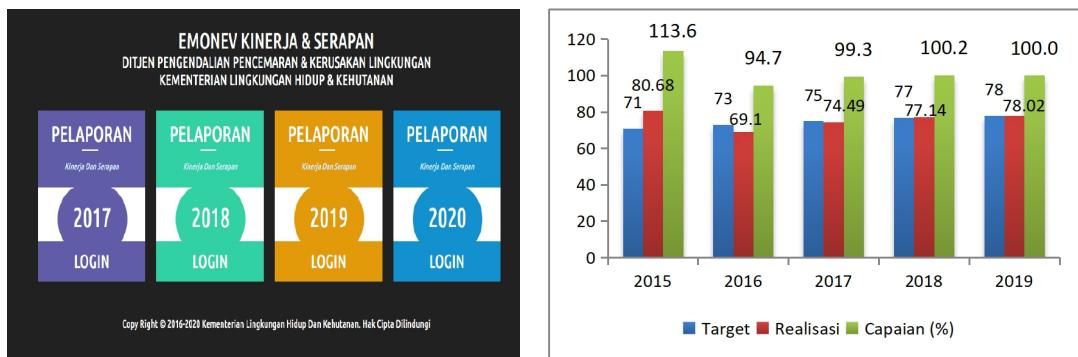
Tabel 19. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Renstra KLHK 2020	Target Renstra PPKL 2020	Target Renstra Setditjen PPKL 2020	Target Renja PPKL 2020	Target Renja Setditjen PPKL 2020	Target 2024	Target PK 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020 (%)	Capaian Renstra 2024 (%)
Sasaran : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL											
SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 79,00 (A) di tahun 2020	77,00	79,00	79,00	79,00	79,00	83	79,00	78,02	Belum dievaluasi	-	94,00
Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	4	3	3,134	3,358	111,93	78,35
Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang tertib dan akuntabel	-	1	1	1	-	1	1	1	1	100	100
Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100	-
Sasaran : Terlaksananya pembinaan staf											
Pembinaan Staf	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	100

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Untuk meningkatkan penyelenggaraan SAKIP tahun 2020 telah dilakukan beberapa perbaikan dengan menetapkan Perdirjen Nomor P.4/PPKL/SET/REN.0/2/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Lingkup Ditjen PPKL. Peraturan ini mewajibkan semua unit eselon II untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK dan Rencana aksi) dan dokumen pelaporan (pelaporan bulanan, triwulanan, tahunan) disertai dengan format yang telah disepakati. Selain itu telah disusun Perdirjen PPKL Nomor P.5/PPKL/SET/PEG.7/7/2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi pada Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal PPKL, untuk memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing individu dalam melaksanakan kegiatan. Pada tahun 2020 aplikasi E-Monev Ditjen PPKL dikembangkan untuk memantau kinerja individu berdasarkan target yang ditetapkan untuk individu. Hasil evaluasi individu menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi (Gambar 5). Namun

dalam memanfaatkan aplikasi yang baru ini masih memerlukan waktu dalam penerapannya. Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP tahun 2019 secara rinci terdapat pada Tabel 20 berikut ini.



Gambar 5. Tampilan EMONEV PPKL 2020
(Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020)

Gambar 6. Evaluasi SAKIP Tahun 2015-2019
(Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020)

Tabel 20. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015-2019

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	23,68	22,52	25,26	24,92	24,64
2	Pengukuran Kinerja	25	22,66	19,14	19,02	16,51	18,03
3	Pelaporan Kinerja	15	12,84	13,10	12,79	12,36	11,92
4	Evaluasi Kinerja	10	10,00	9,25	8,80	7,67	8,18
5	Pencapaian Kinerja/Sasaran Organisasi	20	11,50	5,00	8,67	15,68	15,26
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,68	69,01	74,49	77,14	78,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)	B (Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Sumber : Hasil Evaluasi Itjen, KLHK, 2019

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP Ditjen PPKL tahun 2019, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan yang belum selaras antara indikator dan target Eselon I, II, III dan IV serta belum melakukan reviu secara berkala yang terdokumentasi dengan baik;
 - b. Penyusunan rencana aksi belum menetapkan target secara periodik dan monitoring pelaksanaan kegiatannya belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment;
2. Pengukuran Kinerja :
 - a. Belum ada indikator kinerja individu;
 - b. Belum menerapkan Perdirjen PPKL Nomor P.5/PPKL/SET/PEG.7/7/2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi pada Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal PPKL
3. Pelaporan Kinerja :
 - a. LKj belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan peningkatan kinerja;
 - b. Belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

4. Evaluasi Kinerja : hasil evaluasi kinerja hendaknya memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi :
 - a. Terdapat target Direktorat PKLAT tidak dapat dicapai 100% untuk kegiatan pemulihan lahan akses terbuka
 - b. Belum menyajikan analisa capaian *outcome*.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL tahun 2019 juga salah satu faktor pedukung agar manajemen kinerja yang baik dapat terlaksana. Hasil *review* maturitas SPIP Tahun 2019 lingkup Ditjen PPKL telah mencapai 3,134 poin atau masuk kategori terdefinisi yang berarti telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Asesor Inspektorat Jenderal KLHK, mencapai 3,358. Ada sebanyak 7 fokus penilaian yang dianggap sudah konsisten pelaksanaan evaluasinya dari 25 fokus penilaian dalam maturitas SPIP, yaitu (1) Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan; (2) Perwujudan Peran APIP yang Efektif; (3) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait; (4) Identifikasi Resiko; (5) analisis Resiko; (6) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan (7) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting. Hasil verifikasi Tim Inspektorat tersebut akan diverifikasi kembali oleh Tim BPKP, sehingga hasil penilaian tersebut masih sementara. Untuk penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PPKL, semua unit eselon II telah membentuk Satgas SPIP dan menyusun Desain SPIP serta melakukan kegiatan monev dan pelaporan melalui aplikasi simawas.itjen.menlhk.go.id. Untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP menuju level 4 pada tahun 2024, maka tahun 2021 direncanakan akan melakukan evaluasi maturitas SPIP secara mandiri pada setiap direktorat sehingga penerapan penyelenggaraan SPIP semakin diintegrasikan menjadi standar kinerja pegawai di lingkup Ditjen PPKL.

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL tahun 2020, memperoleh hasil sebesar 31,01 dengan rincian, aspek penuhan sebesar 13,12 poin dan aspek reform sebesar 17,89 poin. Hasil evaluasi ini akan diverifikasi oleh KemenPANRB sehingga hasil penilaian tersebut masih sementara.

Capaian Indikator Kinerja Unit kegiatan lingkup Setditjen PPKL pada tahun 2020 secara kumulatif sebesar 105,7%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL diuraikan berikut ini.

3.2.1. Bagian Program dan Evaluasi

Bagian Program dan Evaluasi memiliki 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) indikator unit kegiatan. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2020, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 110,32%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Program dan Evaluasi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 21 – Tabel 23. Capaian penyerapan anggaran Bagian Program dan Evaluasi mencapai 98,9%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,13 dan 1,02, yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 21. Capaian Kinerja Kabag Program & Evaluasi Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	Dokumen	4	4	4	100%
	2. Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II)	Laporan	6	6	6	100%
	3. Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	Publikasi	18	34	34	150%
	4. Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100	100%
	5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,358	3,358	111,93%
	6. Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	Dokumen	1	1	1	100%
Rata-rata						110,32

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Tabel 22. Capaian Kinerja Kasubbag Program & Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya dokumen rencana strategis	Renstra	2	2	2	100%
	2. Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja)	Renja	2	2	2	100%
	3. Tersedianya dokumen penetapan kinerja Eselon I, II, III dan IV	PK	1	1	1	100%
	4. Tersedianya dokumen RKAKL	RKAKL	1	1	1	100%
	5. Terlaksananya revisi anggaran, program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Laporan	1	1	1	100%
	6. Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Laporan	1	1	1	100%
Rata-rata						100%

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Tabel 23. Capaian Kinerja Kasubbag Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Efektifitas perencanaan evaluasi, data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya dokumen pelaporan Monev Triwulan Capaian Kinerja	Laporan	4	4	4	100%
	2. Tersedianya dokumen pelaporan LKj Eselon I dan II	Laporan	2	2	2	100%
	3. Tersedianya Desain Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Lingkup Setditjen PPKL	Dokumen	1	1	1	100%
	4. Tersedianya dokumen pelaporan monev triwulan dan tahunan penyelenggaraan SPIP Lingkup Setditjen PPKL	Laporan	5	5	5	100%
	5. Tersedianya bahan layanan kehumasan	Publikasi	18	34	34	150%
	6. Tersedianya bahan layanan data dan informasi	Dokumen	1	1	1	100%
Rata-rata						108,3%

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Penjelasan pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan *output* dokumen yang dihasilkan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, PK dan RKA-KL)

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PPKL merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kemudian arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan beserta masing-masing indikator kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PPKL. Dokumen Renstra tersebut ditetapkan dengan Perdirjen PPKL Nomor: P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024. Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada PermenLHK P.16/MenLHK/Setjen/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024 dan berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun-tahun sebelumnya.

Penjabaran pelaksanaan Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024 tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan disusun pada awal tahun 2020. Penyusunan Renja Ditjen PPKL mengacu pada prioritas pembangunan nasional, RKP KLHK tahun 2020, Renstra Ditjen PPKL tahun 2020-2024 dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan program pada kegiatan pembangunan lingkungan hidup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dokumen Renja Ditjen PPKL Tahun 2020 telah dilakukan revisi pada bulan Mei 2020 dikarenakan adanya penghematan anggaran untuk pandemi Covid 19.

Untuk melaksanakan program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renja, disusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Ditjen PPKL mulai dari Eselon I, II, III dan IV. Pada bulan Mei 2020, dokumen PK tersebut juga mengalami revisi sesuai dengan revisi Renja 2020 untuk refocusing anggaran.

Penyusunan dokumen RKA-KL Ditjen PPKL Tahun 2021 berdasarkan hasil rapat Paripurna Komisi IV DPR RI tanggal 12 September 2019 dan Komisi IV DPR RI tanggal 29 September 2020 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021 dan Surat Menteri LHK S.689/MenLHK/Setjen/Set.1/10/2020 tentang Pagu Alokasi KLHK TA 2021. Pagu Alokasi Ditjen PPKL tahun 2021 sebesar Rp. 249.465.285.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sesuai arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program sehingga lebih terintegrasi maka dilakukan restrukturisasi program yang berlaku secara efektif di Tahun 2021. Tahapan kegiatan penyusunan RKAKL Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Tahapan Penerbitan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2021

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pembahasan awal Redesain Sistem Penganggaran LHK	11 Maret 2020
2	Keputusan Bersama Bappenas dan Kemenkeu tentang penyederhanaan Program dan Anggaran berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	8 Mei 2020
3	Pembahasan Redesain 6 Program KLHK dengan Biro Perencanaan KLHK	18 Mei 2020
4	Pembahasan Pagu Indikatif (<i>Trilateral Meeting I</i>)	2 Juni 20
5	Reviu APIP RKAKL Pagu Indikatif 2021	6 – 8 Juli 2020
6	Penelaahan RKAKL 2021 <i>online</i> oleh Bappenas, Ditjen PPKL, DJA	13 – 28 Juli 2020
7	Pembahasan Pagu Indikatif (<i>Trilateral Meeting I</i>) Pagu Anggaran	21 Juli 2020

No	Kegiatan	Tanggal
8	Penyusunan TOR, RAB, RKAKL TA 2021 oleh Direktorat lingkup Ditjen PPKL	23-24 Juli 2020
9	Reviu APIP RKAKL 2021 Pagu Indikatif oleh Itjen	27-28 Juli 2020
10	Pembahasan RKAKL 2021 Komisi IV DPR RI	31 Agustus 2020
11	Pembahasan RKAKL dengan Komisi IV DPR RI	23 September 2020
12	Memorandum MenLHK Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PPKL TA 2021	6 Oktober 2020
13	Penelitian RKAKL Pagu Definitif Anggaran TA 2021 oleh APIP	7- Oktober 2020
14	Penelitian RKAKL Pagu Definitif Anggaran TA 2021 oleh Biro Perencanaan KLHK	9 Oktober 2020
15	Penelaahan <i>Online</i> Pagu Alokasi RKAKL melalui Aplikasi SAKTI	6 - 30 Oktober 2020
16	Penerbitan DIPA Ditjen PPKL KLHK	30 November 2020

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Pengembangan program diawali dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) lingkup Ditjen PPKL (Gambar 7). Tema pada Rakernis ini adalah “Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas Lingkungan”. Rakernis ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 dan penyampaian arah kebijakan Ditjen PPKL 2020-2024 serta kesepakatan kegiatan dalam mencapai kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Sebanyak sekitar 15 topik yang dibahas dalam Rakernis ini. Tujuan Rakernis ini adalah tercapainya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Rapat teknis ini dihadiri sekitar 284 orang yang berasal dari 32 Provinsi, 87 Kabupaten/Kota. Berikut ini resume hasil pelaksanaan Rakernis Ditjen PPKL Tahun 2020:

- Kesepakatan target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Tahun 2020-2024.
- Intervensi yang diperlukan untuk mencapai indeks tersebut:
 - Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) : (1) Penyusunan kebijakan daerah terkait PPU; (2) Penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka implementasi PPU; (3) Penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan; (4) Penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) serta optimalisasi penghijauan; (4) Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam pengelolaan kualitas udara; (5) Pengawasan dan pembinaan izin lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - Pengendalian Pencemaran Air (PPA): (1) Perlu dilakukan penyempurnaan juknis pemantauan kualitas air untuk pemantauan kualitas air secara manual; (2) KLHK telah menyiapkan lokasi indikatif ONLIMO 2021-2024, namun masih perlu diverifikasi; (3) Provinsi dan kabupaten/kota akan mengusulkan lokasi yang memenuhi kriteria, selambat-lambatnya pada 11 April 2020; (4) Diperlukan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta melibatkan semua stakeholder dalam pengembangan Program PROKASIH; (5) Penilaian pelaksanaan Program PROKASIH akan dilakukan untuk semua kabupaten/kota mulai tahun 2020.
 - Pengendalian Pencemaran Air Laut: (1) Pemasangan jaring sampah; (2) *Coastal clean up* (CCU); (3) Pemantauan sampah di laut; (4) Pemantauan kualitas air laut; (5) Peningkatan kapasitas.
 - Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka: (1) Pendampingan dalam Penyusunan Rencana Peningkatan Tutupan Lahan; (2) Pemulihan Lahan Akses Terbuka Tahun 2020 (5 Lokasi); (3) Penyusunan dan pengesahan RTRW; (4) Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL); (5) Memastikan target IKTL tercantum dalam RPJMD; (6) Melakukan koordinasi antara para pemangku kepentingan tingkat provinsi;

(7) Penguatan koordinasi dan fasilitasi pencapaian target kabupaten/kota; (8) Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL); (9) Melakukan inventarisasi lapangan terhadap potensi peningkatan tutupan lahan; (10) Melakukan penambahan tutupan vegetasi melalui: penambahan ruang terbuka hijau, pemulihan lahan bekas tambang, pembangunan ekoriparian, dan penanaman vertiver.

- Pengendalian Kerusakan Gambut: (1) Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut merupakan solusi pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di tingkat tapak; (2) Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut diperlukan dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) KLHK. Usulan kegiatan yang akan didanai melalui DAK antara lain: pembangunan sekat kanal, revegetasi, peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan pengembangan komoditas di lahan gambut, setelah pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), terbentuk Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) yang ditetapkan oleh kepala desa atau yang sejenis, dan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

c. Usulan pendanaan:

- Dana Dekonsentrasi: (1) Pemantauan kualitas tutupan lahan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Kab/Kota dalam pengelolaan tutupan lahan; (2) Pemantauan kualitas air sungai, air laut dan sampah laut di 34 provinsi.
- Dana alokasi khusus (DAK): (1) Pengadaan alat pemantauan kualitas udara kontinyu (AQMS) dan *portable analyser* tetap dipertahankan, dan untuk DAK tahun 2021 diusulkan untuk pengadaan alat uji emisi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan diesel; (2) Pembangunan sekat kanal, revegetasi, peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan pengembangan komoditas di lahan gambut; (3) Instalasi pengolahan air limbah dari industri kecil; (4) Pembangunan ekoriparian; (5) Pemasangan jaring sampah dan sabuk hijau (*green belt*) di muara sungai; (6) Pemulihan di lahan bekas tambang, bencana alam dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).



Gambar 7. Rakernis Ditjen PPKL, 8-12 Maret 2020

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

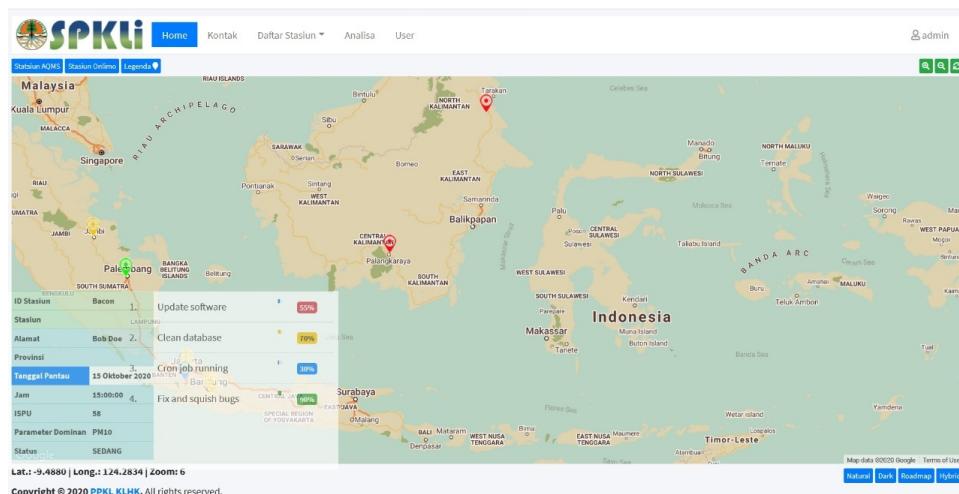
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PermenLHK nomor P.31 Tahun 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK, Ditjen PPKL berupaya melaksanakan PUG dengan melakukan :

- a) Pembentukan Tim PU lingkup Ditjen PPKL melalui surat Keputusan Ditjen PPKL Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Sub Pokja PUG Ditjen PPKL;
- b) Pelaksanaan Kegiatan Bebersih Pantai (*Costal Clean Up*) yang Responsif Gender dengan melakukan aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan massa yang beragam dengan tidak membedakan jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, agama dan status lainnya;
- c) Pembangunan sarana dan prasarana Responsif gender yang meliputi Mushola, Tempat Wudhu, lahan parkir disabilitas dan perempuan, Ruang Laktasi, Kursi Roda, Kantin (*No Smoking, Smoking Area dan No Plastic Use*), Toilet;
- d) Data terpilah Sumber Daya Manusia (PNS) lingkup Ditjen. PPKL berdasarkan Jenis Kelamin (L/P), jenjang pendidikan dan Eselonisasi, pembuatan daftar hadir dengan menggunakan data terpilah;
- e) Sosialisasi PUG bagi Staff Ditjen PPKL yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PUG untuk pelaksanaan kegiatan yang *responsive* gender;
- f) Mengikuti Lomba PUG antar Eselon I lingkup KLHK yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan implementasi PUG di masing-masing Eselon I dan meningkatkan semangat, kepercayaan diri, dan komitmen dalam menjalankan PUG di lingkup Eselon I;
- g) Kegiatan Inovatif dan Responsif Gender yang dilaksanakan melalui webinar dengan diskusi Pengetahuan dan Informasi ke masyarakat terkait peranan kaum milenial, perempuan, dan masyarakat dalam menjaga, mencintai dan melestarikan lingkungan dan sosialisasi tentang Covid 19;
- h) Melaksanakan Kegiatan Inovasi di Bidang PUG dengan telah dibangun WC Pertama di Pulau Padar, TN. P. Komodo, NTT. WC ini dilengkapi dengan alat pengubah air laut menjadi tawar dengan prinsip *Reverse Osmosis* (RO). Sarana prasaran ini membantu wisatawan yang berkunjung ke P. Padar untuk mendapatkan sanitasi terbaik dan mudah diakses.

3. Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan

Sesditjen sesuai tusi dan kewenangannya sebagai koordinasi, sinkronisasi seluruh kegiatan lingkup Ditjen PPKL membuat sistem pemantauan kualitas lingkungan berdasarkan alat pantau monitoring otomatis secara *real time* secara terpadu. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah pengumpulan data dan publikasi kepada masyarakat terkait informasi kualitas lingkungan secara terpadu. Data yang ditampilkan pada aplikasi ini adalah data AQMS dan ONLIMO.

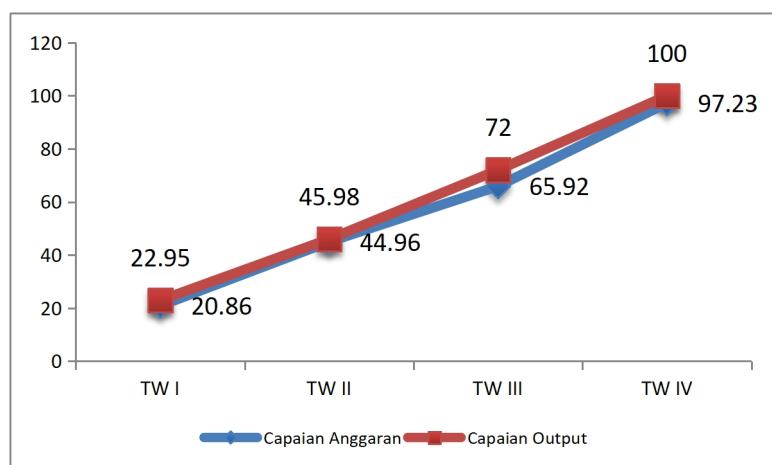


Gambar 8. Halaman Utama Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan

4. Evaluasi dan Pelaporan

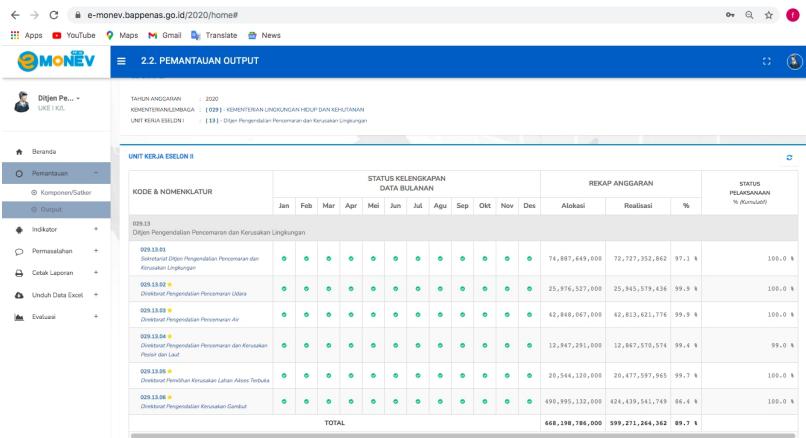
a. Penyusunan Dokumen Pelaporan (Laporan Monev Triwulan dan LKj)

Dokumen pelaporan pada Ditjen PPKL tahun 2020 merefleksikan pelaksanakan kegiatan yang telah berjalan dalam mencapai target/sasaran program kegiatan. Dokumen pelaporan ditetapkan target sebanyak 6 dokumen laporan yang terdiri dari: : LKj Ditjen PPKL Tahun 2019, LKj Setditjen PPKL Tahun 2019, dan Laporan Kegiatan Triwulan I-IV Tahun 2020. Selain itu, terdapat pemantauan pelaksanaan kegiatan pada setiap unit kerja lingkup Ditjen PPKL. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan matriks laporan bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II. Capaian penyerapan anggaran dan *output* Ditjen PPKL per Triwulan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 9.



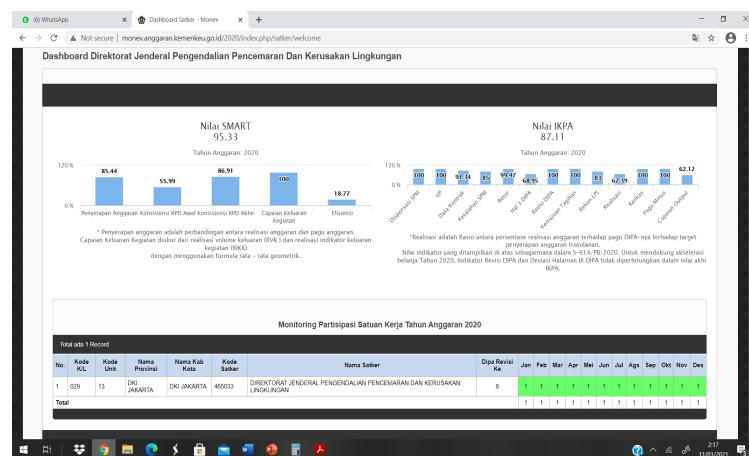
Gambar 9. Capaian *Output* dan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2020
(Sumber : Laporan Bulanan, 2020)

Monitoring dan evaluasi kinerja secara elektronik juga dilakukan melalui aplikasi E-Monev Bappenas 2020 Generasi III versi 3.0. Terdapat 4 (empat) level pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan pada aplikasi e-monev Bappenas, yaitu level satker/komponen, level output, level IOK dan level IKK. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, status kelengkapan data pada 4 (empat) level pemantauan tersebut sudah terisi lengkap untuk semua Satker lingkup Ditjen PPKL, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini.



Gambar 10. Status Kelengkapan Data Bulanan pada Aplikasi E-Monev Bappenas
(Sumber : E-Monev Bappenas 2020)

Selain pemantauan kinerja anggaran dan kegiatan juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (E-Monev SMART DJA). E-Monev DJA bertujuan untuk melakukan monitoring partisipasi kinerja satuan kerja Ditjen PPKL. Informasi yang dilaporkan dalam bentuk realisasi output (volume) dan progres bulanan berjalan (%) serta keterangan pendukung output. Adapun data realisasi anggaran setiap output secara otomatis dihitung oleh sistem. Periode evaluasi E-Monev DJA dilaksanakan bulanan dan semesteran. Hasil monitoring pengisian E-Monev SMART DJA Tahun 2020 untuk lingkup Ditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini.



Gambar 11. Capaian Kinerja Eselon 1 dan Monitoring Nilai Kinerja Satker Ditjen PPKL pada Aplikasi E-Monev SMART DJA TA 2020
(Sumber : E-Monev SMART DJA 2020)

Kegiatan Ditjen PPKL yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) adalah Pemulihan Ekosistem Gambut dan Pengendalian Pencemaran Air. Pemantauan KSP dilaksanakan setiap triwulan. Pada tahun 2020, pemantauan KSP untuk pemulihan ekosistem gambut dan pengendalian pencemaran air dilaksanakan pada Triwulan I-IV (B03 - B12), dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Rekapitulasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran air di DAS Citarum Tahun 2020

KEGIATAN PRIORITY PANTAUAN KSP TAHUN 2020 SEKTOR LHK								
NO.	KEGIATAN PRIORITY	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B05, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
Darah Aliran Sungai								
1	Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Kementerian LHK Direktorat Jenderal PPKL Penanggung Jawab: Nama: Ludmy Purwadhi, ST, M.Si Jabatan: Direktur Pengendalian Pencemaran Air Email: ludmy@gmail.com HP: 08316617145	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, PDAM serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR	Target 2020: Jumlah stasiun pemantauan kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu 14 unit 1.Sungai Citarum Kabupaten Bandung 2.Sungai Citarum Sekotong Jeruk Kabupaten Bandung 3.Sungai Citarum Nanggung Kabupaten Bandung 4.Sungai Citarum Ketapang Kabupaten Bandung 5.Sungai Citarum Pamungkuk Kabupaten Bandung 6.Sungai Citarum Codong Kota Bandung 7.Sungai Citarum Parungpung Kota Bandung 8.Sungai Janeberang Somba Opu Kabupaten Gowa 9.Sungai Janeberang Barrumbong Kabupaten Gowa 10.Sungai Cisadane Cisauk Kota Tangerang Selatan 11.Sungai Cisadane Cimone Kota Tangerang Selatan 12.Sungai Limboto Kabupaten Bera Bolango 13.Sungai Limboto Sukiwa Timur Kabupaten Bone Bolango 14.Sungai Sekampung Teluk Beung Barat Kabupaten Lampung Selatan	Sistem pemantauan kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	TARGET B04 1. Proses Lelang 2. Perencanaan dan persiapan pembangunan Onlimo di 14 lokasi	B04 100%	Data Dukung: Dokumen lelang (Kerangka Acuan dan RPS)
					TARGET B05 1. Pelaksanaan Survey Lapangan dan Koordinasi serta memastikan kebutuhan peralatan penunjang untuk pembangunan Onlimo di 14 lokasi	B05 100%	Data Dukung: Laporan pendahuluan	
					TARGET B09 1. Perbaikan Bangunan Pembangunan di 14 lokasi 2. Pengriman alat seperti sensor, logger, pompa dan alat penunjang lainnya ke 14 lokasi	B09 100%	Data Dukung: Laporan perantara pelaksanaan pembangunan Online	
					TARGET B12: 1. Melaksanakan Onlimo di 14 lokasi dan terkonsolidasi dengan system data center di KLHK 2. Pelaksanaan komisioning di 14 lokasi -14 lokasi Online terbangun dan data telah terkirim secara kontinyu ke data center KLHK	B12 100%	Data Dukung: Laporan akhir pelaksanaan pembangunan dan Status mutu data kualitas air di 14 lokasi	

KEGIATAN PRIORITY PANTAUAN KSP TAHUN 2020 SEKTOR LHK								
NO.	KEGIATAN PRIORITY	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B05, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
Darah Aliran Sungai								
2	Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Kementerian LHK Direktorat Jenderal PPKL Penanggung Jawab: Nama: Ludmy Purwadhi, ST, M.Si Jabatan: Direktur Pengendalian Pencemaran Air Email: ludmy@gmail.com HP: 08316617145	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota	Target 2020: Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum 1 unit (PAL) dan 6 biogeste serta fasilitas pendukung (rumah pupuk dan rumah cacing)	Penurunan beban pencemaran lingkungan di DAS Citarum	TARGET B04 1. Survey 2. Revisi DED	B04 100%	Data Dukung: DED pembangunan (PAL dan biogeste) di DAS Citarum
					TARGET B06 Penyelesaian Dokumen Lelang	B06 100%	Data Dukung: Dokumen lelang (Kerangka Acuan dan RPS)	
					TARGET B09 1. Proses lelang 2. Penetapan pemenang 3. Proses Pembangunan dan pengawasan	B09 100%	Data Dukung: 1. Dokumen kontrak 2. Laporan pendahuluan	
					TARGET B12: 1. Proses Pembangunan dan Pengawasan 2. Uji fungsi	B12 100%	Data Dukung: 1. Laporan Kenajuan Pekerjaan 2. Laporan Akhir Pekerjaan 3. Berita Acara serah terima pengerjaan	

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020

Tabel 26. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2020

KEGIATAN PRIORITY PANTAUAN KSP TAHUN 2020 SEKTOR LHK								
NO.	KEGIATAN PRIORITY	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B05, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
4 Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dan degradasi								
4	Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dan degradasi	Kementerian LHK Direktorat Jenderal PPKL Penanggung Jawab: Nama: I SPM Budusanti, MSc Jabatan: Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Email: dgambut.lh@gmail.com HP: 08176642351	LPPM Universitas Sumatera Utara, DLH Kabupaten Asahan, DLH Kabupaten Lebuhnabatu Utara	Target 2020: Luas lahan gambut yang dilakukan intervensi dan kasi sebagi usaha pemulihannya kembali erosi gambut seluas 200 Ha	Terbaiknya lahan gambut masyarakat dan mengurangi risiko kebakaran lahan gambut	TARGET B04: Persepan dan Koordinasi	B04 100%	Data Dukung: Laporan kegiatan
					TARGET B08 Perencanaan kegiatan	B08 100%	Data Dukung: Laporan kegiatan	
					TARGET B09 Perjalanan Program Kemandirian Masyarakat di Kab. Asahan dan Kab. Lebuhnabatu Utara	B09 100%	Data Dukung: Laporan pelaksanaan Program Perjalanan Kemandirian Masyarakat Kab. Asahan dan Kab. Lebuhnabatu Utara	
					Catatan: - Kelembaban perangkat kontrol dengan Universitas. Isrena Acara sendiri tidak di Ingjungan Universitas, sehingga kontrol baru terdapat pada tanggal 21 September 2020 - Pembangunan selat kanal tertunda, karena kegiatan ini berhubungan dengan kontrak universitas - Proses pembangunan selat kanal baru belum survey calon lokasi selat kanal.			
					TARGET B12: Pemulihian lahan gambut 200 Ha	B12 100%	Data Dukung: Laporan aktivitas pembangunan infrastuktur pembaharuan selat kanal di Kab. Asahan dan Kab. Lebuhnabatu Utara	

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020

5. Tersedianya Layanan Kehumasan

a. Kegiatan Peliputan

Kegiatan peliputan terdiri dari penyiapan undangan media massa (wartawan), bahan siaran pers, kegiatan konferensi pers, mendistribusikan siaran pers, serta dokumentasi kegiatan. Pada tahun 2020, target peliputan berita kegiatan di Ditjen PPKL sebanyak 18 berita, namun capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 34 berita. Kegiatan peliputan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Evaluasi Ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Lingkungan Hidup (Rabu, 8 Januari 2020)

Penilaian PROPER periode tahun 2018-2019 telah mengevaluasi sebanyak 2.045 perusahaan. Khusus untuk anugerah PROPER peringkat Emas, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta (8/1).

Gambar 12. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri LHK menyerahkan



PROPER Emas kepada perusahaan
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

- 2) Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Pondok Pesantren - Peresmian IPAL Domestik, Biodigester, dan MCK di Pesantren Darul Hijrah Martapura (Sabtu, 8 Februari 2020)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, Biodigester dan MCK di Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.



Gambar 13. Peresmian IPAL di Pondok Pesantren Darul Hijrah oleh Menteri LHK
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

3) Bersih Sungai Untuk Indonesia Maju (Rabu, 15 Februari 2020)

Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2020 yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, Ditjen PPKL KLHK bersama masyarakat Kota Bogor bergotong royong membersihkan Sungai Ciliwung di kawasan Babakan Pasar, Bogor Tengah, Jawa Barat. Sebanyak 500 orang turun langsung membersihkan sungai dan sempadan yang terdiri dari para pegawai Ditjen PPKL KLHK, Pemerintah Kota Bogor, masyarakat, Komunitas Peduli Ciliwung, Star Energy Geothermal, PT Kalbe Farma Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Indonesia Power, Dharma Wanita Persatuan KLHK U.P. Ditjen PPKL dan Organisasi Wanita Wirawati Catur Panca. Direktur Jenderal PPKL, M.R Karliansyah bersama Walikota Bogor, Bima Arya, memimpin langsung kegiatan tersebut.



Gambar 14. Kegiatan Bersih Sungai Ciliwung yang Dipimpin oleh Walikota Bogor dan Dirjen PPKL

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

4) Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Secara Otomatis, Terus-menerus, dan dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SPARING) (Rabu, 19 Februari 2020)

Dirjen PPKL melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran Air melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Secara Otomatis, Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SPARING). Acara ini dihadiri oleh 320 perwakilan Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPARING yang membuang air limbah ke badan air.



Gambar 15. Kegiatan Bimbingan Teknis SPARING oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

5) Peresmian Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Rabu, 26 Februari 2020)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, meresmikan penggunaan Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu ruang pameran (display) untuk berbagai aktifitas dan capaian kinerja kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selain itu, Ruang Sistem Informasi juga memiliki fungsi untuk memantau kualitas lingkungan.



Gambar 16. Peresmian Media Center PPKL oleh Menteri LHK dan Komisi IV DPR RI
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

6) Kunjungan Pemantauan Perkembangan Ekoriparian Karawang (Rabu, 26 Februari 2020)

Ditjen PPKL melakukan kunjungan bersama wartawan dalam rangka pemantauan perkembangan Ekoriparian di Telukjambe, Karawang. Ditjen PPKL bersama rekan-rekan wartawan di sambut oleh Komunitas Swadaya Masyarakat Sahabat Lingkungan serta masyarakat sekitar. Ketua KSM Sahabat Lingkungan, Hendro Wibowo mengatakan bahwa sejak tahun 2017 Ekoriparian Karawang telah membangun 3 wetland biocord yang mampu mengelola air limbah domestik dari 4.500 Kepala Keluarga (KK).



Gambar 17. Kunjungan Ditjen PPKL dan awak media ke Ekoriparian Telukjambe, Karawang
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

7) Jamur Termahal, Majapahit, hingga Masjid Tua - Kunjungan ke Taman Nasional Gunung Rinjani (Selasa, 10 Maret 2020)

Ditjen PPKL melakukan kunjungan ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pramuka, Pramu Risanto, Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung sekaligus aktivis lingkungan, Hidayat Al Ramdani, serta beberapa awak media. Dengan dipandu langsung oleh Budi Soesmardi,

Pengendali Ekosistem Hutan Balai TNGR, rombongan diajak berkeliling di seputar kaki Gunung Rinjani. Meski akses pendakian ke puncak Gunung Rinjani sedang ditutup karena masih dalam masa pemeliharaan yang biasa dilakukan di awal tahun selama 3 bulan, namun tetap banyak hal yang dapat dijelajahi, dipelajari, dan dinikmati di wilayah TNGR. Terlebih, saat ini TNGR masih dalam masa pemulihan dan pengembangan pasca gempa tektonik 2018 lalu.



Gambar 18. Kunjungan Ditjen PPKL dan awak media ke Taman Nasional Gunung Rinjani

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

8) Gerakan Bersih Cuci Tangan - KLHK Peduli Covid-19 (Sabtu, 28 Maret 2020)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), PT Musim Mas, Wings Group, dan Komunitas berkolaborasi melakukan aksi peduli sosial dengan sosialisasi “Gerakan Bersih Cuci Tangan” dengan membagikan 50.000 sabun kepada masyarakat. Lokasi pembagian sabun dilaksanakan di Jagakarsa, Pasar Rebo, dan Serpong (2 lokasi) dan masyarakat di sekitar Jabodetabek. Lokasi dipilih atas dasar pertimbangan peta sebaran COVID-19. KLHK juga memberikan bantuan penyemprotan desinfektan yang terbuat dari bahan organik ke beberapa wilayah pandemi Jabodetabek. Selain kegiatan penyemprotan dan pembagian sabun kepada masyarakat, KLHK juga memberikan bantuan masker ke beberapa Rumah Sakit, Polsek, dan Puskesmas di



wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Gambar 19. Kegiatan pembagian sabun dan penyemprotan desinfektan

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

9) Masyarakat Apresiasi Kegiatan KLHK Peduli Covid-19 (Jumat, 3 April 2020)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) bekerja sama dengan Komunitas Ciliwung, menyelenggarakan

pembagian masker dan sabun cuci tangan kepada masyarakat dengan dilengkapi pamflet tentang tata cara cuci tangan yang benar. Kegiatan ini dilaksanakan sejak 28 maret 2020 hingga 2 april 2020 dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di beberapa lokasi yaitu pembagian 33.430 sabun kepada 9.920 Kepala Keluarga di 23 komplek pemukiman masyarakat. Kemudian pembagian 11.918 sabun di 12 pasar tradisional di wilayah Jabodetabek, serta pemberian bantuan 4.000 masker di 12 pelayanan kesehatan masyarakat. Pada kegiatan ini dilakukan juga penyemprotan dengan menggunakan desinfektan organik ke seluruh area pemukiman terpilih dan pasar termasuk seluruh kendaraan yang diparkir. Penyemprotan pun dilakukan di beberapa masjid berdasarkan permintaan masyarakat.



Gambar 20. Kegiatan pembagian sabun dan penyemprotan desinfektan
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

10) Perempuan dan Bumi: Cinta Kami Tak Terbatas - Webinar Hari Bumi tahun 2020 (Rabu, 22 April 2020)

Dalam rangka memperingati Hari Bumi setiap tanggal 22 April, Ditjen PPKL KLHK menyelenggarakan diskusi Webinar (Web Seminar) dengan mengangkat tema "Perempuan dan Bumi: Cinta Kami Tak Terbatas". Topik ini dipilih sekaligus untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari sebelumnya. Diskusi diikuti 71 peserta dari 85 orang terdaftar. Para pembicara yang hadir adalah perwakilan Sriwandi perempuan yaitu Vania F Herlambang, Puteri Indonesia Lingkungan Tahun 2018; Putu Ayu Saraswati, Puteri Indonesia Lingkungan Tahun 2020; Dewi Purningsih, Jurnalis Madya Greeners.co; dan Siska Nirmala, Zero Waste Adventure.



Gambar 21. Webinar dalam rangka Hari Bumi tahun 2020 oleh Ditjen PPKL
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

11) Peduli di Tengah Pandemi (Selasa, 12 Mei 2020)

Perwakilan Ditjen PPKL memberikan dukungan dan bantuan untuk pengendalian wabah Covid-19 kepada masyarakat dengan memberikan

bantuan logistik kepada masyarakat melalui Yayasan Kumala dan Yayasan Sahabat Ciliwung. Bantuan yang diberikan berbentuk beras sebanyak 200 kg, sabun cuci tangan sebanyak 6.336 buah, suplemen vitamin sebanyak 10.080 buah, serta masker kain sebanyak 15.000 buah. Selanjutnya bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang sudah didata oleh komunitas seperti dapur umum,



tuna wisma, dan anak jalanan.

Gambar 22. Pemberian bantuan untuk pengendalian wabah Covid-19 kepada komunitas

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

12) KLHK Dorong Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut di Perkebunan Untuk Mencegah Terjadinya Karhutla (Selasa, 12 Mei 2020)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyelesaikan pembahasan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lahan gambut pada areal konsesi perkebunan. Ketua Umum GAPKI, Joko Suspriyanto dan Eddy Martono selaku Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI, serta seluruh GAPKI dari Provinsi yang memiliki



areal gambut hadir dalam pertemuan tersebut.

Gambar 23. Pertemuan virtual Ditjen PPKL dengan GAPKI mengenai strategi pencegahan karhutla di lahan gambut pada areal konsesi perkebunan

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

13) Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020 oleh KLHK (Kamis, 4 Juni 2020)

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020, Ditjen PPKL menyelenggarakan rangkaian kegiatan secara daring di media sosial. Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu: 1.) *Sharing Session* dan Diskusi melalui Web Seminar (Webinar); 2.) Ngobrol Pintar (Ngopi): "Time For

Nature"; 3.) Peluncuran Lagu Lingkungan Sebagai Peringatan Hari Lingkungan Hidup: "Tumbuh Lestari" ; 4.) Perlombaan; a.) Desain Inovasi IPAL, b.) Video Kampanye Lingkungan, c.) Cover Lagu Hari Lingkungan Hidup "Tumbuh Lestari", 5.) Live Instagram bersama penggerak lingkungan dan tokoh inspirasi tentang peringatan HLH Tahun 2020



Gambar 24. Poster-poster kegiatan HLH 2020 oleh Ditjen PPKL
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

14) Milenial dalam Pemulihian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati - Webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020 (Jumat, 5 Juni 2020)

Menyambut peringatan HLH Tahun 2020, Ditjen PPKL menyelenggarakan Web Seminar (Webinar) secara virtual. Tema yang diangkat yaitu "Milenial Dalam Pemulihian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati" sesuai dengan tema besar HLH yaitu *#biodiversity* dan *#timefornature*. Narasumber Webinar ini adalah Dirjen PPKL; Ketua Dewan WANADRI, Rafi Respati; Manager HSSE Pertamina (Persero) RU V Balikpapan, Agung Darmawan; dan Aktor dan Pecinta Lingkungan, Nicholas Saputra. Selain itu, diskusi Webinar ini dipandu oleh moderator yaitu Karina Nadila Niab (Aktris dan Puteri Indonesia Pariwisata 2017). Webinar dihadiri 384 peserta mayoritas generasi milenial yang berasal dari seluruh Indonesia.



Gambar 25. Suasana Webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

15) Reposisi Areal Eks-PLG Sebagai Kawasan Pangan Terpadu, Modern, dan Berkelanjutan (Jumat, 26 Juni 2020)

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, memimpin diskusi virtual mengenai Pembahasan Tinjauan Perspektif

Keilmuan dalam Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Diskusi ini diikuti para narasumber dari akademisi yang berasal dari Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Mulawarman. Turut mendampingi WamenLHK yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead.



Gambar 26. Diskusi Virtual Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional di eks PLG
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

16) *Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PPKL (Jumat, 26 Juni 2020)*

Sosialisasi PUG bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai PUG kepada seluruh pegawai Ditjen PPKL serta meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dalam pelaksanaan kegiatan PUG. Sosialisasi dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PPKL, dengan narasumber dari Biro Perencanaan KLHK dan Prof. Ismi Dwi Astuti selaku pakar di bidang PUG UNS. Selain membahas mengenai konsep dan implementasi Pengarusutamaan Gender di PPKL, FGD ini juga



membuka kesempatan diskusi antar pegawai dan pimpinan.

Gambar 27. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Ditjen PPKL secara virtual
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

17) Solusi Ilmiah dalam Pengendalian Pencemaran Sampah Plastik di Laut Indonesia - *FGD Marine Litter Forum with Science* (Selasa, 21 Juli 2020)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui *Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S)* dengan *Center for Southeast Asian Studies (CSEAS)* menyelenggarakan *Online FGD Marine Litter Forum with Science*, "Solusi Pengendalian Pencemaran Sampah Plastik

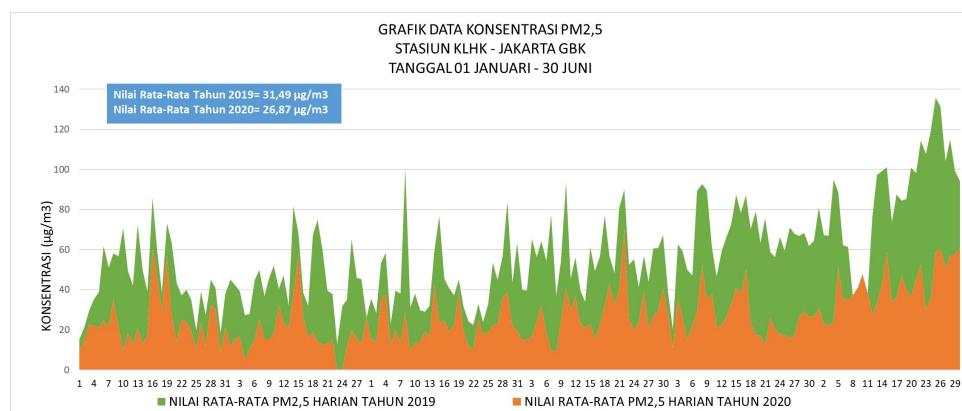
Di Laut Berbasis Penelitian Ilmiah". FGD ini dibuka oleh Direktur Jenderal PPKL dan diikuti peserta yang berasal dari akademisi, lembaga penelitian, dan pakar lingkungan, serta *Norwegian Institute for Water Research (NIVA)* yang memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai *monitoring method* pengurangan polusi sampah plastik di sungai dan pesisir.



Gambar 28. *FGD Marine Litter Forum With Science*
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

18) Kualitas Udara di Masa Pandemi Covid-19 (Jumat, 24 Juli 2020)

Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak dari penerapan PSBB dan *new normal* terhadap kualitas udara ambien, tidak bisa membandingkan data kualitas udara di suatu wilayah pada bulan sebelum PSSB dengan bulan pada saat penerapan PSBB. Namun, perbandingan kualitas udara harus dilakukan pada bulan yang sama di tahun yang berbeda, yakni pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di beberapa wilayah Indonesia yang menerapkan PSBB dan telah menerapkan *new normal*, untuk wilayah Makassar, DKI Jakarta, Padang, Pekanbaru, dan Banjarmasin terjadi penurunan rata-rata konsentrasi PM2.5 pada tahun 2020 dari 1 Januari hingga 30 Juni apabila dibandingkan dengan tahun 2019 pada waktu yang sama.



Gambar 29. Grafik Perbandingan Data Konsentrasi PM 2,5 Jakarta 2019 – 2020
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

19) Pasukan Penjaga Kelestarian Sungai "Patroli Sungai" (Senin, 27 Juli 2020)

Untuk mendukung program pengelolaan lingkungan di kawasan sungai, KLHK membentuk Program Patroli Sungai sejak tahun 2018. Kegiatan

ini adalah inovasi dari KLHK, Komunitas Peduli Sungai Ciliwung dan



Walikota Bogor.

Gambar 30. Kegiatan Patroli Sungai KLHK
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

20) Merah Putih di Dadaku, Lingkungan di Hatiku, Untuk Indonesia Maju - Webinar Ngobrol Pintar Kontribusi Generasi Muda untuk Lingkungan (Rabu, 19 Agustus 2020)

Dalam rangka memperingati 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia dan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2020, KLHK menyelenggarakan Webinar NGOPI atau Ngobrol Pintar dengan tema "Merah Putih Di Dadaku, Lingkungan Di Hatiku Untuk Indonesia Maju". Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong yang juga memberikan penghargaan hadiah pemenang lomba Hari Lingkungan Hidup Tahun 2020. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 1000 peserta yang berasal dari mahasiswa dan umum dibagi menjadi dua bagian yaitu *Pre Session* yang mengangkat bincang pengalaman dari narasumber yang berasal dari generasi muda yaitu Puteri Indonesia Lingkungan Tahun 2020, Putu Ayu Saraswati; Mahasiswa Berprestasi UI 2020, Dizza Aliftsa Agus; dan *Eco- Entrepreneurship*, Vania Santoso.



Gambar 31. NGOPI KLHK, Webinar dalam Rangka HUT ke-75 RI dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

21) Kunjungan Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus Lahan Bekas Tambang - Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat (Jumat, 4 September 2020)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sekaligus Plt. Direktur Pemulihan Lahan Akses Terbuka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dalam

rangka Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus Lahan Bekas Tambang Bukit Kandis, Kunjungan AQMS dan *Coastal Clean Up*. Turut hadir dalam acara ini perwakilan Gubernur Bengkulu, dan Bupati Bengkulu Tengah, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, dan Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut. Kunjungan utama dilakukan di lokasi hasil pemulihan Lahan Akses Terbuka Bukit Kandis yang berlokasi di Desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu Tengah.



Gambar 32. Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus di Provinsi Bengkulu
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

22) Bersih Kotaku, Bersih Pantaiku, Lestari Lingkunganku - *Coastal Clean-Up* Pantai Panjang Bengkulu (Jumat, 4 September 2020)

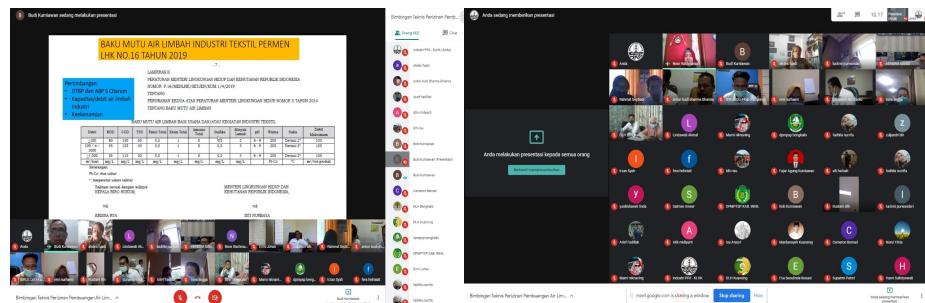
Sebagai akhir dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Provinsi Bengkulu, dilakukan penanaman pohon di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai serta bersih pantai yang diikuti setidaknya seratus peserta yang terdiri dari Kementerian LHK, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan perwakilan masyarakat.



Gambar 33. Aksi Bersih Pantai Ditjen PPKL di Pantai Panjang Bengkulu
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

23) Bimbingan Teknis Perizinan Pembuangan Air Limbah Sektor Industri Berbasis DTBP (Daya Tampung Beban Pencemaran) (Rabu, 23 September 2020)

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengendalian pencemaran air, Ditjen PPKL melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pemerintah kabupaten/kota. Bimtek kali ini mengangkat tema Perizinan Pembuangan Air Limbah Sektor Industri Berbasis DTBP (Daya Tampung Beban Pencemaran).



Gambar 34. Bimbingan Teknis virtual mengenai Perizinan Pembuangan Air Limbah Sektor Industri bagi pemerintah kabupaten/kota
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

24) Adaptasi Tanggap Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat - Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria Hijau PROPER Tahun 2020 (Rabu, 23 September 2020)

Ditjen PPKL KLHK menggelar kegiatan Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria Hijau PROPER Tahun 2020 secara virtual. Sosialisasi diikuti kurang lebih 1000 peserta Zoom yang berasal dari 472 perusahaan calon kandidat Hijau PROPER Tahun 2020, dan 503 peserta yang menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Ditjen PPKL.



Gambar 35. Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria Hijau PROPER Tahun 2020
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

25) Mengharap Berkah Setelah Bencana ala Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan (Sabtu, 26 September 2020)

Ditjen PPKL melakukan kunjungan sekaligus monitoring perkembangan kegiatan pemulihan lahan bekas tambang batu di Desa Cisantana, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan yaitu peninjauan pemulihan lahan bekas tambang serta konservasi lingkungan antara lain pelepasan bibit Ikan Nila sebanyak 5.000 ekor di embung desa, penanaman pohon produktif seperti nangka dan alpukat, dan pelepasan burung.



Gambar 36. Kunjungan dan Monitoring Ditjen PPKL ke Lahan Pemulihan di Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

26) KLHK Tingkatkan Kualitas Lingkungan Melalui Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat (Selasa, 10 Oktober 2020)

Ditjen PPKL terus berupaya mengembangkan kolaborasi pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Diantaranya adalah mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan. Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah dalam kegiatan selama dua hari mengunjungi lokasi kawasan wisata yang dikembangkan melalui program pengendalian pencemaran air dan pemulihan lahan akses terbuka. Kawasan wisata tersebut yaitu Wisata Tubing Serinjing di Dusun Mojolegi, Desa Bando, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan AgroEdutourism Njulung di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur.



Gambar 37. Kunjungan Ditjen PPKL ke Kediri dan Malang
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

27) Mewujudkan Cita-cita Miskin Struktur, Kaya Fungsi, dalam Pengelolaan Lingkungan - Webinar Pengembangan Karir Melalui Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) (Senin, 2 November 2020)

Ditjen PPKL menyelenggarakan Webinar dengan tema "Mengembangkan Karir melalui Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)". Jumlah peserta yang hadir baik dari ASN maupun masyarakat umum total 921 orang. Para narasumber webinar ini berasal dari tokoh bidang lingkungan dan reformasi birokrasi yaitu Ir. Sarwono Kusumaatmaja; Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah; Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL, Sigit Reliantoro; Direktur Jabatan ASN BKN, Aidu Tauhid; Direktorat Jenderal Anggaran Kemkeu, Satya Susanto dan Sukrasno; serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Menpan RB, Moh. Firdaus Wahyu Rohman.



Gambar 38. Webinar Pengembangan Karir Melalui Jabatan Fungsional PEDAL
 (Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

28) Berbagi Pengalaman Implementasi Pengelolaan Pesisir dan Laut - Workshop *Sustainable Development Strategies for the Seas of East Asia (SDS-SEA) Project* (Senin, 9 November 2020)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *National Focal Point* Indonesia dalam proyek SDS-SEA bekerjasama dengan PEMSEA menyelenggarakan *Workshop "Sustainable Development Strategies For The Seas Of East Asia (SDS-SEA) Project"* dalam rangka evaluasi pelaksanaan proyek SDS- SEA di Indonesia yang berakhir pada tahun 2020.



Gambar 39. Workshop mengenai Implementasi Pengelolaan Pesisir dan Laut
 (Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

29) Peningkatan Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Mewujudkan Kualitas Air yang Lebih Baik - Bimbingan Teknis SPARING (Kamis, 12 November 2020)

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran air bagi pemerintah daerah dan mewujudkan kualitas air yang lebih baik, Ditjen PPKL melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota. Untuk memfokuskan kepada pemahaman dan diskusi yang lebih intensif, pelaksanaan bimtek dibagi menjadi 3 hari berdasarkan region yaitu Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, dan Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. Peserta berasal dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion KLHK, 34 DLHK Provinsi di Indonesia dan 109 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota di Indonesia.



Gambar 40. Bimbingan Teknis SPARING bagi Dinas LHK Provinsi dan

Kab/Kota seluruh Indonesia

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

30) Selamatkan dan Lestarikan yang Tersisa - Peringatan ke-9 Hari Ciliwung tahun 2020 (Sabtu, 14 November 2020)

Tanggal 11 November ditetapkan sebagai Hari Ciliwung. Deklarasinya dilakukan oleh Komunitas Pegiat Penyelamatan Ciliwung pada 2012. Penentuan Hari Ciliwung diawali penemuan dua kura-kura bulus pada tanggal 11 November 2011. Inilah yang menjadi semangat komunitas tersebut bahwa masih ada ekosistem endemik Ciliwung yang perlu dilestarikan kehidupannya. Peringatan Hari Ciliwung diinisiasi oleh GCB Jakarta selaku koordinator kegiatan peduli Sungai Ciliwung dengan mengangkat tema "Selamatkan dan Lestarikan yang Tersisa".



Gambar 41. Peringatan ke-9 Hari Ciliwung

(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

31) Sinergitas Demi Rehabilitasi Ekosistem Gambut untuk Mendukung Food Estate dan Pembangunan Ekonomi Nasional

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, M.R. Karliansyah, membuka diskusi antar berbagai lembaga di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), terkait rehabilitasi ekosistem gambut di lahan Eks PLG untuk mendukung program Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) dan Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN). Diskusi ini dihadiri oleh Fahrizal Fitri (Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng), lalu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, para pimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng dan DLH Kabupaten, pimpinan Bappeda Provinsi dan Kabupaten, serta akademisi dari Universitas Palangkaraya.



Gambar 42. Diskusi antara Ditjen PPKL
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

32) Kunjungan ke Desa Mandiri Peduli Gambut

Tim Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, melakukan kunjungan ke Desa-desa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang menjadi bagian dari program Desa Mandiri Peduli Gambut. 8 Desa yang masuk dalam program tersebut adalah Desa Babai, Tabatan, dan Tampulang di Kabupaten Barito Selatan, Desa Tumbang Muroi dan Lahei Mangkutup di Kabupaten Kapuas, Desa Penda Barania dan Tanjung Sangalang di Kabupaten Pulang Pisau, serta Desa Penamas di Kota Kuala Kapuas. Dengan didampingi oleh tim Universitas Palangka Raya dan fasilitator masyarakat, tim Ditjen PPKL melihat sejauh apa progres kegiatan masyarakat di Desa-desa tersebut yang telah tersusun di dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).



Gambar 43. Kunjungan tim Ditjen PPKL ke 8 Desa Mandiri Peduli Gambut
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

33) Anugerah PROPER Tahun 2020 "Masa Pandemi, Masa untuk Peduli dan Berbagi"

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyerahkan Anugerah PROPER Tahun 2020 kepada 32 perusahaan peringkat PROPER EMAS hari ini di Auditorium Manggala Wanabakti. Penyelenggaraan Anugerah PROPER Tahun 2020 kali ini berbeda dari biasanya dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Acara yang biasanya dilakukan di Istana Wakil Presiden RI, kini dilaksanakan secara daring dengan siaran langsung di Zoom Cloud Meeting, serta media sosial KLHK dan Ditjen PPKL Youtube dan Instagram. Acara anugerah ini dihadiri Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Pimpinan Komisi IV DPR RI, Sekretaris Jenderal KLHK, para Eselon I KLHK, Anggota Dewan Pertimbangan PROPER, serta Wakil Presiden RI, Bapak Ma'ruf Amin secara daring. Selain menyerahkan penghargaan secara langsung

terhadap 32 perusahaan peraih peringkat EMAS, disaat yang sama juga diumumkan penghargaan peringkat HIJAU untuk 125 perusahaan.



Gambar 44. Anugerah PROPER 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

34) Kunjungan ke Desa Mandiri Peduli Gambut Tahap ke-2

Setelah sebelumnya mengunjungi 8 desa yang menjadi program Desa Mandiri Peduli Gambut, tim Ditjen PPKL kembali mengunjungi 10 desa di tahap ke-2 program tersebut. Desa-desa itu adalah Desa Pulau Kaladan, Desa Mantangai Tengah, Desa Mantangai Hilir, Desa Mantangai Hulu, Desa Katunjung, Desa Katimpun, Desa Sei Ahas, dan Desa Kalumpang, yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas. Lalu Desa Mahajandau dan Desa Sei Jaya yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Tim Ditjen PPKL menyambangi setiap desa untuk melihat sejauh apa Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah dilaksanakan, serta meninjau dan berdiskusi langsung dengan warga mengenai kendala yang menghambat maupun potensi yang dapat digali dari desa-desa tersebut.



Gambar 45. Kunjungan Ditjen PPKL ke 10 Desa Mandiri Peduli Gambut tahap 2
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

b. Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi, serta pencitraan kepada masyarakat tentang program Ditjen PPKL. Penyebaran informasi dilakukan melalui media massa untuk menciptakan komunikasi efektif agar masyarakat dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pencitraan di media cetak (advetorial) sebanyak 24 (dua puluh empat) kali di media cetak, *online*, dan elektronik (TV). Daftar *advetorial* bisa dilihat pada Tabel 27 dan contoh *layout advetorial* dapat dilihat pada Gambar 46.

Tabel 27. Advetorial/ Ditjen PPKL Tahun 2020

No	Kegiatan	Waktu Penayangan	Media
1	Anugerah PROPER Tahun 2019	8 – 9 Januari 2020	(1) jppn.com; (2) koran-jakarta.com; (3) lintaslampung.com; (4) detakpos.com; (5) medcom.id; (6) mediaindonesia.com; (7) sinarharapan.net; (8) sindonews.com; (9) kumparan.com; (10) republika.co.id; (11) antaranews.com; (12) suarakarya.co.id; (13) suaramerdeka.com; (14) bisnis.com; dan (15) Harian Ekonomi Neraca terbit Kamis 9 Januari 2020.
2	Jazz Song of Earth Festival Tahun 2020	22 - 24 Februari 2020	(1) beritasatu.com; (2) jppn.com; (3) tribunnews.com; (4) medcom.id; (5) mediaindonesia.com; (6) sindonews.com; (7) koranpelita.com; (8) poskota.id; (9) cakraline.com; (10) suaramerdeka.com; dan (11) Harian Ekonomi Neraca terbit Senin 24 Februari 2020.
3	Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2020	9 - 12 Maret 2020	(1) beritabuana.co; (2) beritasatu.com; (3) suarakarya.co.id; (4) okezone.com; (5) mediaindonesia.com; (6) faham.id; (7) koranpelita.com; (8) tribunnews.com; (9) jppn.com; (10) neraca.co.id; (11) sinarharapan.net; (12) kabar24.bisnis.com; (13) suaramerdeka.com; (14) medcom.id; (15) rmco.id; (16) merdekanews.co; (17) sindonews.com; (18) realitarakyat.com; dan (19) poskota.id.
4	Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2020	13 Maret 2020	Koran Rakyat Merdeka
5	Kegiatan KLHK Peduli COVID-19	28 Maret – 4 April 2020	(1) beritabuana.co; (2) beritasatu.com; (3) suarakarya.co.id; (4) okezone.com; (5) mediaindonesia.com; (6) koranpelita.com; (7) tribunnews.com; (8) jppn.com; (9) neraca.co.id; (10) sinarharapan.net; (11) kabar24.bisnis.com; (12) suaramerdeka.com; (13) medcom.id; (14) sindonews.com; (15) daelpos.com; dan (16) poskota.id; (17) antaranews.com; (18) rri.co.id; dan (19) satunusantarnews.co.id.
6	Kegiatan KLHK Peduli COVID-19	3 April 2020	KOMPAS TV
7	Kegiatan KLHK Peduli COVID-19	4 - 6 April 2020	CNN Indonesia TV
8	Kegiatan KLHK Peduli COVID-19 (Pemberian Bantuan Logistik)	12 – 13 Mei 2020	(1) beritabuana.co; (2) beritasatu.com; (3) suarakarya.co.id; (4) okezone.com; (5) mediaindonesia.com; (6) koranpelita.com; (7) tribunnews.com; (8) jppn.com; (9) neraca.co.id; (10) sinarharapan.net; (11) kabar24.bisnis.com; (12) suaramerdeka.com; (13) medcom.id; (14) sindonews.com; (15) koran-jakarta.com; dan (16) poskota.id; dan (17) realitarakyat.com.
9	Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020 ditayangkan pada	5 – 6 Juni 2020	(1) okezone.com; (2) mediaindonesia.com; (3) koranpelita.com; (4) jppn.com; (5) sinarharapan.net; (6) kabar24.bisnis.com; (7) suaramerdeka.com; (8) medcom.id; (9) sindonews.com; (10) koran-jakarta.com; dan (11) poskota.id; dan (12) detakpos.com
10	Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020	5 Juni 2020	Media Indonesia
11	Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020 yang ditayangkan pada	6 Juni 2020	METRO TV
12	Pengelolaan Ekosistem Gambut	17 Juli 2020	Majalah GATRA
13	Patroli Sungai dalam rangka Hari Sungai	3 Agustus 2020	Majalah TEMPO
14	Webinar NGOPI Hari Kemerdekaan Tahun 2020	19 – 21 Agustus 2020	(1) suarakarya.co.id; (2) merdekanews.co; (3) tribunnews.com; (4) suaramerdeka.com; (5) sindonews.com; (6) mediaindonesia.com; (7) kabar24.bisnis.com; (8) medcom.id; (9) koran-jakarta.com; (10) beritabuana.co; (11) neraca.co.id; (12) beritasatu.com; (13) koranpelita.com; (14) rmco.id; (15) poskota.co.id; dan (16) jppn.com
15	Webinar NGOPI Hari Kemerdekaan Tahun 2020	20 Agustus 2020	Metro TV
16	Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus Lahan Bekas Tambang Bukit Kandis, Kunjungan AQMS dan Coastal Clean Up di Provinsi Bengkulu	5 - 6 September 2020	Metro TV
17	Kunjungan Kerja Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus Lahan Bekas Tambang Bukit Kandis, Kunjungan AQMS dan Coastal Clean Up di Provinsi Bengkulu	5 – 6 September 2020	(1) detakpos.com; (2) merdekanews.co; (3) tribunnews.com; (4) suaramerdeka.com; (5) sindonews.com; (6) mediaindonesia.com; (7) bisnis.com; (8) medcom.id; (9) koran-jakarta.com; (10) suarakarya.com; (11) beritasatu.com; (12) koranpelita.com; (13) rmco.id; (14) poskota.co.id; dan (15) jppn.com
18	Sosialisasi Kriteria Hijau PROPER Tahun 2020	25 - 26 September 2020	Metro TV
19	Sosialisasi Kriteria Hijau PROPER Tahun 2020	24 September 2020	(1) detakpos.com; (2) sinarharapan.net; (3) tribunnews.com; (4) suaramerdeka.com; (5) sindonews.com; (6) kabar24.bisnis.com; (7) beritabuana.co; (8) koran-jakarta.com; (9) suarakarya.com; (10) beritasatu.com; (11) theworldnews.net; (12) poskota.co.id; dan (13) jppn.com
20	Promosi Lokasi Pemulihan Lahan Bekas Tambang Batu Di Kawasan Wisata Lawang Geger, Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan	4 Oktober 2020	Metro TV
21	Pra Event Anugerah PROPER Tahun 2020	11-12 desember	Metro TV
22	Anugerah PROPER Tahun 2020	14 Desember	Media Online
23	Anugerah PROPER Tahun 2020	16 Desember 2020	Metro TV
24	Capaian Kinerja Ditjen PPKL	30 Desember	Koran Rakyat Merdeka

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020



Gambar 46. Contoh Kegiatan Publikasi *Advertorial* di Media Massa (Cetak) Tahun 2020
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

Salah satu cara penyebaran informasi kepada masyarakat yaitu melalui media massa dalam bentuk video, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PPKL. Pada tahun 2020, Ditjen PPKL membuat 22 (dua puluh dua) paket video yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 28. Daftar Video Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2020

No	Judul Video	Ringkasan	Unit Kerja
1.	Bersih Sungai Ciliwung HPSN 2020	Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2020, Dirjen PPKL bersama Walikota Bogor memimpin kegiatan bersih sungai Ciliwung bersama masyarakat Kota Bogor, Pemkot Bogor, Komunitas Peduli Ciliwung, dan pihak swasta.	Setditjen/PPA
2.	Upaya Pengendalian Wabah Covid-19 bersama Yayasan Sahabat Ciliwung	Penyaluran bantuan dari KLHK dan perusahaan melalui Yayasan Sahabat Ciliwung di Depok kepada masyarakat yang terdampak Covid-19	Setditjen
3.	Upaya Pengendalian Wabah Covid-19 bersama Yayasan Kumala	Penyaluran bantuan dari KLHK dan perusahaan melalui komunitas Yayasan Kumala di Tanjung Priok kepada masyarakat yang terdampak Covid-19	Setditjen
4.	Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia oleh Direktur Jenderal PPKL	Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni, Direktur Jenderal PPKL mengajak untuk mengubah perilaku kita terhadap alam dalam tema "Time For Nature".	Setditjen
5.	Webinar Hari Lingkungan Hidup 2020 "Time For Nature"	Webinar yang mengajak kalangan milenial untuk lebih cinta terhadap lingkungan bersama para narasumber yaitu aktor sekaligus aktivis lingkungan, Nicholas Saputra, para komunitas pecinta lingkungan, serta pihak swasta.	Setditjen
6.	Klip video "Tumbuh Lestari"	Ditjen PPKL meluncurkan lagu sekaligus video bertemakan lingkungan sebagai bentuk ekspresi seni sekaligus kepedulian kepada lingkungan dan kekayaan keanekaragaman hayati serta kebudayaan di Indonesia. Lagu ini kemudian menjadi materi lomba cover lagu peringatan HLH 2020.	Setditjen
7.	Webinar NGOPI "Merah Putih di Dadaku, Lingkungan di Hatiku, untuk Indonesia Maju"	<i>Streaming</i> video webinar NGOPI dalam rangka HUT ke-75 RI dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang mengajak generasi muda untuk berkontribusi bagi lingkungan. Dihadiri oleh Wakil Menteri LHK, serta para narasumber dari generasi muda yang inspiratif.	Setditjen
8.	Protokol Kesehatan Covid-19 di lingkup Ditjen PPKL	Sebagai bagian dari kampanye kesehatan selama masa pandemi Covid-19, video ini menunjukkan ketiauan para pegawai Ditjen PPKL dalam mematuhi protokol kesehatan. Video ini juga berhasil meraih peringkat ketiga dalam "Lomba Video Aktualisasi Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Kerja Lapangan" oleh Biro Humas KLHK.	Setditjen
9.	Capaian Kinerja Ditjen PPKL	Video rangkuman kinerja Ditjen PPKL selama 5 tahun terakhir merupakan bagian dari "Lomba Video Kerja Favorit KLHK" oleh Biro Humas KLHK.	Setditjen
10.	Pengarusutamaan Gender lingkup Ditjen PPKL	Video yang menunjukkan segala sarana dan prasarana untuk pegawai Ditjen PPKL maupun pengunjung, dalam rangka pengarusutamaan gender.	Setditjen
11.	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan	Lahan seluas 7,63 Ha yang rusak akibat penambangan pasir dan batu, dipulihkan menjadi Taman Wisata Cisantana dengan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, serta revegetasi dengan berbagai macam tumbuhan.	PKLAT
12.	Sosialisasi Pemulihan Terumbu Karang dan Coastal Clean-Up	Sosialisasi pemulihan terumbu karang yang dihadiri oleh kelompok masyarakat dan akademisi Universitas Khairun agar ikut memanfaatkan dan menjaga hasil transplantasi terumbu karang yang sudah dilakukan. Coastal Clean-up dilakukan pada 19-20 September di 3 lokasi pantai (Pantai Kastela, Pantai Tobololo, dan Pantai Nuklia) yang mencakup pembersihan sampah	PPKPL

No	Judul Video	Ringkasan	Unit Kerja
13.	Puteri Indonesia Lingkungan 2020 di TACIS	pantai dan sampah bawah laut. Perjalanan Puteri Indonesia Lingkungan 2020 ke Tacis (Taman Wisata Cisantana) yang merupakan area pemulihian kerusakan lahan akses terbuka di Kabupaten Kuningan, bersama Dirjen PPKL dan Bupati Kuningan.	PKLAT
14.	Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL	Video ini dibuat untuk memperlihatkan budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri Disiplin, Jujur, Ikhlas, Profesional, Tanggung Jawab dan Kerjasama atau yang biasa disingkat DJIPTK, yang telah diimplementasikan oleh Ditjen PPKL.	Setditjen
15.	Kunjungan Ditjen PPKL Ke Desa Bendo di Kediri	Ditjen PPKL melakukan kunjungan kerja untuk menyaksikan sekaligus mengapresiasi upaya swadaya masyarakat yang telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Mojolegi, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang telah melakukan pengelolaan Sungai Serinjing dengan konsep wisata tubing.	PPA
16.	Puteri Indonesia Lingkungan 2020 di Bukit Kandis	Kunjungan Puteri Indonesia Lingkungan 2020 bersama Ditjen PPKL ke Taman Wisata Bukit Kandis di Desa Durian Demang, di Bengkulu	PKLAT
17.	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka di Kabupaten Belitung Timur	Lahan seluas 8,4 Ha yang rusak akibat penambangan timah disulap menjadi Wisata Pemancingan dengan berbagai fasilitas pendukung	PKLAT
18.	Anugerah PROPER 2020	Sekretariat PROPER KLHK mempersembahkan Penghargaan PROPER Hijau dan Emas untuk para perusahaan dengan ketaatan lingkungan yang baik	Setditjen
19.	Kunjungan ke Desa Mandiri Peduli Gambut 1	Penjelasan Direktur PKG mengenai apa itu program Desa Mandiri Peduli Gambut, tujuannya, serta prosesnya	PKG
20.	Rehabilitasi Gambut	KLHK melakukan rehabilitasi gambut dan pembangunan sekat kanal di eks proyek lahan gambut sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, demi mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan	PKG
21.	Kunjungan ke Desa Mandiri Peduli Gambut 2	Masyarakat bercerita mengenai program-program kerja di desa mereka, pengembangannya, hingga langkah kedepannya	PKG
22.	Desa Mandiri Peduli Gambut	Sebagai bagian dari Pembangunan Ekonomi Nasional dan Ketahanan Pangan Nasional, KLHK mengembangkan program Desa Mandiri Peduli Gambut demi kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan ekosistem gambut	PKG

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi, 2020

6. Tersedianya Layanan Data dan Informasi

Lingkup layanan data dan informasi selain menyajikan website/laman informasi tentang program Ditjen PPKL, juga menerbitkan buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2019 (Gambar 47). Data yang disajikan dalam Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan berupa kompilasi data tren kegiatan 5 (lima) tahunan sejak tahun 2015 – 2019. Pada buku tahun ini, terdapat penambahan data baru mengenai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2019 (baseline) pada Kualitas Tutupan Lahan, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Tahun 2019 (*baseline*) pada Kualitas Air Laut. Selanjutnya, data indeks tersebut akan ada setiap tahun sebagai bagian dari data perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Data yang disajikan di dalam buku ini antara lain:

- a. Status Mutu Air Sungai Indonesia (2015 – 2019);
- b. Kualitas Air Sungai per Provinsi (2019);
- c. Kualitas Air Sungai pada DAS Prioritas (2019);
- d. Indeks Kualitas Air (IKA) (2015 – 2019);
- e. Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (2015 – 2019);
- f. Kualitas Udara Ambien Perkotaan per Parameter (2015 – 2019);
- g. Tingkat Ketaatan Terhadap Baku Mutu Emisi (2015 – 2019);
- h. Nilai Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) (2015 – 2019);
- i. Indeks Kualitas Udara (IKU) (2015 – 2019);
- j. Kualitas Udara Ambien (2017 – 2019);
- k. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (2015 – 2019);
- l. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) (2019);
- m. Status Mutu Kualitas Air Laut (2016 - 2019);
- n. Pemantauan Sampah Pesisir dan Laut (2019) dan;
- o. Pemulihan Kerusakan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut (2017 – 2019); dan
- p. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (2019).



Gambar 47. Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2019

(Sumber: Bagian Program dan Evaluasi)

7. Pengembangan *Website* Ditjen PPKL

Pengembangan *website* Ditjen PPKL dilakukan untuk menyediakan data dan informasi pelaksanaan program yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (<http://ppkl.menlhk.go.id>). Pada tahun 2020 pengembangan *website* sebagian besar pada tampilan muka laman utama. Berbeda dengan tampilan tahun-tahun sebelumnya, kali ini laman Ditjen PPKL memiliki tema lebih ramah pengguna dan jelas, baik dari segi tampilan komputer atau *mobile*. (Gambar 48)



Gambar 48. Website Ditjen PPKL KLHK

(Sumber: Bagian Program & Evaluasi)

8. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Total paket pengadaan barang dan jasa Ditjen PPKL yang dilaksanakan selama tahun 2020 sebanyak 36 paket. Daftar lengkap paket pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

No	Nama Paket	Direktorat
1.	Pemantauan Kualitas Air Laut di Regional I (P. Sumatera dan Jawa)	PPKPL
2.	Pemantauan Kualitas Air Laut di Regional II (P. Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara)	PPKPL
3.	Pemantauan Kualitas Air Laut di Regional III (P. Sulawesi, Maluku, dan Papua)	PPKPL
4.	Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir Maluku dan Maluku Utara	PPKPL
5.	PL Hotel Aruna (Rakernis 2020)	Setditjen
6.	Pemulihan Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Bengkayang	PKLAT
7.	Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air secara <i>Online</i> Paket 2 (Gorontalo, Banten, Sulsel, Lampung)	PPA
8.	Pemantauan Kualitas Air secara Manual Regional Sumatera	PPA
9.	Pemantauan Kualitas Air secara Manual Regional Jawa, Bali, NTB, dan NTT	PPA
10.	Pemantauan Kualitas Air secara Manual Regional Kalimantan	PPA
11.	Pemantauan Kualitas Air secara Manual Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat	PPA
12.	Pemulihan Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Sumatera Barat	PKLAT
13.	Pengadaan Peralatan Passive Sampler, Analisis sampler, dan Pengiriman (500 kab/kota)	PPU
14.	Pengadaan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis di 10 Kota	PPU
15.	Perawatan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (AQMS)	PPU
16.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Sekolah Sukma Bangsa Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh	PPA
17.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), MCK dan Ekoriparian di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan	PPA
18.	Pembangunan Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Di Kampung Lodaya Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	PPA
19.	Pembangunan IPAL di Perumahan Bintang Alam Karawang	PPA
20.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Institut Teknologi Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan	PPA
21.	Pembangunan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (AQMS) di 2 Lokasi Tahun 2020	PPU
22.	Pembangunan Fasilitas Pendukung Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Di Kampung Lodaya Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	PPA
23.	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket I Pada 8 KHG Provinsi Sumatera Selatan, Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket II Pada 6 KHG Provinsi Jambi, Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket III Pada 4 KHG Provinsi Kalimantan	PKG

No	Nama Paket	Direktorat
	Tengah, Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket IV Pada 6 KHG Provinsi Kalimantan Barat	
24.	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket I Pada 25 KHG Provinsi Sumatera Selatan, Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket II Pada 16 Khg Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket III Pada 22 KHG Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket Iv Pada 13 Khg Kabupaten Mappi Provinsi Papua	PKG
25.	Pengadaan Video Wall Display	
26.	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket III Pada 22 KHG Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	PKG
27.	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket IV Pada KHG Sungai Kuis – Sungai Bapai, Kabupaten Mappi Dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua	PKG
28.	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket V Pada 2 KHG (Skala 1:50.000) Di Kabupaten Mappi Dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua	PKG
29.	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Paket Vi Pada 10 KHG (Skala 1:50.000) Di Kabupaten Mappi Dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua	PKG
30.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 1 SK)	PKG
31.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 2 SK)	PKG
32.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 3 SK)	PKG
33.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 4 SK)	PKG
34.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 5 SK)	PKG
35.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 6 SK)	PKG
36.	Pembangunan Sekat Kanal (PAKET – 7 SK)	PKG

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi, 2020

9. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pada tahun 2020, Ditjen PPKL telah membentuk 6 Satgas Penyelenggaraan SPIP yang berada pada masing-masing unit eselon II. Masing-masing satgas menyusun desain SPIP yang diinput ke dalam aplikasi simawas.itjen.melhk.go.id. Pelaporan penyelenggaraan SPIP juga dilaksanakan pada masing-masing unit kerja, yang terdiri dari Laporan Triwulan I-IV. Sebagai langkah persiapan untuk penyelenggaraan SPIP yang berkelanjutan dan efektif pada Setditjen PPKL, maka dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP (Satgas SPIP) dengan nomor SK.1/SET/PROEV/WAS.7/1/2020. Selain itu juga telah disusun Desain Penyelenggaraan SPIP Setditjen PPKL tahun 2020 dengan sumber-sumber resiko yang telah diinventarisasi dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Rekapitulasi Resiko Signifikan Satker Setditjen PPKL Tahun 2020

No	Kegiatan	Kebijakan Pengendalian
1	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PPKL	Membuat SOP penyusunan Renja Ditjen PPKL
2	Penyusunan dan Revisi RKAKL	Membuat nota dinas tentang ketentuan penyusunan dan pembahasan RKAKL Menyusun SOP pelaksanaan Revisi RKAKL
3	Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Triwulan Ditjen PPKL	Menetapkan target penyelesaian Laporan Bulanan dan Triwulan Ditjen PPKL
4	Pelaporan E-Monev (PPKL, Bappenas dan DJA)	Melakukan pemantauan pengisian aplikasi E-Monev dan membuat notifikasi batas waktu pengisian Melakukan evaluasi pengisian aplikasi E-Monev
5	Layanan Kepegawaian	Pengembangan aplikasi Absen Elektronik (perhitungan Tukin)
6	Layanan Tata Laksana	Melaksanakan evaluasi terhadap peta bisnis proses Melakukan sosialisasi kepada seluruh tim Reformasi Birokrasi dan pegawai lingkup Ditjen PPKL
7	Pertanggungjawaban Anggaran	Membuat nota dinas tentang batas waktu penyelesaian tagihan Membuat nota dinas tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran Membuat surat perjanjian kontrak atau surat pernyataan yang mencantumkan kesanggupan pengembalian uang apabila ada temuan
8	Pengelolaan BMN	SK Penghapusan dari Pengguna Barang (Sekjen KLHK) dari Aplikasi Persediaan SK Penghapusan dari Pengguna Barang (Sekjen KLHK) dari Aplikasi SIMAK BMN
9	Pengelolaan Persuratan	Melakukan pemindahan arsip ke Pusat Kearsipan secara berkala
10	Pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi	Melaksanakan penelaahan Surat Keputusan dan Risalah Pengolahan Data

No	Kegiatan	Kebijakan Pengendalian
11	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PUU)	Pemenuhan kewajiban pembentukan PUU Melaksanakan penelaahan terhadap substansi peraturan perundangan yang akan disusun
12	Pelaksanaan Kerja Sama	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama
13	Pelaksanaan PROPER	Melakukan QA/QC kepada Direktorat PPU, PPA, PKLAT, PKLB3 Melakukan QA/QC kepada DLH Provinsi
14	Penyusunan Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Ditjen PPKL	Membuat Nota Dinas permintaan data dengan menyampaikan target waktu penyampaian data selama 1 bulan. Menyusun rencana aksi penyusunan buku statistik
15	Unit Layanan Pengadaan	Memastikan penyusunan RUP dilaksanakan tepat waktu Melakukan evaluasi atas rencana pengadaan Menyiapkan ruang penyimpanan arsip dokumen pengadaan Menyusun dan mengkodekan arsip dokumen pengadaan berdasarkan pemaketan dan tahun anggaran

Sumber : Desain SPIP Setditjen PPKL 2020

3.2.2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki 1 (satu) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2020, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian penyerapan anggaran Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mencapai 97,6%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,02 dan 1,00, yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta sudah efektif seperti tahun lalu. Capaian Kinerja Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 31-33.

Tabel 31. Capaian Kinerja Kabag Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Efektifitas Layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	1. Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL 2. Terselenggaranya Diklat PEDAL 3. Tersedianya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 4. Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL 5. Tersusunnya kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL 6. Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL 7. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL 8. Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL 9. Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL 10. Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL 11. Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL 12. Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	Layanan Laporan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Laporan Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2	15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2	15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rata-rata						100%	

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020

Tabel 32. Capaian Kinerja Kasubbag Administrasi Kepegawaian Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas Layanan Kepegawaian	1. Terselesaikannya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL 2. Terselenggaranya Diklat Pedal 3. Penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 4. Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL 5. Tersusunnya Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL 6. Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL 7. Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	Layanan Dokumen PAK Laporan Dokumen Laporan Laporan	15 1 10 1 2 1 1	15 1 20 1 1 1 1	15 1 150% 100% 100% 100% 100%

No.	Sasaran Unit Kerja		Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Rata-rata						107%	

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020

Tabel 33. Capaian Kinerja Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja		Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Efektifitas Layanan Penataan Organisasi Tata Laksana		1. Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Lingkup Ditjen PPKL	Birokrasi	Dokumen	1	1	100%
		2. Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL		Dokumen	1	1	100%
		3. Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL		Dokumen	1	1	100%
		4. Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL		Dokumen	1	1	100%
		5. Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT		Dokumen	2	2	100%
Rata-rata						100%	

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020

Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan pada uraian berikut:

1. Layanan Kepegawaian

Pelaksanaan layanan kepegawaian selama tahun 2020 sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 34.

Tabel 34. Kegiatan Layanan Kepegawaian Tahun 2020

No	Layanan Kepegawaian	Jumlah	Satuan
1	Pengajuan usulan kenaikan pangkat;	12	orang pegawai
2	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;	99	orang pegawai
3	Pengajuan cuti PNS sebanyak 39 orang terdiri dari cuti tahunan sebanyak 34 orang, cuti alasan penting 3 orang, cuti sakit sebanyak 1 orang, dan cuti besar 1 orang;	39	orang pegawai
4	Pengusulan penerimaan penghargaan satya lencana X tahun sebanyak 1 orang, satya lencana XX tahun sebanyak 0 orang, dan satya lencana XXX tahun sebanyak 0 orang;	1	orang pegawai
5	Pelaksanaan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (Dupak) bagi pejabat fungsional Pedal yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat dalam PEDAL;	32	orang pegawai
6	Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pedal;	14	Penetapan angka kredit (per November)
7	Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK)	23	Berita Acara (per November)
8	Sosialisasi dan pembinaan jabatan fungsional Pedal melalui Webinar yang diikuti oleh calon Pedal/Pedal seluruh indonesia ;	1080	Calon Pedal/Pejabat Fungsional Pedal
9	Bimbingan teknis jabatan fungsional PEDAL di wilayah P3E Sumatera;	1	Calon Pedal/Pejabat Fungsional Pedal
10	Pengusulan pencantuman GELAR S2 sebanyak 2 ;	2	orang pegawai
11	Pengusulan dokumen pensiun yang memasuki Batas Usia Pensiun/BUP sebanyak 3 orang pegawai, sedangkan untuk usulan pensiun janda sebanyak 1 orang;	3	orang pegawai
12	Pengelolaan aplikasi simpeg pegawai dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) lingkup Ditjen PPKL;	242	orang pegawai
13	Pengelolaan kehadiran pegawai secara elektronik sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.	242	orang pegawai

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020

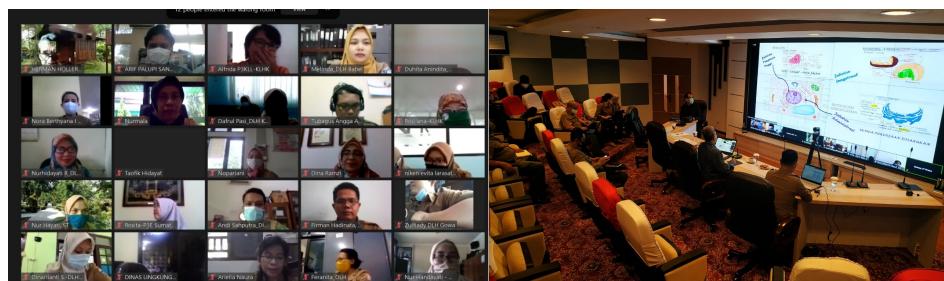
Uraian kegiatan Layanan Kepegawaian serta capaiannya masing-masing selama Tahun 2020 sebagai berikut:

- Pembinaan dan monitoring terhadap calon maupun pejabat fungsional PEDAL

Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020, bahwa salah

satu tugas instansi pembina terhadap jabatan fungsional adalah melakukan sosialisasi, evaluasi, pemantauan dan koordinasi terkait penerapan jabatan fungsional tertentu yang menjadi binaannya. Selain itu telah diterbitkan kebijakan baru terkait Jabatan Fungsional PEDAL (JF PEDAL) yaitu Permen PAN dan RB Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Tujuan dilaksanakan pembinaan serta monitoring pejabat fungsional adalah untuk melakukan pemantauan terhadap JF PEDAL yang sudah ada serta meningkatkan pemahaman dan kapasitas sebagai pejabat fungsional PEDAL serta memberikan pemahaman terhadap para Pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) tentang JF PEDAL. Monitoring dan pembinaan dilakukan terhadap pejabat fungsional PEDAL maupun yang masih calon pejabat fungsional PEDAL yang bekerja di beberapa unit kerja lingkup KLHK, kementerian/lembaga lainnya serta di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahun 2020 pembinaan dilaksanakan dengan cara daring dengan menyelenggarakan webinar dengan tema "Mengembangkan Karir melalui Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)". Peserta yang hadir berasal dari pejabat fungsional PEDAL, calon pejabat fungsional PEDAL, instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Kepegawaian Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 1.080 orang. Para narasumber webinar ini berasal dari tokoh bidang lingkungan dan reformasi birokrasi yaitu Ir. Sarwono Kusumaatmaja; Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah; Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL, Sigit Reliantoro; Direktur Jabatan ASN BKN, Aidu Tauhid; Direktorat Jenderal Anggaran Kemkeu, Satya susanto dan Sukrasno; serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Menpan RB, Moh.



Firdaus Wahyu Rohman.

Gambar 49. Webinar Pengembangan Karir Melalui Jabatan Fungsional PEDAL
(Sumber : Program & Evaluasi, 2020)

Adapun pembinaan melalui media sosial, dilakukan dengan dibentuknya komunitas group pada beberapa media sosial. Proses pembinaan dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi terkait dengan penerapan JF PEDAL serta pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku. Begitu pula halnya melalui sarana telekomunikasi, pembinaan dilakukan langsung melalui percakapan telephone. Pembinaan seperti hal tersebut diatas, sangat efektif dilakukan di masa pandemic Covid-19.

b. Penilaian Draft Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) JF PEDAL

Ditjen PPKL melakukan penilaian angka kredit JF PEDAL sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 18 orang dan daerah sebanyak 24 orang. Penilaian dilakukan berdasarkan klasifikasi jenjang jabatan, yaitu jenjang Keterampilan sebanyak 2 orang dan jenjang Keahlian sebanyak 40 orang.

c. Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL

Untuk menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak lingkungan, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 tahun 2002 dan Nomor 22 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jafung PEDAL dan Angka Kreditnya. Selanjutnya KLHK selaku instansi Pembina JF PEDAL akan menyusun petunjuk teknis JF PEDAL dan peraturan terkait, antara lain: (1) Penyusunan dokumen lampiran penetapan kelas jabatan JF PEDAL ahli madya; dan (2) Penyusunan konsep revisi tunjangan JF PEDAL.

d. Sebaran Pejabat Fungsional PEDAL

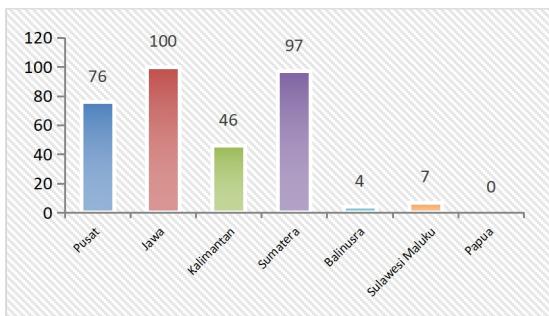
Pada tahun 2020 jumlah pejabat fungsional Pedal mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan JF PEDAL menjadi pilihan aparatur sipil negara sebagai pola pengembangan karirnya. Adapun meningkatnya jumlah pejabat fungsional tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- (1) Pola penerimaan CPNS melalui formasi jabatan fungsional tertentu;
- (2) Pemahaman terhadap JF sebagai alternatif pengembangan karir PNS semakin baik;
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah terkait penyetaraan jabatan;
- (4) Perbaikan kebijakan terkait jabatan fungsional tertentu.

Tabel 35. Sebaran JF Pedal dan Calon JF Pedal Berdasarkan Wilayah Ekoregion dan Jenjang Jabatan

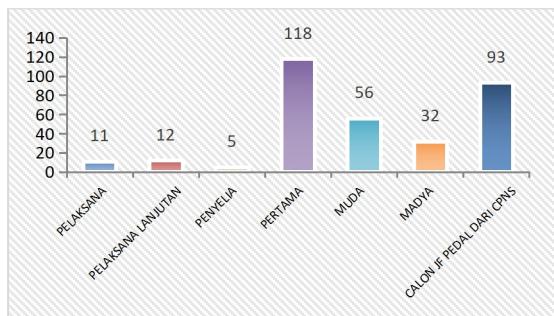
Wilayah	Pelaksana	pelaksana lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	Jumlah jf pedal	Calon jf pedal dari cpns/inpasing	Jumlah jf dan calon jf pedal
Pusat	4	7	2	13	26	15	3	70	6	76
Jawa	3	2	3	31	15	3	0	57	43	100
Kalimantan	3	0	0	25	3	3	0	34	12	46
Sumatera	1	2	0	49	12	11	0	75	21	96
Balinusra	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Sulawesi Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	11	5	118	56	32	3	237	93	330

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020



Gambar 50. Sebaran JF dan Calon JF PEDAL Berdasarkan Wilayah

(Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020)



Gambar 51. Pejabat Fungsional dan Calon Pejabat Fungsional PEDAL

(Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020)

e. Peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan oleh Ditjen PPKL maupun mengirim peserta pada kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain. Pada tahun 2020, peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis dan Ujian Nasional Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar gelombang 1 dan 2 sebanyak 40 orang; serta Diklat bendahara sebanyak 2 (dua orang) yang dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Keuangan.

f. Sosialisasi Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Kepegawaian

Pengelolaan dan proses kepegawaian memasuki era digitalisasi sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Hampir semua layanan kepegawaian telah dilakukan secara digital seperti penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Penetapan Pangkat Otomatis (PPO), Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO). Sistem layanan PPO dan KPO sudah dilaksanakan BKN sejak tahun 2015 dengan mengacu kepada Perka BKN Nomor 25 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah dan Perka BKN Nomr 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah. BKN juga melakukan terobosan dalam mempermudah dan mempersingkat layanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat. Namun demikian dibutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak terutama PNS itu sendiri untuk terus melakukan pemutakhiran data SIMPEG sehingga Pejabat pembina Kepegawain (PPK) dapat dengan mudah melakukan rekonsiliasi data melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK akan mengintegrasikan Absensi SIKADIR dengan SIMPEG KLHK dan selanjutnya SIMPEG KLHK akan diintegrasikan dengan SAPK BKN sehingga akan memudahkan Biro Kepegawaian dalam melakukan proses-proses kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan pengusulan penganugerahan satya lencana karya satya.

g. Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai diawali dengan pengarahan untuk penyusunan indikator kinerja individu melalui penyusunan pohon kinerja. Selanjutnya

indikator kinerja individu tersebut dituangkan menjadi rencana aksi yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Monev Ditjen PPKL. Sosialisasi pemanfaatan E-Monev Ditjen PPKL untuk memantau kinerja individu dilaksanakan secara virtual. Selanjutnya masing-masing pegawai dapat melakukan pelaporan secara mandiri kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, pembinaan pegawai dilaksanakan dengan mengikutsertakan para CPNS formasi JF PEDAL dan JF Perencana kedalam diklat pembentukan jabatan fungsional tersebut. Diklat Pembentukan JF PEDAL dilaksanakan 2 (dua) angkatan yang diikuti sebanyak 23 orang. Diklat pembentukan jabatan fungsional perencana dilaksanakan di Pusat Pembinaan Diklat Perencana (PUSBINDIKLATREN) di Bapenas dan diikuti sebanyak 4 (empat) orang CPNS JF Perencana.

2. Layanan Penataan Organisasi Tata Laksana

Uraian kegiatan layanan penataan organisasi tata laksana serta capaiannya masing-masing selama tahun 2020 sebagai berikut:

a. Penyusunan Tugas Dan Fungsi serta Struktur Organisasi Lingkup KLHK

Kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi juga dilakukan di KLHK dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang KLHK. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang KLHK. Pada lingkup Ditjen PPKL, terdapat perubahan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi serta dirampingkannya struktur organisasi pada level eselon IV.

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut merupakan arahan dan amanah yang dikeluarkan oleh Presiden untuk seluruh kementerian dalam rangka percepatan pelaksanaan birokrasi. Sehingga diharapkan, dengan perampingan tersebut, organisasi dapat bergerak dengan cepat dan gesit dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.

b. Penyusunan Proses Bisnis Lingkup Ditjen PPKL

Peta proses bisnis di KLHK telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis KLHK. Ditjen PPKL telah menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Ditjen PPKL Nomor 42 tahun 2018 tentang Peta Lintas Fungsi Ditjen PPKL. Peraturan Menlhk dalam kedudukannya dalam peta proses bisnis berada pada level 0 dan 1 sedangkan Perdirjen PPKL berada pada level 2.

Sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi pemerintah, saat ini sedang dilakukan evaluasi mengenai struktur organisasi KLHK yang terbentuk melalui Permenlhk Nomor 18 tahun 2015. Evaluasi organisasi juga dilaksanakan pada level eselon I yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen. Dalam upaya untuk melakukan perubahan struktur organisasi baik di lingkup kementerian maupun Dirjen, perlu dilakukan penyusunan proses bisnis yang baru sehingga memudahkan dalam menentukan struktur dan fungsi organaisasi yang baru.

Adapun susunan draft Proses Bisnis Unit Lingkup Ditjen PPKL Mulai dari level 2, 3, dan 4 dapat dilihat pada Tabel 36 sebagai berikut :

Tabel 36. Draft Proses Bisnis Unit Lingkup Ditjen PPKL

Bispro pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut		
Level 2	Level 3	Level 4
LHK-05.01 Pengendalian Kerusakan Gambut LHK-05.01 Pengendalian Kerusakan Gambut	LHK-05.01.A Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.01.A.1 Inventarisasi Ekosistem Gambut 2. LHK-05.01.A.2 Penetapan Fungsi Dan Kondisi Ekosistem Gambut 3. LHK-05.01.A.3 Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 4. LHK-05.01.A.4 Pemantauan Dan Evaluasi Rencana PPEG
	LHK-05.01.B Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.01.B.1 Penyusunan Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. LHK-05.01.B.2 Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut 3. LHK-05.01.B.3 Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut 4. LHK-05.01.B.4 Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut
Bispro pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Pesisir dan Laut		
Level 2	Level 3	Level 4
LHK-05.02 Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Laut Pesisir	LHK. 05.02.A Pencegahan Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	LHK. 05.02.A.1 Perencanaan PPKPL
	LHK. 05.02.B Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	LHK. 05.02.B.1 Penanggulangan Pencemaran Berbasis Daratan
	LHK. 05.02.C Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut	LHK. 05.02.C.1 Pemulihan Terumbu Karang
Bispro pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air		
Level 2	Level 3	Level 4
LHK-05.03 Pengendalian Pencemaran Air	LHK. 05.03.A Pencegahan Pencemaran air	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.03.A.1. Perencanaan PPA 2. LHK.05.03.A.2. Kerjasama PPA 3. LHK.05.03.A.3. Evaluasi PPA 4. LHK.05.03.A.4. Penyusunan Kebijakan PPA 5. LHK.05.03.A.4. Pembinaan PPA 6. LHK.05.03.A.4. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Injeksi
	LHK. 05.03.B Peanggulangan Pencemaran air	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.03.B.1. (tidak ada) 2. LHK.05.03.B.2. Penanganan Pencemaran Air 3. LHK.05.03.B.3. Pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Pencemaran Air
	LHK. 05.03.C Pemulihan Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.03.C.1. Pembangunan Infrastruktur Pemulihan Pencemaran Air 2. LHK.05.03.C.2. Pemberdayaan Masyarakat
	LHK. 05.03.C Penetapan Status Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.03.D.1. Pemantauan PPA Industri Manual 2. LHK.05.03.D.2. Pemantauan PPA Industri Otomatis 3. LHK.05.03.D.3. Pemantauan PPA Badan Air Manual 4. LHK.05.03.D.4. Pemantauan PPA Badan Air Otomatis 5. LHK.05.03.D.5. Inventarisasi Sumber Pencemaran 6. LHK.05.03.D.6. Alokasi Beban Pencemaran
Bispro pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara		
Level 2	Level 3	Level 4
LHK-05.04 Pengendalian Pencemaran Udara	LHK. 05.04.A Perencanaan PPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.04.A.1. Inventarisasi Emisi 2. LHK.05.04.A.2. Penetapan Wilayah Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Udara 3. LHK.05.04.A.3. Perumusan Kebijakan 4. LHK.05.04.A.4. Perencanaan PPU 5. LHK.05.04.A.4. Monitoring dan Evaluasi
	LHK. 05.04.B Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.04.B.1. Penurunan Tingkat Pencemaran Udara 2. LHK.05.04.B.2. Pemberian Bimtek Sumber Pencemar Dan Sektor 3. LHK.05.04.B.3. Pemantauan Kualitas Udara 4. LHK.05.04.B.4. Evaluasi Penerapan Pelaksanaan Kebijakan
	LHK. 05.04.C Penetapan Status Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK.05.04.C.1. Penyediaan Data Dan Informasi 2. LHK.05.04.B.2.Pnenetapan IKU dan ISPU 3. LHK.05.04.B.3. Status Kinerja Industri 4. LHK.05.04.TU
Bispro pada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		
Level 2	Level 3	Level 4
LHK-05.05 Pengelolaan Kerusakan Lahan	LHK-05.05.A Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.05.A1 Penyusunan NSPK 2. LHK-05.05.A2 Pemutakhiran Data Kerusakan Lahan 3. LHK-05.05.A3 Penyusunan IKTL 4. LHK-05.05.A4 Penyusunan Rencana Aksi 5. LHK-05.05.A5 Evaluasi Keberhasilan Pemulihan Kerusakan Lahan
	LHK-05.05.B Pemulihan Kerusakan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.05.B1 Penyusunan NSPK 2. LHK-05.05.B2 Penyusunan DED 3. LHK-05.05.B3 Pembentukan Kelembagaan 4. LHK-05.05.B4 Pelaksanaan Pemulihan
	LHK-05.05.C Pemulihan Kerusakan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.05.C1 Pemetaan Perusahaan 2. LHK-05.05.B4 Pelaksanaan MIH
Bispro pada PROPER		

Level 2	Level 3	Level 4
LHK-05.06 Penilaian Kinerja Perusahaan Terkait Pengelolaan Lingkungan	LHK-05.06.A Persiapan Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.06.A1 Penetapan Tim Teknis dan Pelaksanaan 2. LHK-05.06.A2 Peningkatan Kapasitas TIM Proper 3. LHK-05.06.A3 Penetapan Peserta Proper 4. LHK-05.06.A4 Sosialisasi 5. LHK-05.06.A5 Pengumpulan Data
	LHK-05.06.B Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.06.B1 Evaluasi Data 2. LHK-05.06.B2 Verifikasi Lapangan 3. LHK-05.06.B3 Penyusunan Raport Sementara 4. LHK-05.06.B4 Supervisi 5. LHK-05.06.B5 Review Peringkat Sementara
	LHK-05.06.C Pemeringkatan penilaian Kinerja Perusahaan Terkait Pengelolaan LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHK-05.06.C1 Penentuan Peringkat Sementara 2. LHK-05.06.C2 Sanggahan 3. LHK-05.06.C3 Review Pringkat Akhir 4. LHK-05.06.C4 Evaluasi Proper Hijau 5. LHK-05.06.C5 Evaluasi Proper Emas 6. LHK-05.06.C6 Pemeringkatan Akhir 7. LHK-05.06.C7 Pengumuman Proper

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020

c. Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pelaksanaan analisis beban kerja dilakukan agar tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme aparatur yang memadai pada setiap unit kerja serta mampu melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan melalui tugas dan fungsinya. Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan tolok ukur bagi pegawai/unit dalam pembagian tugas dan melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pelayagunaan aparatur baik dari segi kelembagaan ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan. Seiring dengan terbitnya peraturan KepmenPAN RB Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis jababatan dan Analisis Beban Kerja, maka perlu dilakukan Sosialisasi kepada seluruh unit kerja, akan tetapi penyusunan analisis jabatan di PPKL baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya peraturan terkait perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana.

d. Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Asistensi Pengisian Lembaran Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Lingkup Direktorat Jenderal PPKL.

Evaluasi PMPRB dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2020. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 menyempurnakan 2 hal yaitu : (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Ditjen PPKL melakukan Rapat Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan Asistensi Pengisian LKE PMPRB sekaligus berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Internal untuk melengkapi data dukung yang diperlukan.

e. Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020

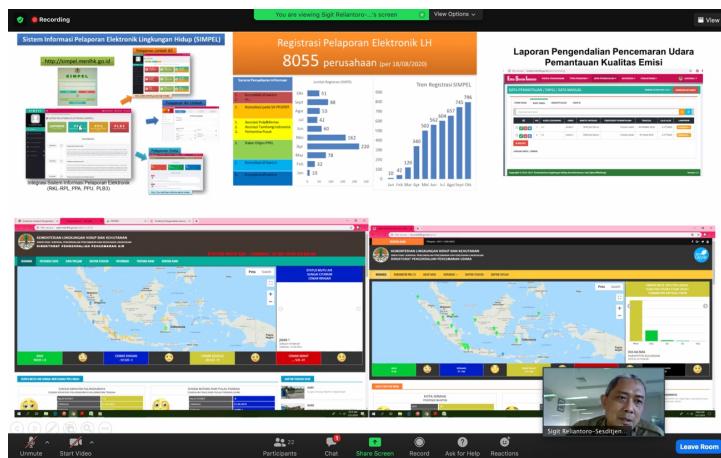
Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL tahun 2020, memperoleh nilai sebesar 31,01 poin dengan rincian: aspek pemenuhan sebesar 13,12 poin dan aspek reform sebesar 17,89 poin. Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL Tahun 2020

Komponen			Bobot	Nilai
Pengungkit			36,30	31,01
I. Pemenuhan			14,60	13,12
	1	Manajemen perubahan	2,00	2,00
	2	Deregulasi kebijakan	1,00	1,00
	3	Penataan dan penguatan organisasi	2,00	2,00
	4	Penataan tatalaksana	1,00	0,86
	5	Penataan sistem manajemen sdm	1,40	1,22
	6	Penguatan akuntabilitas	2,50	2,50
	7	Penguatan pengawasan	2,20	1,88
	8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2,50	1,67
II. Reform			21,70	17,89
	1	Manajemen perubahan	3,00	2,25
	2	Deregulasi kebijakan	2,00	1,50
	3	Penataan dan penguatan organisasi	1,50	1,50
	4	Penataan tatalaksana	3,75	2,61
	5	Penataan sistem manajemen sdm	2,00	1,75
	6	Penguatan akuntabilitas	3,75	3,00
	7	Penguatan pengawasan	1,95	1,95
	8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	3,75	3,34

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020

Hasil penilaian mandiri tersebut akan divalidasi oleh tim dari MenPANRB, sehingga nilai tersebut masih sementara. Apabila melihat hasil penilaian mandiri nilai komponen Pengungkit sebesar 31,01 poin dimana nilai ideal yang harus dicapai yaitu 36,30 poin, maka persentase capaian dari upaya yang telah dilakukan mencapai 85,42%.



Gambar 52. Presentasi Sekretaris Ditjen PPKL pada Pelaksanaan Evaluasi RB Lingkup Ditjen PPKL

(Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2020)

3.2.3. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum memiliki 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2020, semua target dapat tercapai sehingga capaian kinerja rata-rata sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Keuangan dan Umum tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 38 – Tabel 41. Capaian penyerapan anggaran Bagian Keuangan dan Umum mencapai 97,1%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,01 dan 0,95 yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta sudah cukup efektif dibandingkan tahun lalu.

Tabel 38. Capaian Kinerja Kabag Keuangan dan Umum Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya laporan Keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi tingkat UAKPA) 2. Tingkat kepuatan penyajian administrasi pengelolaan anggaran 3. Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi keuangan dan umum 4. Terselenggaranya layanan umum dan kerumah tanggaan 5. Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/Ketatausahaan 6. Terlaksananya pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	18 1 1 1 1	18 1 1 1 1	100% 100% 100% 100% 100%
Rata-rata						100%

(Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020)

Tabel 39. Capaian Kinerja Kasubbag Administrasi Keuangan Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas pelayanan administrasi keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Laporan Keuangan semester I, Pseudo, Tahunan tingkat Eselon I dan UAKPA 2. Tersedianya Rekonsiliasi UAKPA 3. Terselenggaranya optimisasi pengelolaan	Dokumen Dokumen Laporan	6 12 1	6 12 1	100% 100% 100%

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		anggaran				
		4. Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	Laporan	1	1	100%
		5. Terlaksananya pembayaran pengelola administrasi keuangan	Dokumen	12	12	100%
		6. Terselenggaranya penyegaran bendahara	Laporan	1	1	100%
		7. Tersedianya dokumen pencairan anggaran	Dokumen	100%	100%	100%
		8. Terlaksananya pembayaran gaji PPNPN	Dokumen	13	13	100%
		9. Terlaksananya pembayaran gaji, kekurangan gaji dan uang makan	Dokumen	26	26	100%
		10. Terlaksananya pembayaran tunjangan kinerja	Dokumen	13	13	100%
		Rata-rata				100%

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Tabel 40. Capaian Kinerja Kasubbag Tata Usaha Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas pelayanan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1) Terlaksananya kegiatan Eco Office	Laporan	1	1	98%
		2) Terlaksananya Pembinaan Ketatausahaan	Kegiatan	1	1	100%
		3) Terlaksananya layanan Persuratan dan Karsipan	Laporan	1	1	100%
		4) Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik	Laporan	1	1	100%
		5) Terlaksananya Pengelolaan Karsipan	Laporan	1	1	100%
		6) Tersedianya layanan penggunaan ruang rapat, jamauan konsumsi bersama fasilitas yang diperlukan	Laporan	1	1	100%
		7) Terlaksananya kegiatan pimpinan	Laporan	1	1	100%
		8) Terlaksananya kegiatan pencegahan Covid-19	Laporan	1	1	100%
		Rata-rata				99,75%

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Tabel 41. Capaian Kinerja Kasubbag Perlengkapan Tahun 2020

No	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas Pelayanan Perlengkapan	1. Tersedianya Laporan Penatausahaan BMN	Laporan	3	3	100%
		2. Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Persediaan	Laporan	2	2	100%
		3. Terlaksananya pembinaan BMN dan layanan umum berupa keamanan dan kebersihan	Laporan	1	1	100%
		4. Tersedianya dukungan operasional berupa penyediaan dan perawatan kendaraan dinas, dan renovasi ruang	Laporan	4	4	100%
		Rata-rata				100%

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan pada uraian berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tingkat Eselon I Ditjen PPKL mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ditjen PPKL. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu penggabungan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial. Laporan keuangan adalah hasil akumulasi seluruh satuan kerja lingkup Ditjen PPKL yaitu Satuan Kerja di Pusat (2 Satker) dan Satuan Kerja Dekonsentrasi (7 satker Daerah).

LK Tingkat Eselon I telah tersusun sebanyak 3 (tiga) laporan, yaitu: LK Tahunan Audited Tahun 2019, LK Semester I Tahun 2020, LK Triwulan III Tahun 2020 (Gambar 53). Satker Setditjen PPKL telah menyusun LK tingkat satker (tingkat UAKPA) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LK Tingkat UAKPA yang sudah tersusun sebanyak 3 (tiga) laporan, meliputi: LK Tahunan Audited Tahun 2019, LK Semester I Tahun 2020, LK Triwulan III Tahun 2020. Selain Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I, dilakukan juga Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dengan KPPN secara online. Laporan Rekonsiliasi dimaksud berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Satuan Kerja dan KPPN yang telah ditandatangani secara elektronik. BAR yang telah tersedia sampai saat ini adalah BAR bulan Desember 2019 – November 2020.



Gambar 53. Rapat Penyusunan LK Triwulan III dan LK Tahun 2019

2. Penyusunan Laporan BMN

Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan (kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang), inventarisasi (terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN), dan pelaporan BMN (terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan).

Pemutakhiran hasil penatausahaan BMN dan Persediaan dilaporkan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang terkoneksi internet berupa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan akan digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN secara mandiri. Penatausahaan BMN yang telah dilakukan meliputi:

- a. Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Satuan Kerja Setditjen PPKL periode Audited Tahun 2019;
- b. Laporan Likuidasi Barang Milik Negara (BMN) lingkup Satuan Kerja Setditjen PPKL periode Juni Tahun 2020;
- c. Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Satuan Kerja Ditjen PPKL periode Semester I Tahun 2020 terdiri atas Laporan Neraca,

Intrakomptabel, ekstrakomptabel, gabungan, laporan aset tak berwujud, akumulasi penyusutan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CRBMN);

- d. Laporan persediaan lingkup Satuan Kerja Setditjen PPKL periode Audited Tahun 2019;
- e. Laporan Likuidasi persediaan lingkup Satuan Kerja Setditjen PPKL periode Bulan Juni Tahun 2020;
- f. Laporan persediaan lingkup Satuan Kerja Ditjen PPKL periode Semester I Tahun 2020 terdiri atas Laporan Persedian dan Berita Acara Opname Fisik. Berdasarkan hasil laporan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Eselon I di neraca per tanggal 30 September 2020 untuk Satker PPKL senilai Rp. 206.987.036.311,- dengan rincian seperti pada Tabel 42.

Tabel 42. Laporan Penatausahaan BMN Tingkat Eselon I Tahun 2020

URAIAN	Nilai (Rp)
Barang Konsumsi	184.155.475,-
Tanah Bangunan ke masyarakat	97.138.381.628,-
Hewan tanamanke masyarakat	962.874.000,-
peralatan mesin ke masyarakat	1.839.327.500,-
Jalan Irigasi Jalan ke masyarakat	0
persediaan lainnya ke masyarakat	21.548.861.493,-
Jumlah Persediaan	121.673.600.096,-
Peralatan dan mesin	88.200.848.074,-
Gedung dan bangunan	701.924.350,-
Jaringan	50.050.000,-
Aset tetap renovasi	2.860.974.304,-
Aset tetap lainnya	50.270.000,-
Konstruksi dalam penggerjaan	23.134.812.200,-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	- 30.068.283.452,-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	- 17.800.847,-
Akumulasi Penyusutan jaringan	- 10.010.000,-
Software	768.844.170,-
Aset tetap yang tidak digunakan	294.026.000,-
Akumulasi Penyusutan aset tetap tidak digunakan dan mesin	- 169.521.000,-
Akumulasi amortisasi software	- 482.697.584,-
Jumlah Simak BMN	85.313.436.215,-

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum, 2020

3. Layanan Umum Berupa Keamanan dan Kebersihan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain peningkatan kapasitas pengelolaan keamanan dan layanan umum lingkup Ditjen PPKL. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keamanan dan pelayanan internal, dalam rangka penilaian seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan protokol kesehatan. Hasil evaluasi tersebut meliputi:

- a) Pemasangan alat penguapan desinfektan dan pengukur suhu badan pegawai di lantai 1 sebagai upaya pencegahan *Covid-19* (Gambar 54 dan 55);

- b) Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembinaan Layanan Kantor lingkup Ditjen PPKL (Gambar 56);
- c) Pelayanan ruang rapat dilakukan dengan mengadakan jamuan konsumsi yang memadai dan tidak menggunakan bahan plastik;
- d) Pembagian masker dan sanitizer spray kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen PPKL guna mengantisipasi dan pencegahan *Covid-19*;



Gambar 54. Pemasangan alat penguapan desinfektan



Gambar 55. Pemasangan alat pengukur suhu badan



Gambar 56. Pembinaan Layanan Kantor lingkup Ditjen PPKL

4. Dukungan Operasional Berupa Penyediaan dan Perawatan Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Renovasi Ruangan

Dukungan operasional yang telah dilakukan pada Tahun 2020 meliputi :

- a) Mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan dan Penilaian BMN yang dihapuskan berupa penghapusan Kendaraan Operasional sejumlah 3 Unit ke KPKNL Jakarta II;
- b) Mengajukan Surat permohonan Penilaian dan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang 1 unit ke KPKNL Jakarta II;
- c) Perawatan kendaraan sudah dilakukan untuk kendaraan roda empat dan roda dua serta dilakukan penambahan Kendaraan Operasional roda empat sebanyak 7 unit dan roda dua sebanyak 5 unit;
- d) Pengadaan alat operasional kantor meliputi :
 - Video Wall pada Ruang Rapat Kalpataru Lantai 2 gedung B Kebon Nanas;
 - Laptop, Wacom, TV & Bracket pada Ruang Rapat lantai 2 dan lantai 4 (Gambar 57);
 - AC, Kursi Rapat dan Meja Rapat pada Ruang Rapat lantai 2;
- e) Renovasi ruangan dan taman meliputi :
 - Penataan Ruang Kerja Pejabat dan Staf pada Direktorat;
 - Penataan Ruang Rapat dan Fasilitas Lainnya di lantai 2 dan lantai 6;
 - Perbaikan/penggantian Taman Dakting lantai 2;

- Perbaikan/penggantian Kain Kubikel pada Ruang Kerja Dirjen PPKL lt 4;
- Perbaikan Taman Ruang Diskusi Terbuka di lantai 2;
- Perbaikan/permintaan Tanaman dan Taman Pintu Masuk dan Keluar gedung kantor Kebon Nanas.



Gambar 57. Pengadaan Alat Operasional Kantor Ditjen PPKL

5. Pelaksanaan Kegiatan *Eco Office*

Eco-Office merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mewujudkan kantor yang ramah lingkungan, dengan menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman serta menyehatkan. Setiap orang yang bekerja memerlukan kenyamanan, sehingga lingkungan kerja yang nyaman juga bisa meningkatkan kinerja. Sasaran diterapkannya Eco Office tersebut adalah mengubah sikap dan perilaku individu kantor untuk lebih peduli lingkungan dan melakukan penghematan biaya operasional kantor terkait aspek lingkungan. Pada tahun 2020 Ditjen PPKL telah menyusun draft Pedoman *Eco Office*, hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Namun penerapan Program *Eco Office* di kantor Ditjen PPKL telah dilakukan diantaranya adalah:

- a) Mewajibkan penggunaan kertas pada 2 sisi, sebagai salah satu upaya untuk menghemat kertas dan mulai menggunakan penyebaran undangan/dokumen secara elektronik;
- b) Melarang penggunaan sedotan plastik, kantong plastik, stayrofoam, gelas sekali pakai, kemasan kotak makanan dan gelas/botol air mineral sekali pakai, serta membudayakan penggunaan botol minuman sendiri;
- c) Mengatur aliran listrik menggunakan saklar agar tidak terpusat sehingga listrik dinyalakan pada area-area tertentu saja. Hal ini dapat turut mewujudkan langkah penghematan energi. Selain itu lampu yang ada diganti menggunakan lampu hemat energi;
- d) Membuat taman-taman di lahan-lahan yang ada di sekitar kantor untuk menambah estetika dan menciptakan iklim mikro yang sehat;
- e) Mengganti dan merawat tanaman yang diletakkan di dalam ruangan secara berkala. Selain menambah estetika, juga dapat membantu menambah kadar oksigen di dalam ruangan sehingga menjadi lebih sehat;
- f) Merawat secara berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah agar berfungsi optimal untuk mengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke sungai;
- g) Menyediakan tempat sampah terpisah sehingga mendorong pegawai untuk membuang sampah secara terpisah. Kegiatan ini membantu memudahkan petugas kebersihan dalam membersihkan ruangan dan mengelola sampah organik menjadi kompos yang terdapat di areal kantor.

6. Pembinaan Ketatausahaan, Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Rumah Tangga

Pembinaan ketatausahaan dan pengelolaan kearsipan ada 4 (tiga) jenis kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan tata persuratan, pembinaan tata kearsipan, rekonstruksi arsip, pemindahan arsip inaktif ke Pusat Arsip Cimanggis dan (Gambar 58). Sedangkan untuk pelayanan rumah tangga, kegiatan yang dilakukan antara lain: penyediaan minum pejabat dan karyawan, penyediaan jamuan rapat, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan serta menjaga kebersihan ruang kerja. Selain itu, pada tahun anggaran 2020 telah dilakukan pembayaran honorarium sebagai kompensasi kerja pegawai non PNS sebanyak 65 orang.



Gambar 58. Kegiatan Ketatausahaan

7. Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik

Pada tahun 2020, Biro Umum KLHK telah menyempurnakan Tata Naskah Dinas Elektronik dalam versi 6 atau dikenal dengan Sistem Informasi Kearsipan Versi 6 (SIKv6). Aplikasi ini pengembangan sistem pengagendaan surat masuk dan penomoran naskah dinas elektronik beserta pengarsipan yang terintegrasi seluruh KLHK. Ditjen PPKL telah melaksanakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan SIKv6.

Pengelolaan surat masuk dari bulan Januari-Desember 2020 yang diterima oleh Dirjen PPKL sebanyak 1.924 surat dan Setditjen PPKL sebanyak 1.628 surat, telah didistribusikan sesuai petunjuk pimpinan, sedangkan jumlah surat keluar dari bulan Januari-Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh Dirjen PPKL sebanyak 851 naskah dinas dan oleh Setditjen PPKL sebanyak 1536 naskah dinas.

8. Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Covid-19

Pandemi Covid-19 secara tidak terduga melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu, sistem kerja dan pola hidup masyarakat termasuk pegawai kantor Ditjen PPKL berubah, mengikuti himbauan yang diterapkan pemerintah. Sistem kerja berubah menjadi lebih banyak dilakukan di rumah dan melakukan pertemuan secara daring menggunakan teknologi yang tersedia. Sistem piket mulai diberlakukan sejak bulan Maret 2020 dengan batasan jam kerja menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara daring. Pembatasan tamu yang berkunjung ke kantor Ditjen PPKL semakin diperketat dengan aturan wajib membawa hasil test

negatif Covid-19. Selain itu, tamu yang berkunjung hanya dapat diterima di lantai I dan II dengan protokol Kesehatan yang sangat ketat.

Fasilitas dan peraturan yang sangat ketat diterapkan di kantor Ditjen PPKL. Penyediaan tempat cuci tangan di pintu masuk terdapat sebanyak 3 fasilitas, sterilisasi barang bawaan wajib dilakukan di box sterilisasi, pengecekan suhu badan secara otomatis, aturan tidak menyentuh tombol lift secara langsung dan membatasi jumlah pengguna lift, serta mengatur jalur keluar masuk pegawai. Selain itu, penyemprotan ruang kerja dan pemeriksaan kesehatan pegawai dilakukan secara berkala. Kewajiban bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus melakukan test kesehatan dan karantina mandiri sampai hasil test keluar dan menunjukkan hasil negatif.

3.2.4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik memiliki 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2020, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 118%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 43 – Tabel 45. Capaian penyerapan anggaran Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mencapai 92,7%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,24 dan 1,04, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta sudah efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 43. Capaian Kinerja Kabag Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum , serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dokumen	67	72	107%
		Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	Dokumen	60	95	150%
		Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	4	4	100%
		Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	Dokumen	20	31	150%
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Laporan	1	1	100%
2.	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Sekretariat PROPER	Industri	2036	2039	101%
Rata-rata						118%

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Tabel 44. Capaian Kinerja Kasubbag Hukum Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum	Penataan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dokumen	67	72	107%
		Fasilitasi Layanan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi	Dokumen	60	95	150%
		Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4	100%
Rata-rata						119%

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Tabel 45. Capaian Kinerja Kasubbag Kerja Sama Teknik Tahun 2020

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektifitas fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	Dokumen	20	31	150%
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Laporan	1	1	100%
2	Efektifitas Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya sekretariat PROPER	Industri	2036	2039	101%
Rata-rata						117%

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan *output* yang dihasilkan yaitu:

1. Pemrosesan Rancangan Peraturan Peraturan-undangan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pelaksanaan penataan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan kegiatan pelayanan kepada unit Eselon II lingkup Ditjen PPKL. Rangkaian kegiatannya terdiri dari penelaahan, penyiapan bahan koordinasi, dan koordinasi penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan Penataan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah 67 (enam puluh tujuh) rancangan dengan hasil capaian sebanyak 72 (tujuh puluh dua) rancangan.

Capaian kinerja pada kegiatan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPP PPMA) dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPP PPMU). Status terakhir dari masing-masing RPP tersebut di tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1) RPP Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air telah dalam Proses harmonisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - 2) RPP Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sampai dengan Desember 2020 telah menyelesaikan tahapan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan melalui surat Direktur Jenderal PPKL nomor: S.230/PPKL/SET/Kum1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 telah disampaikan permohonan Harmonisasi kepada Sekretaris Jenderal KLHK.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Asia Timur) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Sebagai Dampak Aktivitas

Pertambangan. Status terakhir dari masing-masing RPP tersebut di tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Asia Timur) telah selesai proses pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini rancangan final sedang dalam proses permohonan paraf persetujuan di Kementerian KLHK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
- 2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Sebagai Dampak Aktivitas Pertambangan saat ini dalam proses koordinasi dan sinkronisasi pengaturan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RapermenLHK). Ada sebanyak 4 (empat) RapermenLHK yang diproses dan telah diundangkan di tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 46 berikut ini.

Tabel 46. Daftar Peraturan Menteri

No	Nama Peraturan Menteri	Unit Pengusul	Status
1.	Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua	BRG	P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020 tanggal 5 Februari 2020
2.	Indeks Standar Pencemar Udara	PPU	P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020
3.	Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Daur Ulang Baterai Lithium	PPU	Disampaikan kepada Rokum melalui Surat Nomor: S.765/SET/HKST/KUM.1/12/2020 disampaikan tanggal 30 Desember 2020
4.	Perubahan Ketiga Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	PPA	Disampaikan kepada Rokum melalui Surat Nomor: S.764/SET/HKST/KUM.1/12/2020 disampaikan tanggal 30 Desember 2020
5.	Baku Mutu Emisi Mesin Pembakaran Dalam atau Genset	PPU	Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum dan proses perbaikan oleh unit pengusul melalui ND:
6.	Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK)	PPU	Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum dan proses perbaikan oleh unit pengusul melalui ND:

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

- d. Pengurusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rancangan Kepmen LHK yang diproses sebanyak 7 (tujuh). Capaian penyelesaian Rancangan KepmenLHK di tahun 2020 sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen. Adapun penyelesaian rancangan Keputusan Menteri LHK terbagi menjadi 3 (tiga) jenis:
 - 1) Keputusan Menteri LHK yang diajukan berdasarkan tugas dan fungsi Ditjen PPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2) Keputusan atas nama Menteri LHK sebagai tindak lanjut delegasi dalam Pasal 5 Peraturan Menteri LHK Nomor:

P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut; dan

3) Keputusan atas nama Menteri LHK sebagai tindak lanjut delegasi dalam Pasal 6 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.

Daftar rancangan Keputusan Menteri LHK secara rinci tertera dalam Tabel 47 berikut.

Tabel 47. Daftar Rancangan Keputusan Menteri LHK

No	Nama Keputusan Menteri	Unit Pengusul	Status
1	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Saddang	PPA	SK.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tanggal 9 Januari 2020
2	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Seraya	PPA	SK.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tanggal 9 Januari 2020
3	Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan Persiden tentang Pengesahan <i>Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnership in Environmental Management of the Seas of East Asia</i> (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Laut Asia Timur)	PPKPL	SK.221/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2020 tanggal 12 Mei 2020
4	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional	PKG	SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tanggal 9 Juni 2020
5	Perubahan Keputusan Menteri LHK No. 1049/Menlhk/Setjen/PLK.4/6/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2019	Setditjen PPPL	SK.269/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tanggal 25 Juni 2020
6	Kelompok Kerja Penataan Ekosistem Gambut Kegiatan Pengembangan Lahan Pangan Nasional Terpadu Tahun 2020 - 2022	PKG	SK. 408/Menlhk/Setjen/Kum.0/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020
7	Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2020	Setditjen PPPL	SK. 460/Menlhk/Setjen/Kum.0/10/2020 tanggal 11 Desember 2020

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Sedangkan daftar Keputusan Menteri LHK sebagai tindak lanjut delegasi dalam Pasal 5 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dan tindak lanjut delegasi dalam Pasal 6 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan tertera pada Tabel 48-49 di bawah ini.

Tabel 48. Daftar Keputusan Menteri LHK sebagai Tindak Lanjut Delegasi Pasal 5 Permen LHK No. P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019

No	Nama Keputusan Atas Nama Menteri	Unit Pengusul	Status
1.	Penetapan Peta FEG skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut PT Mayangkara Tanaman Industri	PKG	SK.564/MENLHK-PPPL/PKG/PLK.0/2/2020 tanggal 10 Februari 2020

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

**Tabel 49. Daftar Keputusan Menteri LHK sebagai Tindak Lanjut Delegasi
Pasal 6 Permen LHK No. P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019**

No	Nama Keputusan Atas Nama Menteri	Unit Pengusul	Status
1.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PKLAT kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Setditjen PPKL	SK.4989/MENLHK-PPKL/PKLAT/KAP.3/8/2020 tanggal 31 Agustus 2020
2.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PKLAT kepada Kelompok Masyarakat Lawang Geger Curug Sawyer	Setditjen PPKL	SK.4990/MENLHK-PPKL/PKLAT/KAP.3/8/2020 tanggal 31 Agustus 2020
3.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PPA kepada Pemda Kab. Mandailing Natal	Setditjen PPKL	SK.5106/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
4.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PPA kepada Pondok Pesantren Madinatunnajah	Setditjen PPKL	SK.5108/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
5.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PPA kepada Pondok Pesantren Attolibiyah	Setditjen PPKL	SK.5109/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
6.	Hibah IPAL Domestik komunal Kwarda Pramuka Depok Kab Sleman	Setditjen PPKL	SK.5112/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
7.	Hibah IPAL Domestik komunal Ponpes Mansyaul Huda Tuban	Setditjen PPKL	SK.5113/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
8.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin Kab. Siak Prop. Riau	Setditjen PPKL	SK.5114/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
9.	Hibah IPAL Domestik Komunal SMA Kristen Dobo Kabupaten Kepulauan Aru	Setditjen PPKL	SK.5115/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
10.	Hibah IPAL Domestik Komunal SMP Kristen 1 Kep. Aru Maluku	Setditjen PPKL	SK.5116/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
11.	Hibah IPAL Domestik Komunal SMN 1 Singkawang Kalbar	Setditjen PPKL	SK.5117/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
12.	Hibah IPAL Domestik di Ponpes Darul Qur'an Kab. Deli Serdang	Setditjen PPKL	SK.5121/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
13.	Hibah IPAL Domestik Komunal Kabupaten Maluku Barat	Setditjen PPKL	SK.5122/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
14.	Hibah IPAL Domestik Komunal SD Negeri 2 Kota Ambon Provinsi Maluku	Setditjen PPKL	SK.5123/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
15.	Hibah IPAL Domestik Komunal SD Negeri 4 Kota Ambon Provinsi Maluku	Setditjen PPKL	SK.5124/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
16.	IPAL Domestik Komunal Kabupaten Biak, Provinsi Papua	Setditjen PPKL	SK.5126/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
17.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Asy-Syifa	Setditjen PPKL	SK.5127/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
18.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Nurussyamsi Wal Qomar Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	Setditjen PPKL	SK.5129/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
19.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Darul Khairat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Setditjen PPKL	SK.5130/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
20.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Watthullab	Setditjen PPKL	SK.5131/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
21.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Al Istiqomah	Setditjen PPKL	SK.5132/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
22.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada SMA Teladan Di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	Setditjen PPKL	SK.5133/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
23.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Kelompok Masyarakat Garuda Lestari Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Setditjen PPKL	SK.5134/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
24.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Yayasan Al Hasyimah Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara	Setditjen PPKL	SK.5135/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
25.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada SDN 10 Tolok Di Kabupaten Landak, Provinsi Kalbar	Setditjen PPKL	SK.5136/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020 tanggal 3 September 2020
26.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL Kelompok Masyarakat nagari Tebing Tinggi di Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya	Setditjen PPKL	SK.5542/MENLHK-PPKL/PKLAT/PKL.4/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020
27.	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Ketua Bumdes Agro Edu Wisatab Njulung Kab. Malang	Setditjen PPKL	SK.5543/MENLHK-PPKL/PKLAT/KAP.3/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020
28.	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalsel pada pembangunan Sekat Kanal /2 paket/Pokmas, MPT Desa Mantaren I dan MPT Desa Gohong	Setditjen PPKL	SK.6595/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020
29.	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Talio, MPT Desa Talio Hulu dan MPT Desa Dandang	Setditjen PPKL	SK.6596/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020
30.	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Bahaur Hulu Permai, MPT Desa Bahaur Tengah dan MPT Desa Tanjung	Setditjen PPKL	SK.6597/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020

No	Nama Keputusan Atas Nama Menteri	Unit Pengusul	Status
31.	Perawan Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Batuah, MPT Desa Pulau Kupang dan MPT Desa Sungai Jaya	Setditjen PPKL	SK.6598/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020
32.	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sumur Bor dan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Tanjung Taruna, MPA Desa Tumbang Nusa dan MPT Desa Henda	Setditjen PPKL	SK.6599/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020
33.	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalbar pada pembangunan Sekat Kanal /2 paket/Pokmas, Gabmas Mandiri dan Mekar Sari	Setditjen PPKL	SK.7454/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020 tanggal 15 Desember 2020

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

d. Peraturan dan Keputusan Dirjen PPKL yang sudah terbit sebanyak 63 (enam puluh tiga), dan rinciannya dapat dilihat pada Tabel 50 berikut ini.

Tabel 50. Daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

No	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah
1	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah ditetapkan	12
2	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah ditetapkan	51

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

e. Pembuatan bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk media Tayang Multimedia

Pembuatan bahan sosialisasi dilakukan dalam bentuk media tayang multimedia berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) materi. Adapun materi sosialisasi yang telah diselesaikan sebagai berikut:

1) Materi Peraturan Menteri LHK Nomor: P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara; dan

2) Materi Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pembuangan Air Limbah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri LH Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11.2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembuangan Air Limbah

a. Pengelolaan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut & Injeksi

Capaian pengelolaan permohonan KepmenLHK tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi yang berhasil diselesaikan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) izin sebagaimana tercantum dalam Tabel 51 dan Tabel 52.

Tabel 51. Daftar Jenis Industri Pengelolaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Injeksi Tahun 2014 – 2020

No	JENIS INDUSTRI	TAHUN TERBIT							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
1.	Bahan Kimia			1					1

No	JENIS INDUSTRI	TAHUN TERBIT							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
2.	Budidaya Tambak Udang							1	1
3.	Chlor Alkali, Ethylene Dichloride-Vinyl Chloride Monomer (EDC-VCM) dan Poly Vinyl Chloride (PVC).		1						1
4.	Cold Storage							1	1
5.	Distribusi Bahan Bakar Minyak							12	12
6.	Distribusi Migas	5	6	1	12	2	13		39
7.	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas	2	16	7	13	1	10	21	70
8.	Galangan Kapal							1	1
9.	Galvanis(Industri Baja Lapis Seng)						1		1
10.	Hasil Pengolahan Produk Perikanan							2	2
11.	Industri Fabrikasi Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung, Aktivitas Penunjang Pertambangan Migas							1	1
12.	Industri Gula Rafinasi		1				1	2	4
13.	Industri Kaca					1			1
14.	Industri Karet Sintetis						1		1
15.	Industri Kimia		1	3	4				8
16.	Industri Kimia (Ethylene Glycol, Ethylene Oxide dan Emoxylate)						2		2
17.	Industri Kimia Dasar Organik						1		1
18.	Industri Makanan						1		1
19.	Industri Manufaktur berbahan baku plastik							1	1
20.	Industri Pabrikasi				1				1
21.	Industri Peleburan Alumunium						1		1
22.	Industri Pembuatan Polyethylene terephthalate Film				1				1
23.	Industri Pengelolaan Minyak Goreng / Nabati						1		1
24.	Industri Pengolahan Gas Bumi						1		1
25.	Industri Pengolahan Ikan						1		1
26.	Industri Pengolahan Ikan dan Tepung Ikan						1		1
27.	Industri Pengolahan Minyak Sawit, Minyak Inti Sawit dan Turunnya							1	1
28.	Industri Pengolahan Sawit				1				1
29.	Industri Petrokimia Hulu						1		1
30.	Industri petrokimia Hulu (Pembutan Polystyrene dan Synthetic Latex)				1		1		2
31.	Industri Pupuk				1			1	2
32.	Industri Refinery, Fraksinasi, Oleochemical, Biodiesel, Glycerine, Bleaching Earth, dan Produk Turunan Minyak Sawit lainnya							3	3
33.	Industri Semen						1		1
34.	Industri Tepung Terigu dan Pati, Makanan Ternak, Dedak Gandum, Tepung Pollard dan Macaroni (pasta)			1					1
35.	Jasa Pelabuhan	3				1			4
36.	Jasa Pendukung Kegiatan Pertambangan Migas						1		1
37.	Jasa Perbaikan, Pembuatan, dan Perawatan Kapal				1	1			2
38.	Jasa Perhotelan						1		1
39.	Karet Buatan/ Synthetic Rubber						1		1
40.	Kawasan Industri			1	1				2

No	JENIS INDUSTRI	TAHUN TERBIT							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
41.	Kawasan Industri Pengolahan Bijih Nikel							1	1
42.	Kayu Lapis				1				1
43.	Kegiatan Industri Terpadu							1	1
44.	Keteknikan Peralatan				1				1
45.	Kimia Dasar				1	1		1	3
46.	Listrik						1		1
47.	Minyak dan Gas Bumi						1		1
48.	Oleochemical			1					1
49.	Pabrik Ethelyn, Polyethelyn dan Polypropylene							1	1
50.	Pabrik Semen						1		1
51.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit						1		1
52.	Peleburan Besi Baja							1	1
53.	Peleburan dan Pemurnian Tembaga					1			1
54.	Pembangkit Listrik	1	7	8	20	3	1	32	72
55.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap						10		10
56.	Pembangkitan Listrik						1		1
57.	Pembekuan Udang				1				1
58.	Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak						3		3
59.	Pengelola Hunian dan Bisnis Terpadu Green Bay Pluit							1	1
60.	Pengelola Kawasan Industri						1	1	2
61.	Pengelolaan Terminal dan Fasilitas Pelabuhan				1				1
62.	Pengelolahan Hasil Perikanan						2		2
63.	Pengelolahan Ikan dan Hasil Perikanan				6				6
64.	Pengolahan Air Laut Menjadi Air Tawar							2	2
65.	Pengolahan Hasil Perikanan						2	1	3
66.	Pengolahan Ikan Segar/Beku, Ikan Kayu, Fish Meal, dan Es Balok							1	1
67.	Pengolahan Kayu				1		1		2
68.	Pengolahan Kelapa							1	1
69.	Pengolahan Limbah B3 dan Izin Pengoperasian Alat Pengolahan Limbah B3			1					1
70.	Pengolahan Minyak Bumi		1					1	2
71.	Pengolahan Minyak Bumi dan Petrokimia				1				1
72.	Pengolahan Minyak Kepala Sawit, Lemak, Nabati, dan Produk Turunannya		1	5	7	2			15
73.	Pengolahan Minyak Nabati, Tangki Timbun dan Gudang						1		1
74.	Pengolahan Produk Perikanan							2	2
75.	Pengolahan Timah	1						1	2
76.	Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga LNG			1					1
77.	Pengolahan/Pemurnian Bijih Nikel							1	1
78.	Pertambangan Mineral						1		1
79.	Pertambangan Nikel		1		1				2
80.	Pertambangan Nikel dan Fasilitas Pendukungnya						1		1
81.	Pertambangan Batubara					1			1

No	JENIS INDUSTRI	TAHUN TERBIT							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
82.	Plywood, Block Board, Sawn Timber, Moulding			1					1
83.	Produksi Semen			1					1
84.	Pupuk Urea dan Amonia			1					1
85.	Purified Terephthalic Acid (PTA)		1						1
86.	Semen					1			1
87.	Tenaga Listrik						4		4
88.	Tepung Terigu				1				1
89.	Terminal Penyalur Bahan Bakar Minyak (TBBM)						1		1
90.	Terminal Umum Batu Bara				1		1		2
Grand Total		12	37	31	79	16	75	96	346

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

Tabel 52. Keputusan Menteri LHK tentang Perizinan yang telah diterbitkan

No	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah
1	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	89
2	Izin Pembuangan Air Limbah dengan Cara Injeksi	7

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan Pembuangan Air Limbah.

Penilaian IKM dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil pengukuran kepuasan masyarakat tersebut bermanfaat untuk:

- 1) Mengetahui tingkat kinerja pelayanan perizinan,
- 2) Menilai unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan,
- 3) Mendorong setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, dan
- 4) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja pelayanan pemrosesan perizinan.

Responden penilaian IKM berasal dari pemohon izin yang telah diterbitkan selama tahun 2018 – 2019 sesuai dengan Lampiran II PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 diperoleh sebanyak 76 responden. Setelah dilakukan proses penyebaran formulir survei didapatkan 81 responden.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan sejak 14 Juli 2020 sampai dengan 24 September 2020, melalui penyebaran kuisioner kepada pengguna jasa pelayanan perizinan pembuangan air limbah melalui daring (*google form*)

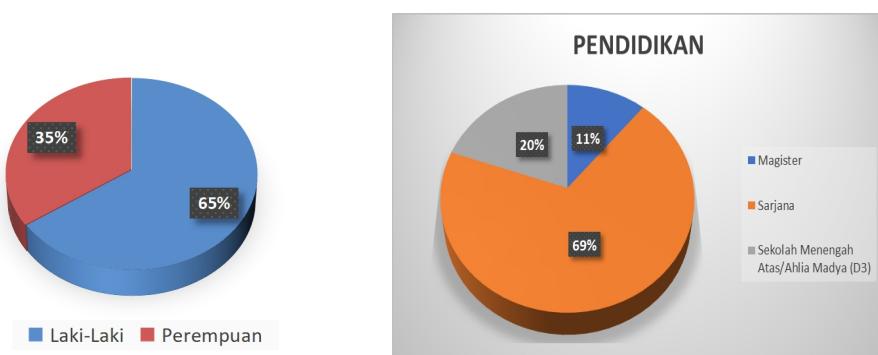
diperoleh responden sebanyak 81 koresponden. Berdasarkan responden yang sudah diperoleh didapatkan hasil sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Jenis Kelamin

Responden yang berjenis kelamin laki-laki terdata sebanyak 53 orang dan perempuan sebanyak 28 orang (Gambar 59).

2) Latar Belakang Pendidikan Responden

Dari sebanyak 81 responden, jenjang Pendidikan di dominasi dengan Pendidikan sarjana sebanyak 56 orang, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas/Ahli Madya (D3) sebanyak 16 orang, dan 9 orang responden berlatar Pendidikan Magister (Gambar 60).



Gambar 59. Diagram Jenis Kelamin Responden

(Sumber: Bagian HKST, 2020)

Gambar 60. Diagram Latar Belakang Pendidikan Responden

(Sumber: Bagian HKST, 2020)

3) Jenis Industri Responden

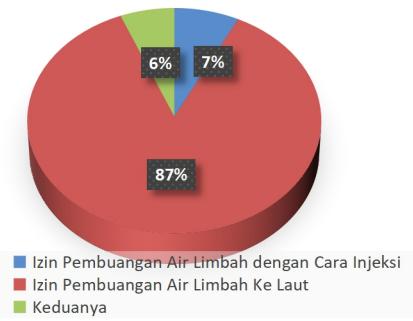
Pelayanan Perizinan Pembuangan Air Limbah yang dikelola Dirjen PPKL memiliki pengguna yang berasal dari jenis usaha dan/atau kegiatan yang beragam. Untuk melakukan kompilasi pengolah data menyusun kuisioner dengan melakukan pengelompokan jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi tiga. Hasil pengolahan data didapatkan sebagai berikut: Agro Industri, 8 orang, Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, 7 orang dan Pertambangan, Energi, dan Migas 66 orang (Gambar 61).

4) Jenis Permohonan Pelayanan Perizinan yang pernah diajukan oleh Responden

Terdapat dua jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Ditjen PPKL yaitu:

- Pelayanan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut; dan
- Pelayanan Perizinan Pembuangan Air Limbah Secara Injeksi.

Adapun hasil dari responden menunjukkan bahwa 70 responden merupakan pemohon izin pembuangan air limbah ke laut, 6 responden pemohon izin injeksi, dan 5 pemohon yang pernah mengajukan kedua pelayanan perizinan tersebut (Gambar 62).



Gambar 61. Diagram Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Responden
(Sumber: Bagian HKST, 2020)



Gambar 62. Diagram Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
(Sumber: Bagian HKST, 2020)

Berdasarkan hasil pengukuran keseluruhan kuisioner (81 responden) yang telah terisi oleh responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan, diperoleh hasil Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan skor indeks sebesar **67,67**. Hal ini menunjukkan bahwa **kinerja pelayanan unit kerja Ditjen PPKL berada dalam mutu pelayanan C, dengan kinerja Kurang Baik** (Tabel 53).

Tabel 53. Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 -2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

(Sumber: Bagian HKST, 2020)

Adapun nilai rata-rata pelayanan (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54. Nilai Rata-Rata Pelayanan (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kinerja
1	Persyaratan	3,13	Baik
2	Prosedur	2,89	Kurang Baik
3	Waktu Pelayanan	2,51	Tidak Baik
4	Biaya / Tarif	3,26	Baik
5	Produk Layan	3,03	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,06	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,19	Baik
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	2,76	Kurang Baik
9	Sarana dan prasarana	3,49	Baik

(Sumber: Bagian HKST, 2020)

Berdasarkan Tabel NRR tersebut, terdapat 6 unsur yang telah memiliki status kinerja baik, 2 unsur mendapat nilai kurang baik, dan 1 unsur memiliki kinerja tidak baik. Seluruh responden menganggap aspek prosedur dan penanganan pengaduan saran dan masukan masih berjalan kurang baik dan responden juga menganggap waktu pelayanan perizinan pembuangan air limbah yang dilaksanakan oleh Ditjen PPKL tidak baik. Berdasarkan SKM ini membuktikan bahwa para pengguna jasa layanan di Ditjen PPKL mengharapkan adanya peningkatan terhadap kejelasan

prosedur, penanganan pengaduan, saran, dan masukan dan terlebih kepada kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan.

3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan:

- a. Perkembangan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. Hukum/Aturan yang diformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sehingga perlu untuk ditinjau apakah Hukum/Aturan tersebut masih efektif, implementatif, dan akuntabel.
- b. Amanat Reformasi Birokrasi (RB) dan UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019. Presiden Jokowi mengamanatkan untuk memotret tingkat efektivitas dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen penilaian RB dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahapan perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.
- c. Momentum dan Semangat Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan. Kondisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang Hyperregulasi, Disharmonis, multi interpretasi harus segera di rubah dengan harapan Peraturan Perundang-undangan menjadi simplifikasi, harmonis, dan efektif.

Pada tahun 2020, Ditjen PPKL telah menyelesaikan analisis dan evaluasi sebanyak 4 (empat) peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri LH Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;
- b. Peraturan Menteri LH Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
- c. Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama; dan
- d. Keputusan Menteri LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

4. Penerbitan Surat Edaran Menteri LHK atau Direktur Jenderal PPKL sebagai implementasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertera pada Tabel 55.

Tabel 55. Surat Edaran Menteri LHK yang telah diterbitkan

No	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Unit Pengusul	Status
1	Protokol Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan pada Masa Pandemi COVID-19	PPA	SE.5/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tanggal 25 Juni 2020
2	Protokol Pengelolahan Air Limbah dan Tinja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menangani Pasien COVID-19	PPA	SE.8/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2020 tanggal 23 September 2020
3	Pedoman Pemantauan Sampah Laut	PPKPL	SE.9/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

5. Rekapitulasi Dukungan Teknis Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pada tahun 2020, Ditjen PPKL telah melaksanakan verifikasi lapangan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) pengaduan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 56.

Tabel 56. Rekapitulasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti selama Tahun 2020

Jenis Penanganan	Jumlah
Pengendalian Pencemaran Air	21
Pengendalian Pencemaran Udara	16
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut	2
Kerusakan Lahan dan Akibat Usaha Tambang	4
Total	43

Sumber: Bagian HKST, 2020

Rekapitulasi Bantuan Teknis dan Verifikasi Lapangan terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 57.

Tabel 57. Rekapitulasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti selama Tahun 2016-2020

Jenis Penanganan	Tahun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Pencemaran Air	21	25	20	18	14
Pencemaran Udara	16	13	25	13	12
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut	2	7	-	5	5
Kerusakan Lahan dan Akibat Tambang Liar	4	8	9	1	4
Total	43	53	54	37	35

Sumber: Bagian HKST, 2020

6. Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Pada Tahun 2020 Ditjen PPKL memfasilitasi 31 (tiga puluh satu) Nota Kesepahaman dengan rincian 12 (dua belas) Nota Kesepahaman dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, 13 (tiga belas) Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi dan 2 (dua) Nota Kesepahaman dengan Dunia Usaha serta 4 (empat) *Agreement* dengan pihak luar negeri (Tabel 58). Semua kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah dilakukan secara keseluruhan dengan capaian yang akan dijabarkan pada pembahasan laporan kegiatan ini.

Tabel 58. Daftar Kerja Sama Dalam Negeri

No	Satker Pelaksana	Mitra Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Periode	Lokasi
1	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Ternate	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Maluku Utara
2	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Mamuju	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Sulawesi Barat
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Gorontalo	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Gorontalo
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Manokwari	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (AQMS)	5 thn	Papua
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Ambon	Pembangunan dan Pengoperasian Peralatan dan Jaringan Sistem	5 thn	Maluku

No	Satker Pelaksana	Mitra Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Periode	Lokasi
			Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (AQMS)		
6	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Samarinda	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (AQMS)	5 thn	Kalimantan Timur
7	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Kendari	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Sulawesi Tenggara
8	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Palu	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Bali
9	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Pangkal Pinang	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Bangka
10	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	DLH Kota Serang	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	Banten
11	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka	PT Pupuk Kaltim	Pemulihan Lahan Akses Terbuka	5 thn	Kalimantan Timur
12	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka	PT Pembangkitan Jawa-Bali	Pemulihan Lahan Akses Terbuka	5 thn	Kalimantan Timur
13	Direktorat Jenderal PPKL	Universitas Gajah Mada	Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 thn	
14	Direktorat Jenderal PPKL	Rektor Universitas Mulawarman	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5 thn	
15	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Dekan Fakultas Pertanian Mulawarman	Pengendalian kerusakan gambut	5 thn	
16	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	LPPM Universitas Sumatera Utara	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5 thn	Sumatera Utara
17	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Rektor Universitas Tanjungpura	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5 thn	Kalimantan Barat
18	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura	Pengendalian kerusakan gambut	5 thn	Kalimantan Barat
19	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Rektor Universitas Lambung mangkurat	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5 thn	
20	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung mangkurat	Pengendalian kerusakan gambut	5 thn	
21	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Rektor Universitas Palangka Raya	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5 thn	
22	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Dekan Fakultas Universitas Palangka Raya	Pengendalian kerusakan gambut	5 thn	

No	Satker Pelaksana	Mitra Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Periode	Lokasi
23	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Rektor Universitas Papua	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5 thn	
24	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Dekan Fakultas Universitas Papua	Pengendalian kerusakan gambut	5 thn	
25	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Institut Pertanian Bogor, LPPM	Pengendalian kerusakan gambut	5 thn	
26	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Dinas Lingkungan Hidup Padang Pariaman	pemulihan lahan yang rusak, pengelolaan pasca pemulihan dan peningkatan kapasitas masyarakat	5 thn	
27	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Dinas Lingkungan Hidup Bengkayang	pemulihan lahan yang rusak, pengelolaan pasca pemulihan dan peningkatan kapasitas masyarakat	5 thn	
28	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)	Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berkelanjutan	3Thn	Kalimantan Utara
29	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Korea Forest Service (KFS)	Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Jambi	3Thn	Jambi
30	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	The International Fund for Agricultural Development (IFAD)	Sustainable Management Peatland Ecosystem in Indonesia (SMPEI GEF-5) Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di 13 desa di Inhil, Inhu, Pelalawan	5 thn	Riau
			Integrated Management of Peatland Landscape in Indonesia (IMPLI GEF-6) Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan 12 Desa Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis	5 thn	Riau
31	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNSCAP)	mengatasi pencemaran plastik di laut dengan mendukung pengumpulan data sampah plastik, kerangka pemantauan, strategi investasi, dan perencanaan aksi lokal	1Thn	Surabaya

Sumber: Bagian HKST, 2020

a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Perjanjian kerja sama dalam negeri lingkup Ditjen PPKL, tercatat 78 perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha namun terdapat 17 perjanjian kerja sama telah habis masa berlakunya pada tahun 2020 ini dan akan diperpanjang pada tahun 2021. Sedangkan 61 perjanjian kerja sama masih berjalan.

Untuk kerja sama dalam negeri pada tahun 2020 telah berhasil melakukan fasilitasi 27 Nota Kesepahaman sebagai berikut 12 Nota Kesepahaman

dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, 8 Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi dan 5 Perjanjian Kerja Sama serta 2 Nota kesepahaman dengan dunia Usaha.

b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Ditjen PPKL pada tahun 2020 bekerja sama dengan mitra asing yaitu : *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, *Korea Forest Service (KFS)*, *The International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, dan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNSCAP)* dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- 1) *Peatland Management and Rehabilitation in North Kalimantan.*
Kerja sama Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* untuk tata guna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis akan berjalan sampai dengan tahun 2022.
- 2) Kerja sama *Korea Forest Service* dan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Kerja sama ini difokuskan untuk Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Jambi. Untuk mempromosikan kegiatan dari restorasi dan konservasi ekosistem gambut di Mendaerah-Batanghari Unit Hidrologi Lahan Gambut.
- 3) *Sustainable Management Peatland Ecosystem in Indonesia (SMPEI GEF-5)* 17 Juli 2021

Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pencegahan kebakaran lahan gambut serta penurunan emisi gas rumah kaca, dilaksanakan di 13 desa di Provinsi Riau Kabupaten Inhil, Inhu, Pelalawan di Sg Kampar - Sg Indragiri KHG (Desa Teluk Meranti, Pulau Muda, Kerumutan, Mak Teduh (Pelalawan); Redang, Sialang Dua Dahan, Tanjung Sari, Pulau Jumaat (Indragiri Hulu); Harapan Jaya, Bayas Jaya, Simpang Gaung, Rambai, Teluk Kabung (Indragiri Hilir).

Upaya pencapaian akan dilakukan melalui kegiatan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan; pengurangan degradasi lahan gambut, kebakaran dan emisi GRK; penerapan praktik terbaik (*best practices*) untuk pengelolaan lahan gambut terpadu dan berkelanjutan lahan gambut, melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat lokal; peningkatan aktivitas usaha masyarakat.

- 4) *Integrated Management of Peatland Landscape in Indonesia (IMPLI GEF-6)*

Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Proyek ini dilaksanakan di 12 Desa Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis dan Siak di Sg Rokan - Sg Siak Kecil KHG dan Sg Siak Kecil - Sg Siak KHG, meliputi sebagian besar kawasan cagar biosfer Giam Siak

Kecil - Bukit Batu; dan replikasi kegiatan di KHG prioritas di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

5) *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNSCAP)*

ESCAP, bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, melaksanakan proyek "*Closing the Loop: Scaling Up Innovation to Tackle Marine Plastic Pollution in ASEAN Cities*", yang membantu pemerintah lokal negara-negara di kawasan ASEAN untuk mengatasi pencemaran plastik di laut dengan mendukung pengumpulan data sampah plastik, kerangka pemantauan, strategi investasi, dan perencanaan aksi lokal. Kegiatan direncanakan akan berlokasi di Surabaya Jawa Timur dan waktu pelaksanaan akhir 2020 s/d 31 Maret 2021 dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah Surabaya.

7. Bimbingan Teknis Kerja Sama

Bimbingan teknis kerja sama lingkup Ditjen PPKL bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para penanggungjawab pengelolaan kerja sama dalam penyusunan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama agar dapat mengikuti kaidah-kaidah yang diatur dalam Permen LHK No. 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama dalam Negeri. Bimbingan teknis juga didasari permasalahan mengenai tata cara pengajuan kerja sama yang belum standar; kurangnya kapasitas SDM; data dan informasi belum lengkap dan akurat; format penyusunan naskah kerjasama yang beragam; rencana pelaksanaan program kerjasama belum sepenuhnya disusun; dan belum diukurnya capaian kinerja kerjasama yang berorientasi hasil. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan pembicara dari Kementerian Dalam Negeri dan Biro Perencanaan, KLHK dan diikuti oleh penanggung jawab pengelola kerja sama lingkup Ditjen PPKL.

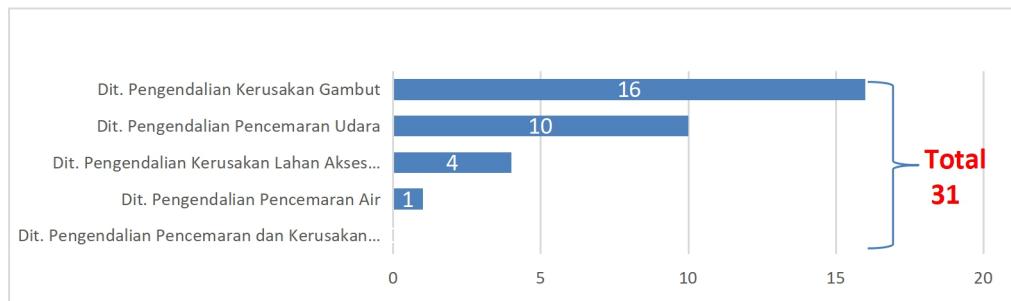
8. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Teknik

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri di KLHK masih sering mengalami kendala, antara lain: (1) Tata cara pengajuan kerja sama yang belum standar; (2) Kurangnya kapasitas SDM; (3) Data dan informasi belum lengkap dan akurat; (4) Format penyusunan naskah kerjasama yang beragam; (5) Rencana pelaksanaan program kerjasama belum sepenuhnya disusun; dan (6) Belum diukurnya capaian kinerja kerjasama yang berorientasi hasil (*outcome*).

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan rapat evaluasi dan verifikasi lapangan ke lokasi pelaksanaan kerja sama. Kegiatan ini juga sebagai pembelajaran atas pelaksanaan kerja sama, untuk mencari penyelesaian isu-isu permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama; mewujudkan optimalisasi pemanfaatan kerja sama dalam negeri dalam rangka menunjang kinerja KLHK khususnya bagi Ditjen PPKL agar sesuai tugas pokok fungsi.

a. Hasil Monitoring dan evaluasi

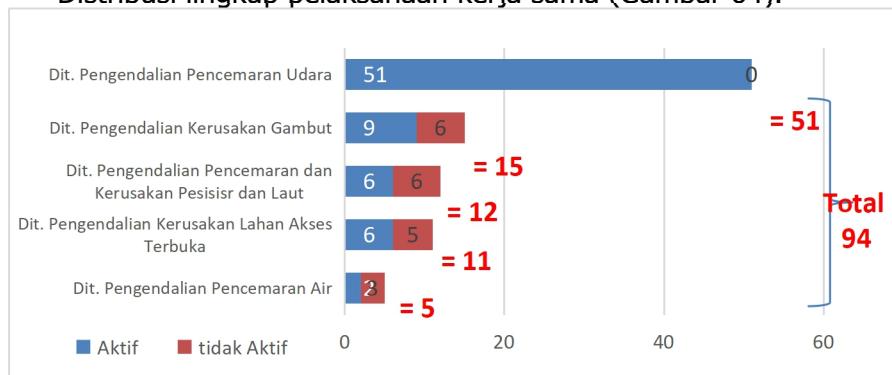
- Distribusi kerja sama berdasarkan unit yang bertanggungjawab (Gambar 63).



Gambar 63. Jumlah Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020

(Sumber: Bagian HKST, 2020)

- Distribusi lingkup pelaksanaan kerja sama (Gambar 64).



Gambar 64. Status Jumlah Kerja Sama Lingkup Ditjen PPKL

(Sumber: Bagian HKST, 2020)

c. Monitoring kerja sama terealisasi (Tabel 59)

Tabel 59. Daftar Monitoring Kerja Sama Terealisasi

No	Nama Mitra	Relevansi Kegiatan	Mutu Kegiatan dan Produktifitas Kegiatan	Keberlanjutan Kegiatan
1.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Dinas LHK Provinsi Kalimantan Timur Dinas LHK Provinsi Maluku Utara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara 	<p>Renstra Ditjen PPKL 2020-2025. dengan indikator kegiatan</p> <p>Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi otomatis (AQMS), dengan metode manual yang beroperasi mudah, sederhana</p>	<p>Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis</p> <p>Proses Lelang pengadaan alat AQMS</p> <p>Instalasi AQMS Commissioning Pengoperasian alat Penyediaan data kualitas udara dalam bentuk konsentrasi dan ISP Pemeliharaan</p> <p>Sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan target AQMS 2020</p>	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
2.	Dinas Lingkungan Padang Pariaman Dinas Lingkungan Bengkayang	<p>Renstra Ditjen PPKL 2020-2025. dengan indikator kegiatan</p> <p>Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan untuk menunjang IKK Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25%</p>	<p>Menyusun kajian fungsi lingkungan dan membuat rekomendasi pemulihan pada lahan akses terbuka</p> <p>Sudah dilaksanakan pemulihan lahan bekas galian di Kab. padang pariaman</p>	<p>Pekerjaan pelaksanaan penyusunan FS sudah tersusun di lima lokasi yaitu kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat</p>
3.	Universitas Gadjah Mada,		penelitian, pengkajian dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pengendalian pencemaran air;	Akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama di lingkup Ditjen PPKL,

No	Nama Mitra	Relevansi Kegiatan	Mutu Kegiatan dan Produktifitas Kegiatan	Keberlanjutan Kegiatan
			pengendalian pencemaran udara; pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; pengendalian kerusakan gambut; dan/atau pengendalian kerusakan lahan	
4.	Universitas Sumatera Utara, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangkaraya, Universitas Tanjung Pura, Universitas Mulawarman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Papua	Renstra Ditjen PPKL 2019-2024. dengan indikator kegiatan Luas pemulihan kerusakan ekosistem gambut	1. bimbingan teknis dan pendampingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; 2. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan jasa lingkungan Ekosistem Gambut; 3. survei dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut; 4. supervisi dan verifikasi pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut; 5. penelitian dan pengembangan dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut; 6. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut; 7. tukar menukar data dan informasi mengenai pengelolaan Ekosistem Gambut; dan 8. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.	- Difokuskan Kajian peningkatan kapasitas dan partisipatif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut - Pembentukan Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) - Menyusun dokumen Identifikasi dan Analisis Masyarakat (IMAS) - Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
5.	Pupuk Kalimantan Timur, Pembangkitan Jawa Bali, Perkebunan Nusantara VII	Indeks Hidup	Kualitas Lingkungan	
6	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Korea Forest Service (KFS), Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI) dan Sustainable Management Peatland Ecosystem in Indonesia (SMPEI)	pemulihan kerusakan ekosistem gambut		
7	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)			

Sumber: Bagian HKST, 2020

9. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

Pelaksanaan PROPER periode 2019-2020 berbeda dengan pelaksanaan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan PROPER 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan PROPER 2020 lebih menguatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Secara Elektronik (SIMPEL), penggunaan aplikasi *virtual meeting* dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan PROPER pada umumnya. Tahun 2020 jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER sebanyak 2039 perusahaan.

Tahapan penyelenggaraan PROPER dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu persiapan, penilaian, inspeksi lapangan (bila diperlukan), supervisi, pemeringkatan sementara, sanggahan, penilaian lebih dari ketaatan dan pemeringkatan akhir dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Tahap persiapan PROPER meliputi :

1) Penetapan usaha dan/atau kegiatan sebagai peserta PROPER

Penetapan peserta PROPER tahun 2020 dibahas bersama pemerintah daerah dalam forum Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan yang dilaksanakan tanggal 5-7 Maret 2020 di Lombok sebelum masa pandemi Covid-19.

2) Penguatan kapasitas

Pelaksanaan penguatan kapasitas terhadap tim PROPER provinsi dilaksanakan secara virtual. Dalam pelaksanaannya, tim teknis Proper menyiapkan materi muatan terkait dengan kriteria dan mekanisme PROPER 2020.

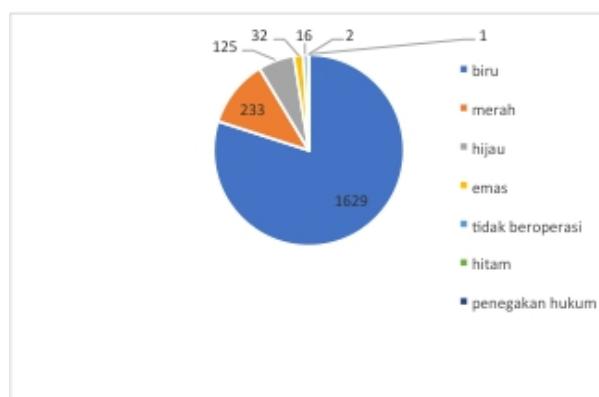
3) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Sekretariat PROPER dan tim teknis Proper kepada perusahaan peserta PROPER 2020. Materi sosialisasi berisi kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER periode 2019-2020. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara virtual yang dibagi dalam 5 sesi.

b. Penilaian Ketaatan

Penilaian PROPER yang dilakukan melalui pemeriksaan isian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang diinput perusahaan dalam SIMPEL. Dalam melakukan penilaian KLHK dibantu oleh tim provinsi. Memperhatikan situasi di lapangan terkait pandemi *Covid-19*, Dirjen PPKL selaku Ketua Tim Teknis PROPER mengeluarkan Surat Edaran Dirjen PPKL No. S.101/PPKL/SET/SE.1/4/2020 tanggal 1 April 2020. Surat Edaran ini berisi tentang tata cara pemantauan lingkungan di masa pandemi *Covid-19*.

Hasil evaluasi ketaatan terhadap 2039 perusahaan tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Gambar 65 berikut ini.



Gambar 65. Tingkat Ketaatan PROPER 2020
(Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020)

c. Inspeksi lapangan

Inspeksi lapangan dilakukan jika ada hal-hal mendesak yang perlu dilakukan verifikasi di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim PROPER Provinsi dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi dan protokol kesehatan.

d. Supervisi dan Pemeringkatan Sementara

Untuk menjamin kualitas penilaian yang sama di 32 Provinsi maka hasil evaluasi yang dilakukan tim Proper Provinsi disupervisi oleh tim supervisor KLHK. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara virtual. Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan.

e. Sanggahan/Klarifikasi

Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER, Perusahaan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.

f. Supervisi Hasil Sanggahan

Tahapan supervisi hasil sanggahan dilakukan melalui pembahasan sanggahan yang dilakukan perusahaan. Proses supervisi hasil sanggahan dilakukan dengan tahapan yang sama dengan supervisi pemeringkatan sementara.

g. Penilaian lebih dari ketaatan

Berdasarkan hasil penilaian ketaatan, peserta yang mendapatkan peringkat biru 100% berhak mengikuti penilaian kinerja lebih dari ketaatan. Penilaian lebih dari ketaatan melibatkan tim teknis PROPER dan 3 universitas yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro dan Universitas Gajah Mada.

Kriteria responsivitas terhadap bencana merupakan kriteria baru di tahun 2020 yang dilatarbelakangi banyaknya upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka penanganan bencana non alam Covid-19. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Jumlah penerima manfaat langsung dari kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan perusahaan mencapai 2.279.398 jiwa yang terdiri dari kegiatan penyediaan masker, pembuatan hand sanitizer, pelatihan tanggap bencana, penyediaan infrastruktur ruang isolasi, alat cuci tangan, dan lain sebagainya. Dana yang bergulir dari program penanggulangan bencana mencapai Rp. 346.158.976.293.

Perusahaan yang mendapatkan nilai 25% terbaik dan sudah memperoleh peringkat Hijau 2 tahun berturut-turut berhak menjadi kandidat Emas. Sebanyak 49 perusahaan diundang presentasi di hadapan Dewan Pertimbangan PROPER untuk menyampaikan inovasi pengelolaan lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat serta program yang merespon kebencanaan.

h. Pemeringkatan akhir (Hasil)

Tahapan yang dilakukan untuk menetapkan status akhir ketaatan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penilaian ketaatan dan penilaian lebih dari ketaatan, Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis melakukan rapat teknis untuk menyusun usulan peringkat PROPER.
2. Dewan pertimbangan Proper mengusulkan kandidat emas dan ketua tim teknis menetapkan kandidat emas untuk diusulkan kepada Menteri.
3. Hasil usulan peringkat akhir Proper disampaikan kepada Menteri.
4. Menteri memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan dewan pertimbangan Proper.
5. Menteri menetapkan Peringkat PROPER

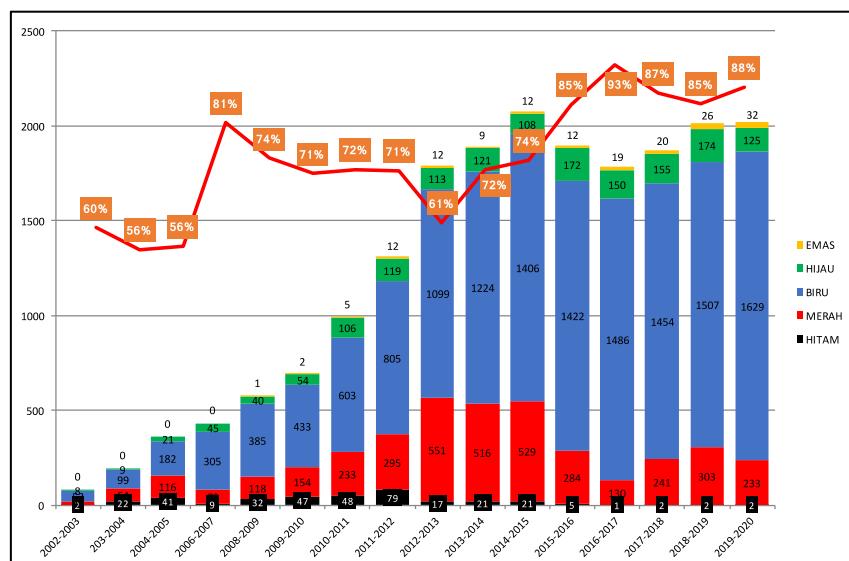
i. Pengumuman

Hasil evaluasi PROPER tahun 2020 diumumkan kepada publik. Untuk peraih peringkat Emas akan diberikan apresiasi oleh Wakil Presiden RI dan peringkat Hijau oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memperhatikan kondisi pandemi yang belum berakhir maka penyerahan Piala PROPER Emas dilakukan langsung, namun penyerahan piala PROPER Hijau secara virtual

10. Hasil Evaluasi PROPER Tahun 2020

a) Tren Ketaatan PROPER

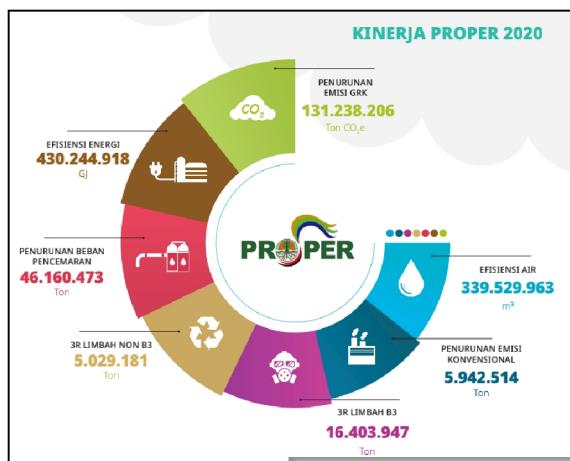
Hasil evaluasi PROPER Tahun 2020 mengalami peningkatan ketaatan dari tahun ke tahun, sehingga tahun ini menjadi 87,6%. Jika dibandingkan dengan persentase ketaatan periode evaluasi sebelumnya mencapai 85%. Trend ketaatan PROPER dapat dilihat pada Gambar 66 berikut ini.



Gambar 66. Tren Kenaikan PROPER

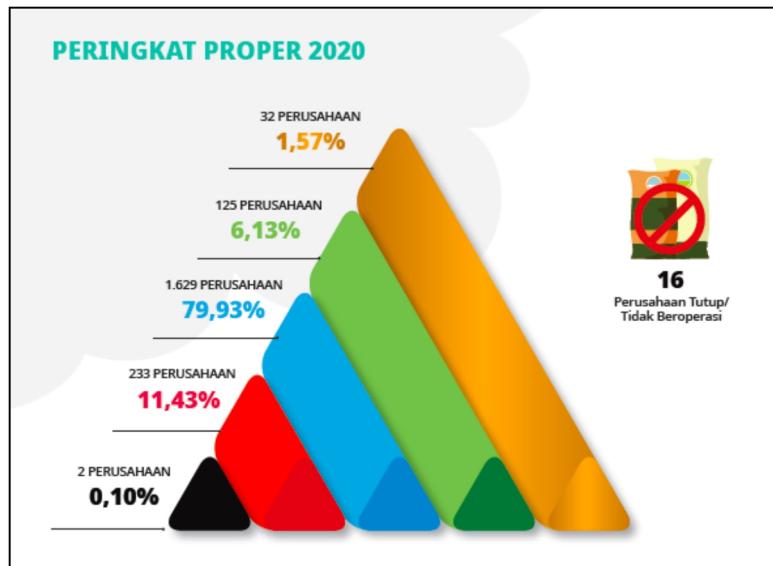
(Sumber: Bagian HKST, 2020)

Berdasarkan data hasil evaluasi PROPER juga dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai absolut kontribusi terhadap perbaikan lingkungan yang meliputi efisiensi energi, penurunan emisi GRK, penurunan emisi konvensional, 3R limbah B3, 3R limbah Non B3, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air. Nilai absolut kontribusi perbaikan lingkungan dari tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 67 berikut ini. Sedangkan peringkat PROPER tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 68.



Gambar 67. Kinerja PROPER 2020

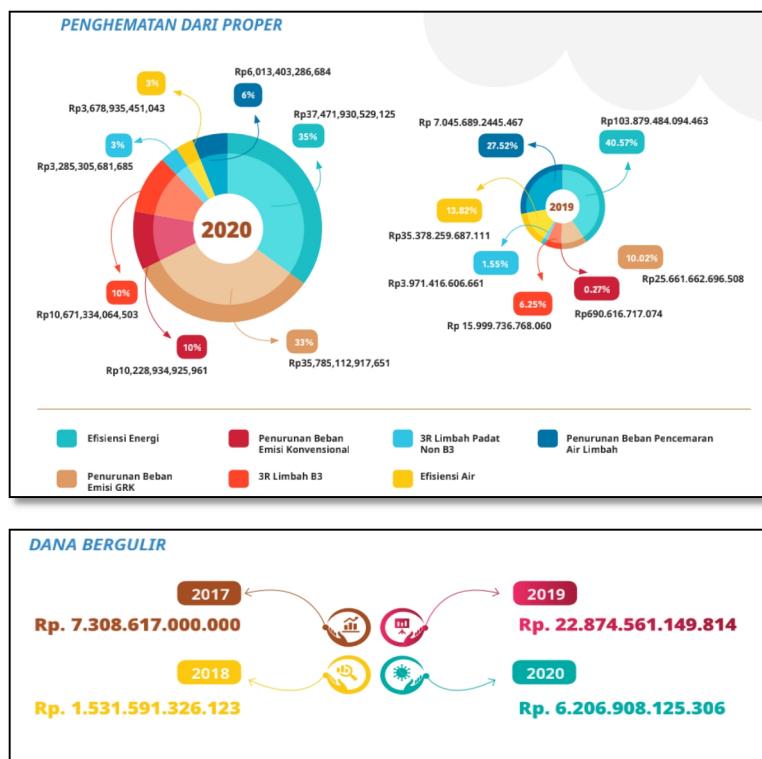
(Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik)



Gambar 68. Peringkat PROPER 2020

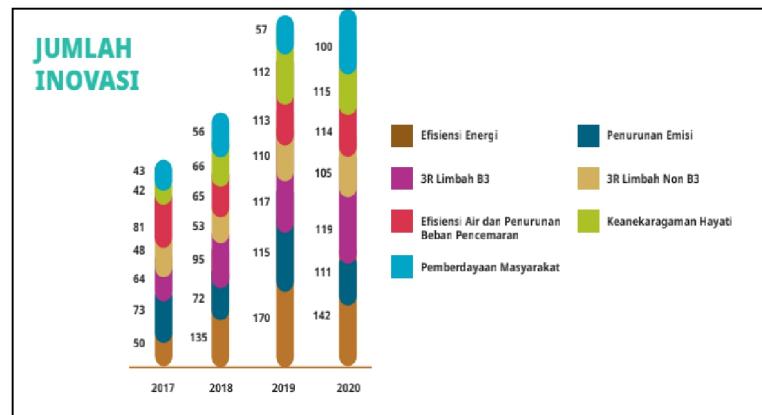
(Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020)

Selain itu, dari upaya perbaikan kualitas lingkungan, dapat dilakukan penghematan, sehingga mengelola lingkungan merupakan kegiatan yang menguntungkan. Penghematan yang dapat dilakukan dalam mengelola lingkungan dapat dilihat pada Gambar 69. Selanjutnya berbagai inovasi yang dilakukan dalam mengelola lingkungan dapat dilihat pada Gambar 70.



Gambar 69. Penghematan dari PROPER dan Dana Bergulir

(Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020)



Gambar 70. Jumlah Inovasi 2017-2020

(Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2020)

Kontribusi perusahaan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan data pada Tabel 60 berikut:

Tabel 60. Kontribusi Perusahaan dalam Upaya Pencapaian SDGs

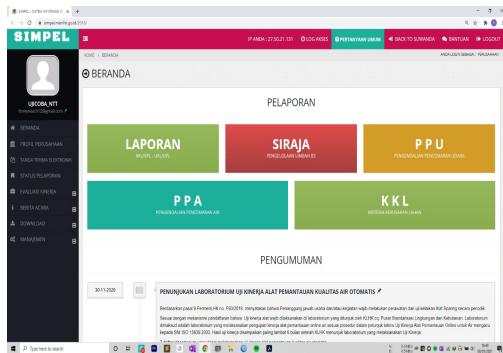
Tujuan SDGs No	SDGs GOALS	KONTRIBUSI DANA		
		2018	2019	2020
1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	3.934.793.809	40.621.277.757	10.881.821.000
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	20.049.826.959	23.970.669.370	3.226.380.975

Tujuan SDGs No	SDGs GOALS	KONTRIBUSI DANA		
		2018	2019	2020
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34.782.927.700	867.066.792.328	2.238.396.316.049
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	88.978.924.467	48.373.864.011	2.093.657.500
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4.990.337.466	6.289.805.450	41.400.000
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan untuk Semua	1.125.357.491.604	5.403.541.275.486	1.866.355.666.407
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelaanjutan dan Modern untuk Semua	7.991.426.240.611	11.125.455.479.445	19.066.628.421.408
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	168.978.562.651	228.989.234.272	21.095.582.262
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelaanjutan, serta Mendorong Inovasi	12.682.973.873.035	12.300.973.805.308	29.476.157.110.927
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	11.262.953.764	20.784.069.605	150.000.000
11	Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tantang dan Berkelaanjutan	64.953.076.332	45.893.762.666	48.122.549.928
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelaanjutan	5.056.050.147.150	10.168.080.971.059	24.599.310.898.818
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	9.762.092.756.955	9.486.158.966.291	3.713.414.852.100
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelaanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelaanjutan	32.443.701.183	36.095.210.870	18.543.679.950
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelaanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Pengguruan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1.625.740.618.654	516.545.609.075	225.586.895.308
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelaanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	50.000.000	725.800.000	75.259.000
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelaanjutan	5.095.317.547	1.906.821.940	1.165.905.982
Total		38.679.161.549.887	50.321.473.414.932	81.291.246.397.614

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

11. Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL)

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) sebagai pengganti pelaporan cetak ke dalam bentuk elektronik, hadir sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah terdaftar sejumlah 9653 akun perusahaan-perusahaan dari seluruh Indonesia. Melalui aplikasi SIMPEL, perusahaan menyampaikan Laporan Rencana Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan & Upaya Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL / UKL-UPL), Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), Pengendalian Kerusakan Lahan (PKL), Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3). Selain itu, perusahaan dapat mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) sebagai bukti pelaporan yang valid. Perusahaan yang masuk dalam Program Penilaian PROPER, Validator/Supervisor yang berasal dari KLHK dan Pemda mengolah, menganalisis, memvalidasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan, selanjutnya dikeluarkan Status Pelaporan dan Status Kinerja Perusahaan. Tampilan menu pada aplikasi SIMPEL dapat dilihat pada Gambar 71 berikut ini.



Gambar 71. Tampilan Menu pada SIMPEL

(Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik)

Pada tahun 2020 ini telah dikembangkan fitur yang masih dalam progres yaitu:

- a. Akun Pemda (koordinator) Provinsi, Kabupaten/kota dapat menginput Daftar Pengelola dan Upload SK Tim Pengelola SIMPEL. Validasi SK Tim Pengelola dilakukan oleh KLHK. Validasi bertujuan untuk melihat laporan, TTE, validasi laporan dan edit laporan (*add Exception*);
- b. Fitur validasi laporan, validasi dilakukan oleh KLHK dan Pemerintah Daerah. Dokumen yang divalidasi adalah Dokumen Lingkungan, PPA, PPU, PLB3 dan KKL. Selain itu juga dikembangkan fitur rating. Penerapan Rating bisa ditentukan bagi seluruh/sebagian akun;
- c. Fitur Rekapitulasi untuk merekapitulasi data yang terdapat pada Dokumen Lingkungan;
- d. Fitur untuk penilaian PROPER Hijau;
- e. Fitur Menu Log Akses, terdapat (IP, waktu, sebagai login-as) jika sebagai login-as, tidak terbaca oleh perusahaan, tetapi tercatat sebagai log. Menu Log Akses tersedia pada akun perusahaan, administrator data, administrator system, evaluator-group, supervisor, evaluator, holding, akun pemda (baru). Administrator system dapat melihat log akses setiap jenis akun (perusahaan, administrator data, evaluator-group, supervisor, evaluator, holding, akun pemda), terdapat opsi filter/sort, pencarian, dan eksport;
- f. Fitur Kirim Notifikasi via Email.

3.3. Realisasi Anggaran

Setditjen PPKL memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja. Anggaran DIPA Setditjen PPKL tahun 2020 sebesar Rp. 62.322.124.000,- (enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.597.856.840,- (enam puluh lima ratus ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL sebesar 97,23%.

Capaian kinerja Setditjen PPKL pada Tahun 2020 sebesar 102,98% berdasarkan Perjanjian Kinerja. Namun penilaian SAKIP belum dilaksanakan, sedangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 sebesar 78,02. Secara rinci capaian penyerapan anggaran berdasarkan indikator unit kerja untuk masing-masing sasaran program dapat dilihat pada Tabel 61 di bawah ini.

Tabel 61. Capaian Penyerapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
1	Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	3,870,692,000	3,848,422,677	99.42
		Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II)	423,864,000	408,319,150	96.33
		Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	3,547,888,000	3,535,086,910	99.64
		Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	410,127,000	371,262,500	90.52
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	85,900,000	84,565,000	98.45
		Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	110,600,000	110,600,000	100.00
2	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, tingkat UAKPA, rekonsiliasi tingkat UAKPA)	354,861,000	354,382,500	99.87
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	382,476,000	381,183,600	99.66
		Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi keuangan dan umum	167,554,000	166,962,500	99.65
		Terselenggaranya layanan umum dan kerumah tanggaan	6,910,986,000	6,844,220,248	99.03
		Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/ketatausahaan	12,918,408,000	12,824,080,767	99.27
		Terlaksananya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	30,806,803,000	29,480,227,284	95.69
3	Efektivitas Layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL	291,938,000	291,788,000	99.95
		Terselenggaranya Diklat PEDAL	7,100,000	7,100,000	100.00
		Tersedianya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	133,682,000	133,000,000	99.49
		Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	280,000	280,000	100.00
		Tersusunnya kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	138,750,000	138,525,000	99.84
		Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	106,596,000	106,185,185	99.61
		Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	1,800,000	1,800,000	100.00
		Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	151,437,000	131,390,000	86.76
		Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	40,950,000	39,940,000	97.53
		Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	53,944,000	53,900,000	99.92
		Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	22,300,000	22,300,000	100.00
		Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT			
4	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	503,827,000	484,029,169	96.07
		Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	125,355,000	124,157,750	99.04
		Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	368,600,000	291,847,000	79.18
		Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	121,814,000	120,854,000	99.21
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	263,592,000	261,447,600	99.19
5	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Sekretariat PROPER*	4,732,521,000	4,729,923,053	99.95
Total			62,322,124,000	60,617,856,840	97.27

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum

*) menggunakan anggaran Dit PPA

3.4. Efisiensi

Nilai efisiensi kegiatan dalam mencapai 5 (lima) sasaran program Setditjen PPKL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Indikator kinerja "Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi", "Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi", dan "Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri" memiliki nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 1,51. Rataan nilai efisiensi kegiatan satker Setditjen PPKL tahun 2020 sebesar 1,08 (> 1) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Secara lengkap, nilai efisiensi kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 62 berikut ini.

Tabel 62. Efisiensi Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
1	Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	100	99.42	1.01
		Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II)	100	96.33	1.04
		Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	150	99.64	1.51
		Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	100	90.52	1.10
		Terlaksannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	111.93	98.45	1.14
		Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	100	100.00	1.00
2	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, tingkat UAKPA, rekonsiliasi tingkat UAKPA)	100	99.87	1.00
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	100	99.66	1.00
		Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi keuangan dan umum	100	99.65	1.00
		Terselenggaranya layanan umum dan kerumah tanggaan	100	99.03	1.01
		Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/ketatausahaan	100	99.27	1.01
		Terlaksananya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	100	95.69	1.04
3	Efektivitas Kepegawaian Layanan dan Penataan Organisasi Tata Laksana	Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL	100	99.95	1.00
		Terselenggaranya Diklat PEDAL	100	100.00	1.00
		Tersedianya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	100	99.49	1.01
		Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	100	100.00	1.00
		Tersusunnya kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	100	99.84	1.00
		Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	100	99.61	1.00
		Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	100	100.00	1.00
		Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	100	86.76	1.15
		Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	100	97.53	1.03
		Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	100	99.92	1.00
		Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	100	100.00	1.00
		Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	100	100.00	1.00
4	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	107	96.07	1.11
		Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	150	99.04	1.51
		Analisis dan evaluasi peraturan perundang-	100	79.18	1.26

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
		undangan			
		Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	150	99.21	1.51
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	100	99.19	1.01
5	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Sekretariat PROPER*	101	99.95	1.01
Rata-rata			105.7	97.27	1.08

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

*) Menggunakan anggaran Dit. PPA

3.5. Efektifitas

Nilai efektifitas kegiatan dalam mencapai 5 (lima) sasaran program Setditjen PPPL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun 2020 terhadap capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun sebelumnya (tahun 2019), untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah efektif atau tidak efektif. Indikator kinerja "Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri" memiliki nilai efektifitas tertinggi yaitu sebesar 1,5. Rataan nilai efektifitas kegiatan satker Setditjen PPPL tahun 2020 sebesar 1,00 (=1) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2020 efektif berimbang dengan tahun lalu. Secara lengkap, nilai efektifitas kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 63 berikut ini.

Tabel 63. Efektifitas Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPPL Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Capaian Kinerja 2020 (%)	Efektivitas
1	Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	100	100	1.00
		Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II)	100	100	1.00
		Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	108.33	150	1.38
		Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	100	100	1.00
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	150	111.93	0.75
		Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	100	100	1.00
2	Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, tingkat UAKPA, rekonsiliasi tingkat UAKPA)	94.4	100	1.06
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	100	100	1.00
		Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi keuangan dan umum	100	100	1.00
		Terselenggaranya layanan umum dan keruhamhtanganan	100	100	1.00
		Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/ketatausahaan	100	100	1.00
		Terlaksananya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	150	100	0.67
3	Efektivitas Kepgawaihan Layanan dan Penataan Organisasi Tata Laksana	Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepgawaihan Lingkup Ditjen PPPL	100	100	1.00
		Terselenggaranya Diklat PEDAL	100	100	1.00
		Tersedianya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	100	100	1.00
		Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPPL	100	100	1.00
		Tersusunnya kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	100	100	1.00
		Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	100	100	1.00

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Capaian Kinerja 2020 (%)	Efektivitas
		Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	100	100	1.00
		Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	100	100	1.00
		Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	100	100	1.00
		Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	100	100	1.00
		Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	100	100	1.00
		Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	100	100	1.00
4	Efektifitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	150	107	0.71
		Fasilitasi layanaan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	150	150	1.00
		Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	-	100	-
		Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	100	150	1.50
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	100	100	1.00
5	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Sekretariat PROPER*	102	101	0.99
Rata-rata			107.06	105.66	1,00

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen PPKL Tahun Anggaran 2020 secara umum telah sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Hasil evaluasi sementara maturitas SPIP tahun 2020 yang dilakukan oleh Tim Asesor Inspektorat Jenderal, mencapai sebesar 3,385 poin.
3. Hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL mencapai 31,01 dari bobot sebesar 36,30.
4. Penyerapan anggaran Setditjen PPKL Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 60.617.856.840,- (enam puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau 97,27% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 62.322.124.000,- (enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
5. Capaian kinerja Setditjen PPKL Tahun 2020 mencapai 102,98% yang menunjukkan semua target yang ditetapkan dapat tercapai..
6. Efisiensi kinerja Setditjen PPKL Tahun 2020 adalah 1,08 dan menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien.
7. Efektifitas kinerja Setditjen PPKL Tahun 2020 adalah 1,00 dan menunjukkan pelaksanaan kegiatan efektif berimbang dengan tahun sebelumnya.
8. Hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2019 sebesar 78,02. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (77,14) dan telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019.

4.2. Saran

1. Meningkatkan penyelenggaraan SAKIP lingkup Ditjen PPKL.
2. Melakukan reviu secara berkala terhadap perencanaan kegiatan yang dilakukan agar efektifitas dan efisiensi kinerja dapat ditingkatkan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan SPIP dan Reformasi Birokrasi.
4. Melakukan evaluasi secara mandiri maturitas SPIP lingkup Ditjen PPKL
5. Mengoptimalkan pemanfaatan E-Monev Ditjen PPKL.
6. Menata kembali kapasitas SDM untuk mendukung pencapaian kinerja.
7. Merubah strategi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 dan meningkatkan pengawasan, sehingga kinerja tetap dapat dilaksanakan dan target dapat tercapai.
8. Tetap memperhatikan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan pertemuan atau tatap muka.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Drs. M.R. Karliansyah, M.S

Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,

Drs. M.R. Karliansyah, M.S
NIP. 19610328 199203 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
NIP. 19681111 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai minimal 79 di Tahun 2020	79
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Laporan Keuangan Ditjen. PPKL yang tertib dan Akuntabel	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	4 kali pertemuan

Kegiatan (5) Anggaran (6)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan **Rp. 58.557.504.000,-**

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran
Dan Kerusakan Lingkungan,

Jakarta, Mei 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran
Dan Kerusakan Lingkungan

Drs. M.R. Karliansyah, M.S
NIP. 19610328 199203 1 001

Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
NIP. 19681111 199503 1 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	30.03	36.66	43.29	79.00
		Level Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Desan SPIP - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan IV 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan III
		Laporan Keuangan Ditjen. PPKL yang tertib dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan IV 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan III
2.	Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	1 kegiatan pembinaaan	1 kegiatan pembinaaan	1 kegiatan pembinaaan	1 kegiatan pembinaaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tulus Laksono, SH

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Setditjen. PPKL

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,



Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.
NIP. 19681111 199503 1 001

Pihak Pertama,



Tulus Laksono, SH
NIP. 19710713 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	4 Dokumen
		2. Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj Eselon I, dan LKj. Eselon II)	6 Laporan
		3. Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	18 Publikasi
		4. Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	100 persen
		5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3
		6. Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	1 Dokumen

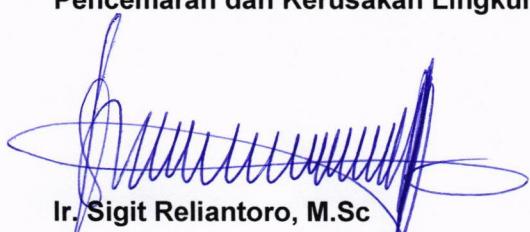
Kegiatan (5)

Anggaran (6)

Program dan Evaluasi, Setditjen. PPKL

Rp. 6.932.321.000,-

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,



Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
NIP. 19681111 199503 1 001

Jakarta, Mei 2020

Kepala Bagian Program dan Evaluasi,



Tulus Laksono, SH
NIP. 19710713 199703 1 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

No.	Sasaran	Indikator	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja (PK), dan RKAKL)	1 Dokumen PK	1 Dokumen RENSTRA	1 Dokumen RKAKL	1 Dokumen RENJA	
	2. Tersedianya Dokumen Pelaporan (Monev Triwulan, LKj eselon I, dan LKj Eselon II)	3 Laporan (Monev TW. IV, LKj eselon I, dan LKj Eselon II)	1 Laporan TW. I	1 Laporan TW. II	1 Laporan TW. III	
	3. Terselenggaranya Layanan Kehumasan, Data dan Informasi	4 Publikasi	4 Publikasi	5 Publikasi	5 Publikasi	
	4. Terselenggaranya Barang dan Jasa Pemerintah	100%	100%	100%	100%	
	5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Desain SPIP, Laporan TW. IV 2019, Laporan Tahunan 2019	Laporan TW. I 2020	Laporan TW. II 2020	Laporan TW. III 2020	
	6. Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	1 (Data)	1 (Draft)	1 (Final)	-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

In. Sigit Reliantoro, M.Sc.
NIP. 196811111995031001

Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM
NIP. 196709281988031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya laporan Keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi tingkat UAKPA)	18 Laporan
		2. Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	1 Laporan
		3. Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi Keuangan dan Umum	1 Laporan
		4. Terselenggaranya layanan umum dan keruماhtangan	1 Laporan
		5. Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/Ketatausahaan	1 Laporan
		6. Terlaksananya pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja	39 Dokumen

Program/Kegiatan (5)
Kegiatan Bagian Keuangan dan Umum

Anggaran (6)
Rp. 48.689.845.000,-

Jakarta, Mei 2020

Menyetujui

Sekretaris Direktorat Jenderal

(M. Sigit Reliantoro, M.Sc.)
NIP. 196811111995031001

Kepala Bagian Keuangan dan Umum

(Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM)
NIP. 196709281988031002

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

No.	Sasaran	Indikator	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya laporan Keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (tingkat eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi tingkat UAKPA)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Tahunan eselon I dan Satker tahun 2019 - Laporan BMN - Laporan Barang Persediaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi UAKPA - Laporan Operasional Perkantoran - Terlaksana ya evaluasi - Terlaksana ya SIK-V4 Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Semester eselon I dan Satker - Rekonsiliasi UAKPA - Laporan Barang Persediaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Pseudo - Laporan Barang Persediaan
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	- Tingkat kepatuhan 100%			
		Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk layanan administrasi Keuangan dan Umum	-	-	- Petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan Umum	-
		Terselenggaranya layanan umum dan keruماhtangan	Layanan umum dan keruماhtangan gaan	Layanan umum dan keruماhtangan gaan	Layanan umum dan keruماhtangan gaan	Layanan umum dan keruماhtangan ggaan
		Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/Ketatau sahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana nya pelayanan surat masuk dan surat keluar, kearsipan dan pelayanan pimpinan - Terlaksana nya pelayanan ruang rapat dan jamuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana nya pelayanan surat masuk dan surat keluar, kearsipan dan pelayanan pimpinan - Terlaksana nya pelayanan ruang rapat dan jamuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana nya pelayanan surat masuk dan surat keluar, kearsipan dan pelayanan pimpinan - Terlaksana nya pelayanan ruang rapat dan jamuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana nya pelayanan surat masuk dan surat keluar, kearsipan dan pelayanan pimpinan - Terlaksana nya pelayanan ruang rapat dan jamuan
		Terlaksananya pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja	Terselenggaranya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	Terselenggaranya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	Terselenggaranya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	Terselenggaranya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nur Rochman

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir.Sigit Reliantoro, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc

NIP. 19681111 199503 1 001

Pihak Pertama,

Drs. Nur Rochman

NIP. 19670122 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Efektifitas layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	1 Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL	15 Layanan
		2 Terselenggaranya Diklat PEDAL	1 Laporan
		3 Tersedianya Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1 Dokumen
		4 Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
		5 Tersusunnya Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	2 Dokumen
		6 Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	1 Laporan
		7 Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	1 Laporan
		8 Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
		9 Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	1 Dokumen
		10 Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
		11 Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
		12 Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	2 Dokumen

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian
2. Kegiatan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana & Reformasi Birokrasi

Anggaran

: Rp. 940.178.000,-
: Rp. 585.892.000,-

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua



Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
NIP. 19681111 199503 1 001

Pihak Pertama,



Drs. Nur Rochman
NIP. 19670122 199503 1 001

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1	Efektifitas layanan Kepegawai dan Penataan Organisasi Tata Laksana	1 Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawai Lingkup Ditjen PPKL	- Tersedianya berkas/dokumen terkait layanan administrasi periode Januari - Maret 2020	- Tersedianya berkas/dokumen terkait layanan administrasi periode April - Juni 2020	- Tersedianya berkas/dokumen terkait layanan administrasi periode Juli - September 2020	- Tersedianya berkas/dokumen terkait layanan administrasi periode Oktober - Desember 2020
		2 Terselenggaranya Diklat PEDAL	- Tersedianya daftar peserta diklat peningkatan kapasitas JF Pedal Angkatan I	-	-	- Terlaksananya Diklat JF Pedal Angkatan I
		3 Tersedianya Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	- Terselesaikannya hasil penilaian angka kredit JF Pedal	-	- Terselesaikannya Penilaian angka kredit JF Pedal	- Terselesaikannya Penilaian angka kredit JF Pedal
		4 Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	-	-	-	- Terlaksananya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
		5 Tersusunnya Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	- Tersedianya dokumen draft Juklak Jabatan Fungsional PEDAL	-	-	- Tersedianya dokumen draft Juknis dan Lampiran
		6 Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	-	-	-	- Tersedianya bahan materi/dokumen Sosialisasi PEDAL
		7 Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	-	-	- Tersusunnya daftar peserta diklat peningkatan kapasitas SDM Lingkup Ditjen PPKL sebanyak 30 Pegawai	- Terlaksananya peningkatan pembinaan kapasitas SDM sebanyak 30 Pegawai
		8 Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	- Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	- Tersedianya Draft Rencana Aksi, SK Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020	- Terlaksananya Sosialisasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020	- Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
		9 Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	- Tersedianya Draft Struktur Organisasi Ditjen PPKL	- Tersedianya Draft Lampiran Struktur Organisasi Ditjen PPKL	- Tersedianya Dokumen Struktur Organisasi Baru Ditjen PPKL	-
		10 Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	- Tersedianya Draft Awal Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL		- Terlaksananya Penyusunan Draft Final Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	- Tersedianya Dokumen Peta Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL
		11 Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	-	- Tersedianya dokumen ABK dan Anjab yang disesuaikan	-	-
		12 Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	-	- Tersedianya usulan Penyetaraan Jabatan Struktural	- Tersedianya Dokumen usulan alih tugas JFU ke JFT	-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Harwati, S.Si, MAS
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Pertama,



Fitri Harwati S.Si, MAS

NIP. 19681219 199503 2 001

Pihak Kedua,



Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc

NIP. 19681111 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Efektivitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	67
		Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	60
		Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	4
		Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	20
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	1
2	Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Sekretariat PROPER	2036

Kegiatan (5)	Anggaran (6)
Efektivitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Rp. 1.503.268.000,-
Efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	Rp. 5.385.691.000,-

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian
 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
 NIP. 19681111 199503 1 001

Jakarta, Mei 2020

Kepala Bagian Hukum dan Kerja
 sama Teknik, Setditjen PPKL

Fitri Harwati

Fitri Harwati S.Si, MAS
 NIP. 19681219 199503 2 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektivitas pelayanan dan pembinaan hukum, serta fasilitasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	35	11	11	10
		Fasilitasi layanan perizinan pembuangan air limbah ke laut dan izin injeksi	15	15	15	15
		Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	0	0	2	2
		Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	12	2	3	3
		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Pengumpulan data	Pengumpulan data	Pengumpulan data, pengolahan data, pelaksanaan pemantauan & Evaluasi	pelaksanaan pemantauan & evaluasi, dan Laporan Final

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Efektifitas Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggarakannya sekretariat PROPER	Kesepakatan Penetapan Peserta PROPER 2019-2020 dengan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan SK industri peserta PROPER 2019-2020 2. Laporan Refreshment dan Sosialisasi untuk perusahaan peserta PROPER 2019-2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil evaluasi sementara 2036 perusahaan PROPER melalui SIMPEL 2. Laporan hasil sanggahan 2036 perusahaan peserta PROPER melalui SIMPEL 3. Laporan hasil Supervisi kegiatan PROPER oleh Provinsi 4. Laporan hasil Sosialisasi PROPER Hijau 2020 kepada perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penerimaan dan evaluasi dokumen hijau PROPER 2. Laporan hasil penilaian dan verifikasi perusahaan PROPER kandidat peringkat emas 3. Laporan hasil peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan tahun 2020 untuk 2036 industri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Ariswari, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tulus Laksono, SH

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Setditjen PPKL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Tulus Laksono, SH
NIP. 19710713 199703 1 001

Pihak Pertama,

Rini Ariswari, ST
NIP. 19730307 200604 2 033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya dokumen RKAKL	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja)	2 Dokumen
		Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra)	2 Dokumen
		Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Eselon (PK)	1 Dokumen
		Terlaksananya revisi anggaran, program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1 Laporan

Kegiatan :

Sub Bag. Program & Anggaran

Anggaran :

RP. 3.909.261.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,

Kepala Bagian Program dan Evaluasi



(Tulus Laksono, SH)
 NIP. 19710713 199603 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran



(Rini Ariswari, ST)
 NIP. 19730307 200604 2 033

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

No	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya dokumen RKA KL	Sosialisasi dan Pengumpulan bahan penyusunan Anggaran TA 2021	Penyusunan Draft Anggaran	Penelaahan Dokumen RKA KL	Dokumen RKAL Tahun Anggaran 2021
		Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja)	1. Finalisasi Dokumen Renja TA 2020 2. Sosialisasi dan Pengumpulan bahan penyusunan Anggaran TA 2021	Trilateral Meeting Renja TA 2021	Pembahasan Draft Renja TA 2021	Penyusunan Draft Renja TA 2021
		Tersedianya dokumen Rencana Strategis	1. Reviu Renstra TA 2015 - 2019 2. Sosialisasi dan Pengumpulan bahan penyusunan Renstra 2021 – 2024 3. Penyusunan Draft Renstra 2021 – 2024	1. Penelaahan Dokumen Renstra TA 2020 - 2024 2. Dokumen Renstra TA 2020 - 2024	Reviu Renstra	Penyusunan Draft Reviu Renstra
		Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Eselon (PK)	Dokumen PK Tahun Anggaran 2020	Trilateral Meeting Pembahasan Program dan Kegiatan	Trilateral Meeting Pembahasan Program dan Kegiatan	Sosialisasi dan Pengumpulan bahan penyusunan PK Tahun Anggaran 2021
		Terlayaninya revisi anggaran, program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tantri Endarini, S.Si., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tulus Laksono, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Tulus Laksono, S.H.
NIP. 19710713 199703 1 001

Pihak Pertama,

Tantri Endarini, S.Si., M.Si.
NIP. 19701114 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Efektivitas perencanaan evaluasi, data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya dokumen pelaporan monev triwulanan capaian kinerja	4 Laporan
		2. Tersedianya dokumen pelaporan LKj Eselon I dan II	2 Laporan
		3. Tersedianya Desain Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Lingkup Setditjen PPKL	1 Dokumen
		4. Tersedianya dokumen pelaporan monev triwulanan dan tahunan penyelenggaraan SPIP lingkup Setditjen PPKL	5 Laporan
		5. Tersedianya bahan layanan kehumasan	18 Publikasi
		6. Tersedianya bahan layanan data dan informasi	1 Dokumen

Program/Kegiatan (5)

1. Kegiatan Subbag Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi

Anggaran (6)

Rp. 3.023.060.000,-

Jakarta, Mei 2020

Menyetujui

Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Kepala Subbag Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi



(Tulus Laksono, S.H.)

NIP. 19710713 199703 1 001



(Tantri Endarini, S.Si., M.Si.)

NIP. 19701114 199703 2 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektivitas perencanaan evaluasi, data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya dokumen pelaporan monev triwulanan capaian kinerja	Laporan Triwulan IV 2019	Laporan Triwulan I 2020	Laporan Triwulan II 2020	Laporan Triwulan III 2020
		2. Tersedianya dokumen pelaporan LKj Eselon I dan II	2 (LKj Ditjen PPKL dan Setditjen PPKL 2019)	-	-	2 (LKj Ditjen PPKL dan Setditjen PPKL 2020)
		3. Tersedianya Desain Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Lingkup Setditjen PPKL	Desain SPIP Tahun 2020	-	-	Draft Desain SPIP Tahun 2021
		4. Tersedianya dokumen pelaporan monev triwulanan dan tahunan penyelenggaraan SPIP lingkup Setditjen PPKL	Laporan Tahunan 2019 Laporan Triwulan IV 2019	Laporan Triwulan I 2020	Laporan Triwulan II 2020	Laporan Triwulan III 2020
		5. Tersedianya bahan layanan kehumasan	4 Publikasi	4 Publikasi	5 Publikasi	5 Publikasi
		6. Tersedianya bahan layanan data dan informasi	1 (Data)	1 (Draft)	1 (Final)	-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Muzayamah, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Umum

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM
NIP. 196708281988031002

Siti Muzayamah, SE
NIP. 197312281998032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Efektivitas pelayanan Administrasi Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tersedianya Laporan Keuangan semester I, Pseudo, Tahunan tingkat Eselon I dan UAKPA	6 Dokumen
		2. Tersedianya Rekonsiliasi UAKPA	12 Dokumen
		3. Terselenggaranya Optimalisasi Pengelolaan Anggaran	1 Laporan
		4. Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	1 Laporan
		5. Terlaksananya pembayaran pengelola administrasi keuangan	12 Dokumen
		6. Terselenggaranya penyegaran bendahara	1 Laporan
		7. Tersedianya dokumen pencairan anggaran	100 %
		8. Terlaksananya pembayaran gaji PPNPN	13 Dokumen
		9. Terlaksananya pembayaran gaji, Kekurangan gaji dan Uang makan	26 Dokumen
		10. Terlaksananya pembayaran tunjangan kinerja	13 Dokumen

Program/Kegiatan (5)

1. Pengelolaan Keuangan
2. Pengelolaan Perbendaharaan
3. Layanan Perkantoran :
 - Gaji dan Tunjangan
 - Pengelolaan dan Layanan Adm

Anggaran (6)

Rp. 645.506.000,-
Rp. 177.720.000,-
Rp. 30.608.565.000,-
Rp. 5.095.524.000,-

Jakarta, Mei 2020

Menyetujui

Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan



(Sugeng Yos Budiarto, S,Sos,MM)
 NIP. 196708281988031002



(Siti Muzayamah, SE)
 NIP. 197312281998032001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

No.	Sasaran	Indikator	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Efektivitas pelayanan Administrasi Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Laporan Keuangan semester I, Pseudo, Tahunan tingkat Eselon I dan UAKPA	Melakukan penyusunan Laporan keuangan tahunan(unaudited) satker dan eselon I	Melakukan penyusunan laporan keuangan audited dan Laporan Keuangan Likuidasi	Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan semester I tingkat eselon I dan Satker	Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan pseudo tingkat eselon I dan Satker
		Tersedianya Rekonsiliasi UAKPA	Berita Acara Rekonsiliasi	Berita Acara Rekonsiliasi	Berita Acara Rekonsiliasi	Berita Acara Rekonsiliasi
		Terselenggaranya Optimalisasi Pengelolaan Anggaran	Evaluasi pengelolaan anggaran	Evaluasi pengelolaan anggaran	Evaluasi pengelolaan anggaran	Evaluasi pengelolaan anggaran
		Terselenggaranya pelaksanaan petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum			Petunjuk teknis administrasi keuangan	
		Terlaksananya pembayaran pengelola administrasi keuangan	Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan	Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan	Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan	Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan
		Terselenggaranya penyegaran bendahara				- Sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun 2020
		Tersedianya dokumen pencairan anggaran	Melakukan proses pencairan anggaran melalui proses : 1. Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. Pembayaran Langsung Ke Bendahara Pengeluaran 3. Pihak Ketiga (Kontraktual dan Non Kontraktual)	Melakukan proses pencairan anggaran melalui proses : 1. Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. Pembayaran Langsung Ke Bendahara Pengeluaran 3. Pihak Ketiga (Kontraktual dan Non Kontraktual)	Melakukan proses pencairan anggaran melalui proses : 1. Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. Pembayaran Langsung Ke Bendahara Pengeluaran 3. Pihak Ketiga (Kontraktual dan Non Kontraktual)	Melakukan proses pencairan anggaran melalui proses : 1. Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. Pembayaran Langsung Ke Bendahara Pengeluaran 3. Pihak Ketiga (Kontraktual dan Non Kontraktual)
		Terlaksananya pembayaran gaji PPNPN	- Pembayaran gaji PPNPN	- Pembayaran gaji PPNPN	- Pembayaran gaji PPNPN	- Pembayaran gaji PPNPN
		Terlaksananya pembayaran gaji, Kekurangan gaji dan Uang makan	- Pembayaran Gaji , Kekurangan Gaji dan Uang makan	- Pembayaran Gaji , Kekurangan Gaji dan Uang makan	- Pembayaran Gaji , Kekurangan Gaji dan Uang makan	- Pembayaran Gaji , Kekurangan Gaji dan Uang makan
		Terlaksananya pembayaran tunjangan kinerja	- Pembayaran Tunjangan Kinerja	- Pembayaran Tunjangan Kinerja	- Pembayaran Tunjangan Kinerja	- Pembayaran Tunjangan Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Faisal , S.Kom.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Umum

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM
NIP. 19670826 198803 1 002

Pihak Pertama,

Mochamad Faisal , S.Kom.
NIP. 19750430 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Efektivitas Pelayanan Perlengkapan	1. Tersedianya Laporan Penatausahaan BMN	3 Laporan
		2. Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Persediaan	2 Laporan
		3. Terselenggaranya Pembinaan BMN dan layanan umum berupa keamanan dan kebersihan	1 Laporan
		4. Tersedianya dukungan operasional berupa penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, dan renovasi ruang	4 Laporan

Program/Kegiatan (5)

1. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
2. Layanan Perkantoran :
Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Anggaran (6)

Rp. 3.451.118.000,-
Rp. 5.781.672.000,-

Jakarta, Mei 2020

Menyetujui,
Kepala Bagian Keuangan dan Umum



(Sugeng Yos Budiarto)
NIP. 19670826 198803 1 002

Kepala Subbagian Perlengkapan



(Mochamad Faisal)
NIP. 19750430 200003 1 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Efektivitas Pelayanan Perlengkapan	1. Tersedianya Laporan Penatausahaan BMN	Laporan Tahunan 2019	2 Laporan Semester I 2020 (Ditjen PPKL dan Setditjen PPKL 2020)	-	2 Laporan Semester II 2020 (Ditjen PPKL dan Setditjen PPKL 2020)
		2. Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Persediaan	-	2 Laporan Semester I 2020 (Ditjen PPKL dan Setditjen PPKL 2020)	-	2 Laporan Semester II 2020 (Ditjen PPKL dan Setditjen PPKL 2020)
		3. Terselenggaranya Pembinaan BMN dan layanan umum berupa keamanan dan kebersihan	-	-	-	Laporan Tahunan 2020
		4. Tersedianya dukungan operasional berupa penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, dan renovasi ruang	Laporan Triwulan I 2020	Laporan Triwulan II 2020	Laporan Triwulan III 2020	Laporan Triwulan IV 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Rina Ariyati, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Setditjen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Umum

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Sugeng Yos Budiarto, S.Sos, MM
NIP. 19670826 198803 1 002

Pihak Pertama,

Diah Rina Ariyati, SE
NIP. 19691120 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Efektivitas perencanaan evaluasi, data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Terlaksananya kegiatan <i>Eco Office</i> 2. Terlaksananya Pembinaan Ketatausahaan 3. Terlaksananya layanan Persuratan dan Karsipan 4. Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik 5. Terlaksananya Pengelolaan Karsipan 6. Tersedianya layanan penggunaan ruang rapat, jamuan konsumsi beserta fasilitas yang diperlukan 7. Terlaksananya kegiatan pimpinan 8. Terlaksananya kegiatan pencegahan Covid-19	1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Program/Kegiatan (5)

1. Pelayanan Rumah Tangga

Anggaran (6)

Rp. 1.564.740.000,-

2. Layanan Perkantoran

Jamuan Konsumsi

Rp. 1.365.000.000,-

Jakarta, Mei 2020

Menyetujui

Kepala Bagian Keuangan dan Umum

(Sugeng Yos Budiarso, S.Sos. MM)

NIP. 19670826 198803 1 002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(Diah Rina Ariyati, SE)

NIP. 19691120 199703 2 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektivitas pelayanan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Terlaksananya kegiatan <i>Eco Office</i>	-	Pengadaan alat penunjang Eco Office	Pemasangan alat penunjang Eco Office	-
		2. Terlaksananya Pembinaan Ketatausahaan	-	-	Evaluasi perlaksanaan SIK-V4 Tahun 2019	-
		3. Terlaksananya layanan Persuratan dan Karsipan	Pelayanan surat masuk dan keluar serta pelayanan arsip	Pelayanan surat masuk dan keluar serta pelayanan arsip	Pelayanan surat masuk dan keluar serta pelayanan arsip	Pelayanan surat masuk dan keluar serta pelayanan arsip
		4. Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik	Penomoran surat masuk dan keluar melalui aplikasi Sistem Informasi Karsipan	Penomoran surat masuk dan keluar melalui aplikasi Sistem Informasi Karsipan	Penomoran surat masuk dan keluar melalui aplikasi Sistem Informasi Karsipan	Penomoran surat masuk dan keluar melalui aplikasi Sistem Informasi Karsipan
		5. Terlaksananya Pengelolaan Karsipan	-	-	Pengelolaan Arsip Aktif Pada Direktorat Jenderal PPKL	-
		6. Tersedianya layanan penggunaan ruang rapat, jamuan konsumsi beserta fasilitas yang diperlukan	Pelayanan ruang rapat dan jamuan			
		7. Terlaksananya kegiatan pimpinan	Pelayanan pimpinan	Pelayanan pimpinan	Pelayanan pimpinan	Pelayanan pimpinan
		8. Terlaksananya kegiatan pencegahan Covid-19	Pengadaan Alat pendukung pencegahan Covid-19 dan Suplemen daya tahan tubuh	Pengadaan Alat pendukung pencegahan Covid-19 dan Suplemen daya tahan tubuh	-	-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawa Sopian, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Nur Rochman
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Drs. Nur Rochman
NIP. 19670122 199503 1 001

Pihak Pertama,

Wawa Sopian, S.Sos
NIP. 19720711 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Efektifitas layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	1 Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL	15 Layanan
		2 Terselenggaranya Diklat PEDAL	1 Dokumen
		3 Tersedianya Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	10 PAK
		4 Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
		5 Tersusunnya Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	2 Dokumen
		6 Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	1 Laporan
		7 Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	1 Laporan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian

Anggaran

: Rp. 940.178.000,-

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Drs. Nur Rochman
 NIP. 19670122 199503 1 001

Pihak Pertama,

Wawa Sopian, S.Sos
 NIP. 19720711 199511 1 001

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1	Efektifitas layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana	1 Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya berkas/dokumen usul kenaikan pangkat (periode April 2020) - Tersedianya Daftar KGB PNS Lingkup PPKL (KGB Januari - Maret 2020) - Tersedianya Rekapitulasi Laporan Absensi, Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Uang Makan Lingkup Ditjen PPKL (Januari - Maret 2020) - Tersedianya Surat Usulan Pengangkatan PNS kepada Biro Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar KGB PNS Lingkup PPKL (KGB April - Juni 2020) - Tersedianya Surat Usulan Penetapan Karis/Karsu - Tersedianya Rekapitulasi Laporan Absensi, Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Uang Makan Lingkup Ditjen PPKL (April - Juni 2020) - Tersedianya SK Pensiun (April&Juni 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya berkas/dokumen usul kenaikan pangkat (periode Oktober) - Tersedianya Daftar KGB PNS Lingkup PPKL (KGB Juli - September 2020) - Tersedianya Rekapitulasi Laporan Absensi, Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Uang Makan Lingkup Ditjen PPKL (Juli-September 2020) - Tersedianya SK Pensiun (September 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Daftar KGB PNS Lingkup PPKL (KGB Oktober - Desember 2020)) - Tersedianya Rekapitulasi kinerja pegawai berdasarkan aplikasi penilaian (bulanan) - Tersedianya Rekapitulasi Laporan Absensi, Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Uang Makan Lingkup Ditjen PPKL (Oktober-Desember 2020) - Tersedianya SK Pensiun (Oktober 2020)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya daftar izin cuti PNS lingkup PPKL (Januari - Maret 2020) - Tersedianya berkas/dokumen usul tanda kehormatan untuk Hari Bhakti Rimbawan - Tersedianya Rekapitulasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Ditjen PPKL 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya daftar izin cuti PNS lingkup PPKL (April - Juni 2020) - Tersedianya berkas/dokumen usul tanda kehormatan untuk Peringatan Hari Kemerdekaan RI - Tersedianya Surat Usulan Rekomendasi hukuman disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya daftar izin cuti PNS lingkup PPKL (Juli-September 2020) - Tersedianya Surat Usulan Penerbitan TASPEN kepada PT. Taspen - Daftar Usulan Pengajuan Kartu Pegawai sebanyak 27 Pegawai - Tersedianya Surat Usulan Alih Tugas /Penyetaraan Internal maupun Eksternal Ditjen PPKL 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya daftar izin cuti PNS lingkup PPKL (Oktober-Desember 2020)
	2	Terselenggaranya Diklat PEDAL	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya daftar peserta diklat peningkatan kapasitas JF Pedal Angkatan I 	-	-	- Terlaksananya Diklat JF Pedal Angkatan I
	3	Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Terselesaikannya hasil penilaian angka kredit JF Pedal 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Terselesaikannya Penilaian angka kredit JF Pedal 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselesaikannya Penilaian angka kredit JF Pedal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
		4 Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL	-	-	-	- Terlaksananya Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PPKL
		5 Tersusunnya Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL	- Tersedianya dokumen draft Juklak Jabatan Fungsional PEDAL	-	-	- Tersedianya dokumen draft Juknis dan Lampiran
		6 Terselenggaranya Sosialisasi PEDAL	-	-	-	- Tersedianya bahan materi/dokumen Sosialisasi PEDAL
		7 Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Ditjen PPKL	-	-	- Tersusunnya daftar peserta diklat peningkatan kapasitas SDM Lingkup Ditjen PPKL sebanyak 30 Pegawai	- Terlaksananya peningkatan pembinaan kapasitas SDM sebanyak 30 Pegawai



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sa'dullah, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Nur Rochman

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Drs. Nur Rochman
NIP. 19670122 199503 1 001

Pihak Pertama,

Sa'dullah, SE
NIP. 19750611 200604 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Efektifitas layanan Penataan Organisasi Tata Laksana	1 Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
		2 Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	1 Dokumen
		3 Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
		4 Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
		5 Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	2 Dokumen

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana & Reformasi Birokrasi:

Anggaran

: Rp. 585.892.000,-

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Drs. Nur Rochman
 NIP. 19670122 199503 1 001

Pihak Pertama,


Sa'dullah, SE
 NIP. 19750611 200604 1 022

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1	Efektifitas layanan Penataan Organisasi Tata Laksana	1 Terselenggaranya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL	- Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	- Tersedianya Draft Rencana Aksi, SK Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020	- Terlaksananya Sosialisasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020	- Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2020
		2 Tersusunnya Struktur Organisasi Ditjen PPKL	- Tersedianya Draft Struktur Organisasi Ditjen PPKL	- Tersedianya Draft Lampiran Struktur Organisasi Ditjen PPKL	- Tersedianya Dokumen Struktur Organisasi Baru Ditjen PPKL	-
		3 Tersusunnya Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	- Tersedianya Draft Awal Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL		- Terlaksananya Penyusunan Draft Final Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL	- Tersedianya Dokumen Peta Bisnis Proses Lingkup Ditjen PPKL
		4 Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Ditjen PPKL	-	- Tersedianya dokumen ABK dan Anjab yang disesuaikan	-	-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
		5 Tersusunnya Penyetaraan Jabatan Struktural dan Alih Tugas JFU ke JFT	-	- Tersedianya usulan Penyetaraan Jabatan Struktural	- Tersedianya Dokumen usulan alih tugas JFU ke JFT	-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bekti Budhi Rahayu

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerja Sama Teknik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitri Harwati

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,

Fitri Harwati, S.Si, MAS

NIP. 19681219 199503 2 001

Pihak Pertama,

Bekti Budhi Rahayu, ST.

NIP. 19730616 199903 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAGIAN HUKUM - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Efektifitas Fasilitasi Kerja Sama Teknik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri dan penyelenggaran bimbingan teknis	20
		Tersedianya laporan Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Teknik	1
2.	Efektifitas Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggarakannya sekretariat PROPER	2036

Program/Kegiatan	Anggaran
Efektifitas Fasilitasi Kerja Sama Teknik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 566.486.000,-
Efektifitas Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 5.385.691.000,-

Jakarta, Mei 2020

Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama
Teknik, Setditjen PPKL

Fitri Harwati S.Si, MAS
NIP. 19681219 199503 2 001

Kepala Sub Bagian Kerja Sama
Teknik, Setditjen PPKL

Bekti Budhi Rahayu, ST.
NIP. 19730616 199903 2 001

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NAMA UNIT ORGANISASI:SUB BAGIAN KERJA SAMA TEKNIK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator Unit Kerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Efektifitas Fasilitasi Kerja Sama Teknik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	12	2	3	3
		Tersedianya laporan Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Teknik	Pengumpulan Data	Pengumpulan Data	Pengumpulan data, pengolahan data, pelaksanaan pemantauan & Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan & evaluasi, dan Laporan Final

No.	Sasaran Unit Kerja	Indikator UnitKerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Efektifitas Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggarakannya sekretariat PROPER	Kesepakatan Penetapan Peserta PROPER 2019-2020 dengan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan SK industri peserta PROPER 2019-2020 2. Laporan Refreshment dan Sosialisasi untuk perusahaan peserta PROPER 2019-2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil evaluasi sementara 2036 perusahaan PROPER melalui SIMPEL 2. Laporan hasil sanggahan 2036 perusahaan peserta PROPER melalui SIMPEL 3. Laporan hasil Supervisi kegiatan PROPER oleh Provinsi 4. Laporan hasil Sosialisasi PROPER Hijau 2020 kepada perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penerimaan dan evaluasi dokumen hijau PROPER 2. Laporan hasil penilaian dan verifikasi perusahaan PROPER kandidat peringkat emas 3. Laporan hasil peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan tahun 2020 untuk 2036 industri

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veronica Katrine, S.P.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitri Harwati, S.Si, MAS

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fitri Harwati".

Fitri Harwati, S.Si, MAS

NIP. 19681219 199503 2 001

Pihak Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Veronica Katrine".

Veronica Katrine, S.P.

NIP. 19800620 200701 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAGIAN HUKUM - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Efektivitas Pelayanan dan Pembinaan Hukum	Penataan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	67
		Fasilitasi Layanan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi	60
		Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	4

Program/Kegiatan	Anggaran
Efektivitas Pelayanan dan Pembinaan Hukum	Rp. 936.782.000,-

Jakarta, Mei 2020

Menyetujui

Nama Jabatan (Atasan Langsung)

(Fitri Harwati, S.Si, MAS)

Nama Jabatan

(Veronica Katrine, S.P.)

TARGET TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NAMA UNIT ORGANISASI: BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Efektivitas Pelayanan dan Pembinaan Hukum	Penataan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	35	11	11	10
		Fasilitasi Layanan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi	15	15	15	15
		Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	2	2

**DAFTAR IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA PEMOHON	NO. REGISTRASI	TAHUN PENGAJUAN	PROVINSI	JENIS INDUSTRI	JENIS PENGAJUAN	NOMOR SURAT PENGANTAR	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT	PENERBIT	ISI PENGATURAN
1	PT Berkat Air Laut (Gili Meno)	R201907250010	2019	Nusa Tenggara Barat	Pengolahan Air Laut Menjadi Air Tawar	IPLC Ke Laut Baru	SK.41/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2020	15 Januari 2020		KLHK	Sumber Air Limbah berasal dari Reject Revers Osmosis dari air limbah berupa brine yang dibuang ke laut
2	PT Berkat Air Laut (Gili Trawangan)	R201907250010	2019	Nusa Tenggara Barat	Pengolahan Air Laut Menjadi Air Tawar	IPLC Ke Laut Baru	SK.43/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2020	15 Januari 2020		KLHK	Sumber Air Limbah berasal dari Reject Revers Osmosis dari air limbah berupa brine yang dibuang ke laut
3	PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang	R201903050032	2019	Jawa Tengah	Pembangkit Listrik	Perpanjangan IPLC Ke Laut	SK.49/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2020	22 Januari 2020		KLHK	Air Limbah berasal dari Air Bahang Cooling Tower, Air Limbah Proses Utama, Air Limbah Desalinasi, Air Limbah Buangan dari Reverse Osmosis, dan Air Limbah yang mengandung Minyak
4	PT Pertamina (Persero) TBBM Makassar	R201905030020	2019	Sulawesi Selatan	Distribusi Bahan Bakar Minyak	IPLC Ke Laut Baru	SK.50/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2020	22 Januari 2020		KLHK	Air limbah bersumber dari Oil Catcher 1 dan 2, drainase air hujan yang bersinggungan dengan are tanki timbun, area dryingbed, genset dan bengkel, fillingshed, dan area rumah pompa
5	PT PLN (Persero) PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	R201904110010	2019	Sumatera Utara	Pembangkit Listrik	IPLC Ke Laut Baru	SK.51/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2020	22 Januari 2020		KLHK	Air Limbah berasal dari air limbah pendingin/bahang (cooling water) , air limbah WWTP/Regenerasi Resin dan air limbah blowdown, air limbah lindi stockpile, air limbah domestik black water dan grey water, air limbah reject water, dan air limbah mengandung minyak.
6	PT Krakatau Posco	R201905100007	2019	Banten	Peleburan Besi Baja	IPLC Ke Laut Baru	SK.73/Menlhk/Setjen/PKL.1/2/2020	4 Februari 2020		KLHK	Air Limbah bersumber dari Oil Catcher 1 dan 2, drainase air hujan yang bersinggungan dengan are tanki timbun, area dryingbed, genset dan bengkel, fillingshed, dan area rumah pompa
7	Petronas Carigali (Ketapang II) LTD	R201903190015	2019	Jawa Timur	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas	Perubahan IPLC Ke Laut	SK.74/Menlhk/Setjen/PKL.1/2/2020	4 Februari 2020		KLHK	Perubahan terhadap SK. 338/Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2017 pada Amar KEDUA, Amar KESEPULUH, Amar KEDUABELAS, Amar KETUJUHBELAS, Lampiran I, II, dan Lampiran III
8	PT Indonesia Bulk Terminal (Fuel Land Storage Terminal)	R201908270007	2019	Kalimantan Selatan	Distribusi Bahan Bakar Minyak	IPLC Ke Laut Baru	SK.75/Menlhk/Setjen/PKL.1/2/2020	4 Februari 2020		KLHK	Air Limbah bersaral dari Oil Water Separation yang berasal dari kegiatan drain tanki.
9	PT Pertamina (Persero) TBBM Parepare	R201905310005	2019	Sulawesi Selatan	Distribusi Bahan Bakar Minyak	IPLC Ke Laut Baru	SK.98/Menlhk/Setjen/PKL.1/2/2020	10 Februari 2020		KLHK	Air limbah bersumber dari Oil Catcher 1 dan 2, drainase air hujan yang bersinggungan dengan are tanki timbun, area dryingbed, genset dan bengkel, fillingshed, dan area rumah pompa
10	PT Multiminas Nabati Asahan	R201905310008	2019	Banten	Pengelola Kawasan Industri	IPLC Ke Laut Baru	SK.99/Menlhk/Setjen/PKL.1/2/2020	10 Februari 2020		KLHK	Air Limbah bersaral dari IPAL Terpadu yang mengolah industri PT Multiminas Nabati Asahan dan PT Wina Wilmar Nabati, PT Putra Baja Deli, Air Limbah Domestik (Black Water and Grey Water) perumahan dan fasilitas umum kawasan industri; air limbah buangan proses WTP/RO dan air limbah blowdown boiler.
	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara PLTU Sumbawa Barat	R201904300015	2019	Nusa Tenggara Barat	Pembangkit Listrik	IPLC Ke Laut Baru	SK.112/Menlhk/Setjen/PKL.1/2/2020	18 Februari 2020		KLHK	Air limbah bersaral dari air pendingin, air limbah desalinasi, dan pengolah WWTP
12	PT Etmeico Sarana Laut	R201712080013	2017	Sulawesi Utara	Pengolahan Ikan Segar/Beku, Ikan Kayu, Fish Meal, dan Es Balok	IPLC Ke Laut Baru	SK.4/1/KLHK/2020	3 Maret 2020		BKPM	IPAL Gabungan proses produksi dan kegiatan penunjang
13	Premier Oil Natuna Sea BV Lapangan Anoa	R201906120010	2019	Kepulauan Riau	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas	IPLC Ke Laut Baru	S.198/SETJEN/ROKUM/PKL.1/3/2020	SK.8/1/KLHK/2020	11 Maret 2020	BKPM	Air limbah destilasi FPSO, air teproduksi, air pendingin FPSO, Air limbah pendingin destilasi FPSO, air limbah domestik dan saniter FPSO, air limbah drainase dek FPSO, air limbah RO dari anjungan Anoa, air limbah domestik dan saniter anjungan Anoa, air limbah drainase dek anjungan AGX, dan air limbah pendingin dari anjungan AGX
14	BP Berau Ltd	R201802020039	2018	Papua Barat	Eksplorasi dan Produksi Mi	IPLC Ke Laut Baru	S.202/SETJEN/RSK.9/1/KLHK/2020		11 Maret 2020	BKPM	Air limbah berdasar dari air terproduksi dan terkontaminasi hidrokarbon cair, air terkontaminasi bahan kimia, air limbah desalinasi dan RO, air limbah domestik, air limbah domestik dan lindi dari landfill sampah domestik, air limbasan hujan are pabrik
15	PT Saipem Indonesia	R201908130008	2019	Kepulauan Riau	Industri Fabrikasi Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung, Aktivitas Penunjang Pertambangan Migas	IPLC Ke Laut Baru	S.220/SETJEN/ROKUM/PKL.1/3/2020	SK.14/1/KLHK/2020	24 Maret 2020	BKPM	Air limbah IPAL domestik yang mengolah air limbah black water dan grey water dan cooling water power station dan air limbah buangan dari portabel pengelolaan air menjadi air minum
16	PT Tanjung Kasam Power (TJK)	R201908220006	2019	Kepulauan Riau	Pembangkit Listrik	IPLC Ke Laut Baru	S.234/SETJEN/ROKUM/PKL.1/3/2020	SK.17/1/KLHK/2020	24 Maret 2020	BKPM	Air limbah pendingin, dan SWRO
17	PT Pertamina Hulu Sangga Sanga	R20180250020	2018	Kalimantan Timur	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas	Perubahan IPLC Secara Injeksi	SK.167/Menlhk/Setjen/PKL.1/3/2020		26 Maret 2020	KLHK	Merubah Amar KESATU terkait Penanggung Jawab Usaha terhadap SK.595/MENLHK/SETJEN/PKL.1/10/2017 dari yang sebelumnya Virginia Indonesia Co. LLC
18	PT Pertamina Hulu Sangga Sanga	R201810250020	2018	Kalimantan Timur	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas	Perubahan IPLC Secara Injeksi	SK.168/Menlhk/Setjen/PKL.1/3/2020		26 Maret 2020	KLHK	Merubah Amar KESATU terkait Penanggung Jawab Usaha terhadap SK.04.10.05 Tahun 2015 dari yang sebelumnya Vico Indonesia
19	PT Pertamina Hulu Sangga Sanga	R201810250020	2018	Kalimantan Timur	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas	Perubahan IPLC Secara Injeksi	SK.169/Menlhk/Setjen/PKL.1/3/2020		26 Maret 2020	KLHK	Merubah Amar KESATU terkait Penanggung Jawab Usaha terhadap SK.169/Menlhk-Setjen/PKL.1/3/2015 dari yang sebelumnya Vico Indonesia
20	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara PLTU Ampenan	R201907160002	2019	Sulawesi Tengah	Pembangkit Listrik	IPLC Ke Laut Baru	SK.39/1/KLHK/2020		16-Apr-20	BKPM	Air limbah bersaral dari WWTP utama dan kegiatan penunjang, air limbah pendingin, dan Reject Desalinasi (SWRO/BWRO)
21	PT Tenaga Listrik Bengkulu	R201911070018	2019	Bengkulu	Pembangkit Listrik	IPLC Ke Laut Baru	SK.45/1/KLHK/2020		16-Apr-20	BKPM	Air limbah bersaral dari air limbah domestik, air bahang, air reject desalinasi, dan air limbah proses utama

TAHUN 2020
PERATURAN

NO	NAMA	NOMOR	TGL KELUAR	JENIS
1	P.1/PPKL/PPA/PKL.2/1/2020	Petunjuk Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Biogester	28 Januari 2020	Peraturan Direktur Jenderal
2	P.2/PPKL/SET/KAP.3/2/2020	Petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah di lingkup Ditjen PPKL tahun 2020	10 Februari 2020	Peraturan Direktur Jenderal
3	P.4/PPKL/SET/REN.3/2/2020	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Ditjen PPK	10 Februari 2020	Peraturan Direktur Jenderal
4	P.5/PPKL/SET/KAP.2/4/2020	Perubahan peraturan Dirjen PPKL no: P.2/PPKL/SET/KAP.3/2/2020 ttg Petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah di lingkup Ditjen PPKL tahun 2020	21-Apr-20	Peraturan Direktur Jenderal
5	P.7/PPKL/PPA/PKL.2/5/2020	Perubahan Peraturan Dirjen PPKL Nomor: P.8/PPKL/PPA/PKL.2/8/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Secara Otomatis, Kontinyu dan Online	12 Mei 2020	Peraturan Direktur Jenderal
6	P.11/PPKL/PKG/PKL.0/8/2020	Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Untuk Pemulihian Ekosistem Gambut	24 Agustus 2020	Peraturan Direktur Jenderal
7	P.12/PPKL/SET/KUM.1/9/2020	Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah Tahun 2020	8-Sep-20	Peraturan Direktur Jenderal
8	P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020	Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2020 - 2024	14-Sep-20	Peraturan Direktur Jenderal
9	P.14/PPKL/SET/KUM.1/9/2020	Benchmark Migas EP	14-Sep-20	Peraturan Direktur Jenderal
10	P.15/PPKL/SET/KUM.1/9/2020	Benchmark Semen	14-Sep-20	Peraturan Direktur Jenderal
11	P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2020	Pedoman Penilaian lebih dari Ketaatan PROPER Tahun 2019 - 2020	14-Sep-20	Peraturan Direktur Jenderal
12	P.17/PPKL/SET/KUM.1/9/2020	Benchmark Pupuk	14-Sep-20	Peraturan Direktur Jenderal

KEPUTUSAN

13	SK.2/PPKL/PPU/PKL.3/1/2020	Petugas AQMS di daerah	2 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
14	SK.3/PPKL/SET/DTN.0/1/2020	Tim Pengelola Sistem Pelaporan Elektronik Izin Lingkungan	2 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
15	SK.4/PPKL/SET/WAS.3/1/2020	Tim Sekretariat PROPER	6 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
16	SK.35/PPKL/SET/HMS.3/1/2020	Tim Kehumasan Ditjen PPKL	10 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
17	SK.36/PPKL/SET/DTN.0/1/2020	Tim Wali Data Ditjen PPKL	10 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
18	SK.37/PPKL/SET/HMS.2/1/2020	Tim Survey Kepuasan Pelayanan Perizinan	10 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
19	SK.38/PPKL/SET/PEG.1/1/2020	Unit pengelola pengaduan atas dugaan pelanggaran oleh ASN lingkup Ditjen PPKL	10 Januari 2020	Keputusan Direktur Jenderal
20	SK.52/PPKL/SET/REN.0/4/2020	Penelitian indikator Kinerja Utama Dit PPKL tahun 2020-2024	6-Apr-20	Keputusan Direktur Jenderal
21	SK.53/PPKL/SET/WAS.0/4/2020	Penelitian Peserta Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020	22-Apr-20	Keputusan Direktur Jenderal
22	SK.55/PPKL/SET/KUM.1/4/2020	Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL	24-Apr-20	Keputusan Direktur Jenderal
23	SK.56/PPKL/SET/KUM.1/4/2020	Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL	28-Apr-20	Keputusan Direktur Jenderal
24	SK.59/PPKL/SET/6/KAP.3/5/2020	SK Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Penyelesaian Hibah Barang Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah belakna akun 526 lingkup Ditjen PPKL	8 Mei 2020	Keputusan Direktur Jenderal
25	SK.60/PPKL/SET/WAS.0/5/2020	Perubahan Peserta Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020	15 Mei 2020	Keputusan Direktur Jenderal
26	SK.63/PPKL/SET/6/KEU.4/6/2020	Penanggung jawab likuidasi dan tim likuidasi entitas akutansi satker pusat lingkup Ditjen PPKL	2 Juni 2020	Keputusan Direktur Jenderal
27	SK.64/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Pinang Witmas Sejati	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
28	SK.65/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT PP London Sumatera Indonesia	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
29	SK.66/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Mitra Unggu Pusaka	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
30	SK.67/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Prima Alumina	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
31	SK.68/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Erasakti Wiraforestama	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
32	SK.69/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Graha Inti Jaya	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
33	SK.70/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Limpa Sejahtera	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
34	SK.71/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Prima Agro Permai	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
35	SK.72/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT PP London Sumatera Indonesia (Wili. Kaltim)	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
36	SK.73/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Pusakameggi Bumihusnusanta	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
37	SK.74/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Surya Panen Subur	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
38	SK.75/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Wana Seponjen Indah	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
39	SK.76/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Hindil	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
40	SK.77/PPKL/PKG/PKL.0/7/2020	Penetapan titik peneratan TMAT dan titik stasiun pemantauan curah hujan bagi usaha dan/atau kegiatan dilahan gambut PT Mendarha AgroJaya Industri	30 Juli 2020	Keputusan Direktur Jenderal
41	SK.98/PPKL/SET/WAS.8/10/2020	Penetapan Calon Kandidat Hijau PROPER 2019-2020	10-Sep-20	Keputusan Direktur Jenderal
42	sk.102/PPKL/SET/WAS.8/1/2020	Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2019 - 2020	22-Sep-20	Keputusan Direktur Jenderal
43	SK.104/PPKL/SET/WAS.8/11/2020	Penetapan Calon Kandidat Emas 2019-2020	9-Nov-20	Keputusan Direktur Jenderal
44	SK.105/PPKL/PKG/PKL.0/11/2020	SK Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Gambut Kelahanan Pangan Ditjen PPKL Tahun 2020	9-Nov-20	Keputusan Direktur Jenderal
45	SK.106/PPKL/SET/WAS.8/11/2020	SK tentang Perubahan Penetapan Calon Kandidat Emas PROPER Tahun 2019-2020	23-Nov-20	Keputusan Direktur Jenderal
46	SK.107/PPKL/SET/REN.0/11/2020	SK tim penurunan fasilitator desa di 29 desa Propinsi Kalimantan Tengah		Keputusan Direktur Jenderal
47	SK.109/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Rencana Pemulihian Ekosistem Gambut dan Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Kaswari Unggu	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
48	SK.110/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Rencana Pemulihian Ekosistem Gambut pada Areal Indikatif Kebakaran PT Tri Agra Persada	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
49	SK.111/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Produk SawahIndo Persada	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
50	SK.112/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Ichiko Agro Lestari	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
51	SK.113/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Petaling Mandaraguna	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
52	SK.114/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Priatama Kreasimas	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
53	SK.115/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Dendymaker Indah Lestari	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
54	SK.116/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Cahaya Sawit Sejahtera	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
55	SK.117/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Gerbang Benua Raya	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
56	SK.118/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penetapan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Persada Sawit Mas	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal

57	SK.119/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Bahari Gemira Ria	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
58	SK.120/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Pundi Lahan Khatulistiwa	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
59	SK.121/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Pinang Wimmas Abadi	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
60	SK.122/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Cipta Lestari Sawit	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
61	SK.123/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Mitra Aneka Rezeki	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
62	SK.124/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Baratama Putra Perkasa	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal
63	SK.125/PPKL/PKG/PKL.0/12/2020	Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Mayawana Persada	1 Desember 2020	Keputusan Direktur Jenderal

TAHUN 2020

NO	NAMA	PERATURAN	PERATURAN	
			NOMOR PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN
1	Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua	P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020	5 Februari 2020	Peraturan Menteri
2	Indeks Standar Pencemar Udara	P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020	13 Juli 2020	Peraturan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI LHK				
3	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Saddang	SK.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020	9 Januari 2020	Keputusan Menteri
4	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Seraya	SK.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020	9 Januari 2020	Keputusan Menteri
5	Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusus Rancangan Peraturan Persiden tentang Pengesahan Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnership in Environmental Management of the Seas of East Asia (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Laut Asia Timur)	SK.221/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2020	12 Mei 2020	Keputusan Menteri
6	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional	SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020	9 Juni 2020	Keputusan Menteri
7	Perubahan Keputusan Menteri LHK No. 1049/Menlhk/Setjen/PPKL.4/6/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2019	SK.269/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020	25 Juni 2020	Keputusan Menteri
8	Kelompok Kerja Penataan Ekosistem Gambut Kegiatan Pengembangan Lahan Pangan Nasional Terpadu Tahun 2020 - 2022	SK. 408/Menlhk/Setjen/Kum.0/10/2020	27 Oktober 2020	Keputusan Menteri
9	Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2020	SK. 460/Menlhk/Setjen/Kum.0/10/2020	11 Desember 2020	Keputusan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI LHK YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BERDASARKAN PASAL 5 PERMENLHK NOMOR: P.10 TAHUN 2019				
10	Penetapan Peta FEG skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut PT Mayangkara Tanaman Industri	SK.564/MENLHK-PPKL/PKG/PKL.0/2/2020	10 Februari 2020	Keputusan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI LHK YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BERDASARKAN PASAL 6 PERMENLHK NOMOR: P.34 TAHUN 2019				
11	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PKLAT kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	SK.4989/MENLHK-PPKL/PKLAT/KAP.3/8/2020	31-Aug-20	
12	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PKLAT kepada Kelompok Masyarakat Lawang Geger Curug Sawyer	SK4989/MENLHK-PPKL/PKLAT/KAP.3/8/2020	31-Aug-20	
13	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PPA kepada Pemda Kab. Mandailing Natal	SK.5106/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
14	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PPA kepada Pondok Pesantren MadinatunNajah	SK.5108/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
15	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Dit. PPA kepada Pondok Pesantren Attolibiyah	SK.5109/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
16	Hibah IPAL Domestik komunal Kwarda Pramuka Depok Kab Sleman	SK.5112/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
17	Hibah IPAL Domestik komunal Ponpes Mansyaul Huda Tuban	SK.5113/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
18	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Itthihadul Muslimin Kab. Siak Prop. Riau	SK.5114/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
19	Hibah IPAL Domestik Komunal SMA Kristen Dobo Kabupaten Kepulauan Aru	SK.5115/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
20	Hibah IPAL Domestik Komunal SMP Kristen 1 Kep. Aru Maluku	SK.5116/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
21	Hibah IPAL Domestik Komunal SMN 1 Singkawang Kalbar	SK.5117/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
22	Hibah IPAL Domestik di Ponpes Darul Qur'an Kab. Deli Serdang	SK.5121/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
23	Hibah IPAL Domestik Komunal Kabupaten Maluku Barat	SK.5122/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
24	Hibah IPAL Domestik Komunal SD Negeri 2 Kota Ambon Provinsi Maluku	SK.5123/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
25	Hibah IPAL Domestik Komunal SD Negeri 4 Kota Ambon Provinsi Maluku	SK.5124/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
26	IPAL Domestik Komunal Kabupaten Biak, Provinsi Papua	SK.5126/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
27	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Asy-Syifa	SK.5127/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
28	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Nurussyamsi Wal Qomar Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	SK.5129/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
29	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Darul Khairat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	SK.5130/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
30	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Roudoluth Tholibin Waththulab	SK.5131/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
31	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Pondok Pesantren Al Istighomah	SK.5132/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
32	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada SMA Teladan Di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	SK.5133/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
33	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Kelompok Masyarakat Garuda Lestari Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	SK.5134/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
34	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Yayasan Al Hasimiyah Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara	SK.5135/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
35	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada SDN 10 Tolok Di Kabupaten Landak, Provinsi Kalbar	SK.5136/MENLHK-PPKL/PPA/KAP.3/9/2020	3-Sep-20	
36	Kelompok Masyarakat nagari Tebing Tinggi di Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya	SK.5542/MENLHK-PPKL/PKLAT/PKL.4/10/2020	7 Oktober 2020	
37	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada Ditjen PPKL kepada Ketua Bumdes Agro Edu Wisatab Njulung Kab. Malang	SK.5543/MENLHK-PPKL/PKLAT/KAP.3/10/2020	7 Oktober 2020	
38	Hibah BMN pada Ditjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalsel pada pembangunan Sekat Kanal /2 paket/Pokmas, MPT Desa Mantaren I dan MPT Desa Gohong	SK.6595/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020	3 Desember 2020	
39	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Talio, MPT Desa Talio Hulu dan MPT Desa Dandang	SK.6596/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020	3 Desember 2020	

40	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Bahaur Hulu Permai, MPT Desa Bahaur Tengah dan MPT Desa Tanjung Perawan	SK.6597/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020	3 Desember 2020	
41	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Batuah, MPT Desa Pulau Kupang dan MPT Desa Sungai Jaya	SK.6598/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020	3 Desember 2020	
42	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalteng pada pembangunan Sumur Bor dan Sekat Kanal /3 paket/Pokmas, MPA Desa Tanjung Taruna, MPA Desa Tumbang Nusa dan MPT Desa Henda	SK.6599/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020	3 Desember 2020	
43	Hibah BMN pada Dirjen PPKL yang berada pada BRG kepada kelompok masyarakat di Prov. Kalbar pada pembangunan Sekat Kanal /2 paket/Pokmas, Gabmas Mandiri dan Mekar Sari	SK.7454/MENLHK-PPKL/SET.6/KAP.3/12/2020	15 Desember 2020	
SURAT EDARAN MENTERI LHK ATAU DIRJEN PPKL				
1	Protokol Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan pada Masa Pandemi COVID-19	SE.5/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020	25 Juni 2020	Surat Edaran Menteri LHK
2	Protokol Pengelolahan Air Limbah dan Tinja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menangani Pasien COVID-19	SE.8/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2020	23-Sep-20	Surat Edaran Menteri LHK
3	Pedoman Pemantauan Sampah Laut	SE.9/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020	9 Oktober 2020	Surat Edaran Menteri LHK



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
JL. DI. PANJAITAN KAV. 24, JAKARTA 13410 - INDONESIA
www.ppk.l.menlhk.go.id**